

**REPRESENTASI IDEOLOGI DI BALIK
WACANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN 2019 DALAM MEDIA *KOMPAS*:
ANALISIS WACANA KRITIS**

**THE IDEOLOGICAL REPRESENTATION BEHIND THE 2019
PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL ELECTION
DISCOURSE IN *KOMPAS* MEDIA: A CRITICAL DISCOURSE
ANALYSIS**

**ILYAS ZAINUDDIN
F032171001**



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**REPRESENTASI IDEOLOGI DI BALIK WACANA PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DALAM MEDIA
KOMPAS: ANALISIS WACANA KRITIS**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Bahasa Indonesia

Disusun dan diajukan oleh

ILYAS ZAINUDDIN

F032171001

Kepada

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

TESIS

**REPRESENTASI IDEOLOGI DI BALIK WACANA PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DALAM MEDIA KOMPAS: ANALISIS
WACANA KRITIS**

Disusun dan diajukan oleh:

**ILYAS ZAINUDDIN
F032171001**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 16 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

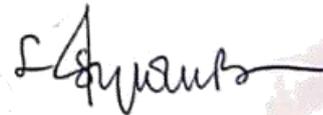
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad Darwis, M. S.



Dr. Ery Iswary, M. Hum.

**Ketua Program Studi Magister Bahasa
Indonesia**



Dr. Asriani Abbas, M. Hum



**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Akin Duli, M. A.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilyas Zainuddin
NIM : F032171001
Program Studi : Bahasa Indonesia
Jenjang : S-2 Bahasa Indonesia

Menyatakan dengan ini bahwa tesis yang berjudul “**Representasi Ideologi di Balik Wacana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 dalam Media *Kompas*: Analisis Wacana Kritis**” merupakan hasil karya penulis dan bukan plagiat atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Ilyas Zainuddin

KATA PENGANTAR

Bismillahir-rahmanir-rahim

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. zat yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, salam dan salawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang merupakan teladan buat kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Representasi Ideologi di Balik Wacana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 dalam Media Kompas: Analisis Wacana Kritis" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora di Program Studi Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Penulis bersyukur telah menyelesaikan tesis ini melalui proses panjang yang mengajarkan banyak hal. Meskipun dalam proses penyelesaiannya mengalami kendala, akhirnya dapat dilalui berkat bantuan dan bimbingan tulus dari berbagai pihak. Penulis menyadari tidak ada karya tulis yang sempurna, termasuk tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu.

1. Prof. Dr. Muhammad Darwis, M. S. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, tenaga, kesabaran, memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Ery Iswary, M. Hum. selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu, pikiran, kesabaran, motivasi, serta banyak memberikan saran.
3. Tim penguji: Prof. Dr. AB Takko, M. Hum., Dr. Kamsinah, M. Hum. dan Dr. Ayub Khan, M. Si. yang telah memberikan arahan yang bermanfaat demi penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Asriani Abbas, M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Bahasa Indonesia.
5. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Akin Duli, MA.
6. Segenap dosen pengasuh Program Pascasarjana Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan selama menempuh pendidikan.
7. Semua staf Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
8. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.

9. Teman-teman seperjuangan Kasri Riswadi, Nurfadila Yani, Eva Yuliana Manaf, dan Ayu Fitriani terima kasih atas kebersamaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan rasa terima kasih kepada istri penulis Andi Nurul Qualby yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa agar selalu dalam lindungannya. Ucapan terima kasih dan salam hormat untuk kedua orang tua penulis Zainuddin dan Hapiah yang telah memberikan kasih sayang dengan dibarengi alunan doa yang tulus dalam mengasuh, merawat, membesarkan, dan membimbing penulis serta mengiringi perjalanan hidup penulis untuk menggapai cita-cita. Semoga penulis mampu membalas pengorbanan kalian dengan kebahagiaan. Amin!

Akhirnya penulis memanjatkan doa kepada Allah swt. semoga segala perhatian, motivasi, dan bantuan dibalas oleh-Nya sebagai amal kebaikan dan penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga tesis ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

Terima kasih.

Makassar,

2021

Ilyas Zainuddin

ABSTRACT

ILYAS ZAINUDDIN. *The Ideological Representation Behind A Discourse of 2019 Presidential and Vice Presidential Election in Kompas Media: A Critical Discourse Analysis* (Supervised by Muhammad Darwis and Ery Iswary).

The research aims to reveal *Kompas* news ideological representation regarding 2019 presidential and vice presidential election through the forms of the text, discourse practices, and socio-cultural practices.

This was the qualitative research. Data collection techniques used were: the documentation technique, text observation technique, and note-taking technique. The data were analyzed based on Norman Fairclough's critical discourse analysis.

The research result indicates that *Kompas* media ideology represents the partiality to the presidential candidate pair, Joko Widodo-Ma'ruf Amin by perceiving to the text form being dominated by the news strengthening the position of the candidate pair of President and Vice-President Joko Widodo-Ma'ruf Amin, namely 13:8 news text. In the discourse practice dimension, *Kompas* media has the partiality to candidate pair President and Vice President Joko Widodo-Ma'ruf Amin by seeing the comparison of 11:6 of the news text production and intertextuality favouring the Presidential Candidate Joko Widodo. In the socio-cultural practice dimension, *Kompas* media favours the candidate pair of President and Vice-President Joko Widodo-Ma'ruf Amin by perceiving the situational, institutional, and social factors in the news texts dominating the support to candidate pair of President and Vice-President Joko Widodo-Ma'ruf Amin. *Kompas* media ideological representation is showing in the form of the partiality to the candidate pair of President and Vice-President Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Key words: Critical Discourse Analysis, discourse of 2019 Presidential and Vice Presidential General Election, ideological representation.



ABSTRAK

ILYAS ZAINUDDIN. *Representasi Ideologi Dibalik Wacana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 dalam Media Kompas: Tinjauan Analisis Wacana Kritis* (dibimbing oleh Muhammad Darwis dan Ery Iswary).

Penelitian ini bertujuan mengungkap representasi ideologi berita Kompas tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2019 melalui bentuk teks, praktik wacana, dan praktik sosio-kultural.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, teknik observasi teks, dan teknik catat. Data dianalisis berdasarkan analisis wacana kritis Norman Fairclough.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi media Kompas merepresentasikan keberpihakan kepada pasangan calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan melihat bentuk teks didominasi dengan berita yang menguatkan posisi pasangan calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yakni 13:8 teks berita. Pada dimensi praktik wacana, media Kompas memiliki keberpihakan kepada Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan melihat perbandingan 11:6 produksi teks berita dan intertekstualitas yang mengunggulkan Calon Presiden Joko Widodo. Pada dimensi praktik sosiokultural, media Kompas berpihak kepada pasangan calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan melihat faktor situasional, institusional, dan sosial teks berita mendominasi dukungan terhadap pasangan calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Representasi Ideologi media Kompas menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Wacana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, Representasi Ideologi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Relevan.....	14
B. Tinjauan Pustaka	16
1. Konsep Wacana, Analisis Wacana, dan Analisis Wacana Kritis	16
2. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.....	33
3. Media Massa	49
4. Representasi	53

C. Kerangka Pikir	55
D. Definisi Operasional	58
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	60
B. Sumber Data.....	60
C. Populasi dan Sampel	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Teknik Analisis Data	63
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dimensi Teks	65
B. Praktik Wacana (<i>Discourse Practice</i>)	144
C. Praktik Sosiokultural (<i>Sociocultural Practice</i>)	150
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	159
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	162

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan presiden dan calon presiden tahun 2019 merupakan momentum demokrasi masyarakat Indonesia dan berlangsung dengan sengit karena hanya terdapat dua pasangan calon yang berkompetisi. Pemilihan umum tersebut merupakan sebuah momen yang penting karena dapat berimbas pada kondisi kenegaraan selama lima tahun ke depan. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat Indonesia harus diberikan perhatian lebih karena peristiwa pemilu tersebut dapat menentukan arah negara selama satu periode. Dalam proses pemilu tersebut, terdapat media massa yang menjadi salah satu faktor penting dalam membuat rakyat menentukan pilihannya. Informasi yang diciptakan media massa tersebut dapat memengaruhi pilihan rakyat terhadap calon presiden.

Media massa merupakan alat komunikasi yang menyebarkan informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Peran dan fungsi dari media sebagai penyedia informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui media, informasi tentang fenomena realitas yang terjadi dapat disalurkan kepada masyarakat baik berupa bentuk media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Ketiga bentuk media tersebut sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat

sehingga dapat dikatakan bahwa media adalah salah satu alat untuk membentuk realitas masyarakat.

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, media mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Media mampu menciptakan sebuah realitas kepada masyarakat dan realitas tersebut dapat saja dicerna sebagai sebuah kebenaran. Dengan peran tersebut dapat dikatakan bahwa media yang berperan sebagai aktor dalam menyampaikan kebenaran tentang realitas sosial kepada masyarakat. Media menjadi alat kekuasaan di tengah realitas sosial yang sarat dengan kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks.

Althusser (dalam Sobur, 2015: 30) mengatakan bahwa media, dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi yang strategis terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Media massa merupakan bagian dari alat kekuasaan Negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa. Akan tetapi, media pun tidak hanya datang dari pihak penguasa, media pun dapat menjadi sebuah resistensi ideologis dari kelas tersubordinasi. Seperti pandangan Antonio Gramsci (dalam Sobur, 2015: 30) bahwa media sebagai ruang di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Di satu sisi, media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan kontrol atas wacana publik. Di sisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap

kekuasaan. Pernyataan tersebut berbeda dengan sebagian anggapan orang bahwa media tidak lebih hanyalah alat komunikasi yang netral.

Peran media dalam membentuk informasi kepada masyarakat baik secara sadar maupun tidak sadar telah memengaruhi berbagai sisi kehidupan di masyarakat baik dari kondisi sosial, budaya, agama maupun politik, Terlebih pada sistem politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia yakni sistem demokrasi. Perwujudan sistem demokrasi di Indonesia telah melahirkan sistem pemilihan presiden yang disebut sebagai pemilihan umum (pemilu).

Media dengan pengaruh besar tersebut seyogyanya menampilkan berita secara berimbang dan netral terhadap satu peristiwa yang diliputnya. Terkhusus pada momentum pilpres yang begitu penting bagi suatu bangsa untuk meyakinkan masyarakatnya dalam memilih pilihan yang tepat. Akan tetapi, media lebih kerap bersikap tidak netral dan menampilkan keberpihakan terhadap salah satu kandidat dalam pilpres tersebut disebabkan oleh kepentingan-kepentingan atau tujuan tertentu yang sejalan dengan ideologi media yang dianutnya. Ideologi itulah direpresentasikan oleh media dalam bentuk keberpihakan terhadap salah satu kandidat yang bertarung dalam pilpres dengan tujuan membangun citra dan mengambil alih pilihan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji wacana yang diproduksi media pada pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang melibatkan dua pasangan calon

yakni pasangan nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kedua pasangan calon tersebut tentunya memiliki strategi untuk mengambil perhatian masyarakat agar memilih pasangannya pada saat pemilu dilaksanakan. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan ialah membentuk citraan baik di mata rakyat dengan bantuan media (pers).

Media yang terdapat di Indonesia memiliki beragam jenis mulai dari skala lokal hingga skala nasional. Pada skala nasional terdapat beberapa media yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, pemilihan umum selalu menjadi berita yang menarik untuk diikuti perkembangannya karena hanya terdapat dua pasangan calon yang sedang bertarung kuasa merebut simpati masyarakat. Media pun menjadi wadah untuk menggiring perhatian masyarakat ke arah salah satu pasangan calon presiden yang memiliki kuasa atau hubungan terhadap media tersebut.

Peneliti memilih media *Kompas* sebagai objek penelitian untuk mengkaji berita atau informasi tentang pasangan calon presiden yang dipublikasikan kepada masyarakat. Berita tersebut didapatkan melalui media *Kompas online*. Alasan peneliti memilih *Kompas* sebagai objek penelitian karena *Kompas* merupakan media yang memiliki pembaca di berbagai kalangan mulai dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas. Selain itu, Media *Kompas online* pernah beberapa kali

mendapatkan beberapa penghargaan sebagai media online terpercaya, salah satunya diberikan oleh Superbrands tahun 2018.

Dilihat dari visi dan misi *Kompas*, visi *Kompas* adalah ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan dan meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Misi *Kompas* ialah menempatkan nilai kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang tersenden atau mengatasi kepentingan kelompok. Mengingat surat kabar *Kompas* sebagai surat kabar nasional yang dipercaya dan mencakup visi dan misi yang memfokuskan pada masalah sosial dan terbuka (Wulandari, 2012).

Kompas telah memberikan berita dan informasi seputar pemilihan umum tahun 2019 selama beberapa bulan hingga waktu pelaksanaan pemilihan umum pada bulan April 2019. Dalam berita tersebut, peneliti melihat bahwa *Kompas* membuat berita tentang pemilihan umum 2019 tidak berimbang dan lebih condong atau lebih banyak memberitakan tentang salah satu pasangan calon presiden. Hal ini mengindikasikan bahwa *Kompas* termasuk salah satu media yang memiliki ideologi keberpihakan terhadap salah satu golongan atau kelompok politik. Gejala-gejala keberpihakan dapat dilihat dari beberapa berita yang disampaikan oleh media tersebut.

Masa menjelang pemilu presiden 2019, *Kompas* begitu gencar menyajikan berita berkaitan tentang calon presiden nomor urut 1 Joko

Widodo – Ma’ruf Amin dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dalam berita yang dikeluarkan tersebut, tidak tampak adanya keganjilan dan keberpihakan media terhadap salah satu calon. Jika melihat lebih lanjut lagi menggunakan analisis wacana kritis, mulai tampak adanya keberpihakan melalui fakta-fakta kebahasaan yang dihadirkan dalam berita tersebut. Keberpihakan dan tidak berimbangannya berita *Kompas* terhadap kedua pasang calon presiden 2019 dapat dilihat dalam berita berikut.

“Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi andalannya terkait Pilpres 2019. Visi misi tersebut ia paparkan saat menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam. Dalam pidatonya, Prabowo menjabarkan lima fokus program kerja nasional bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno jika keduanya terpilih. Kelima fokus program kerja itu kemudian ia jabarkan lagi melalui sejumlah janji-janji politik, dari soal penciptaan lapangan kerja, penyediaan susu gratis hingga penghentian ancaman persekusi terhadap kelompok minoritas.”

Dalam berita di atas, *Kompas* tampak memojokkan calon presiden nomor urut 2 dengan menggunakan kosa kata “janji-janji politik” dalam beritanya. Dengan menggunakan “janji-janji politik”, berita tersebut dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji yang dikeluarkan oleh calon presiden tersebut. Istilah ‘janji politik’ memberikan

paradigma kepada masyarakat yang mengarah pada janji pejabat yang tidak akan terbukti realisasinya. Fakta kebahasaan yang kedua dalam berita tersebut ialah adanya nominalisasi yakni mengubah bentuk verba menjadi nomina abstrak. Nominalisasi dapat dilihat dalam janji calon presiden nomor urut 2 yakni “penciptaan, penyediaan, dan penghentian.” Dengan adanya nominalisasi tersebut, subjek dalam peristiwa itu tidak dihadirkan atau dihilangkan. Hal itu akan berdampak pada penghilangan subjek atau calon presiden yang akan melaksanakan program kerja tersebut sehingga Prabowo Subianto dipisahkan dengan subjek yang akan menciptakan lapangan kerja, menyediakan susu gratis, dan menghentikan ancaman persekusi.

Hal berbeda dapat dilihat dalam penyajian berita tentang calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo. Berita tersebut disajikan pada tanggal 21 Februari 2019 dengan kutipan sebagai berikut.

“Presiden Joko Widodo menjelaskan soal pembangunan jalan di desa selama masa pemerintahannya yang mencapai 191.000 km. Penjelasan Jokowi juga ditujukan untuk sejumlah orang yang meragukan pernyataannya. Presiden Jokowi dalam pidatonya kembali menegaskan bahwa dalam pemerintahannya selama empat tahun terakhir telah berhasil membangun jalan sepanjang 191.000 km. Ia mengatakan pembangunan jalan selama empat tahun ini telah dilakukan di hampir 75.000 desa. Ia mempersilahkan mereka yang

sangsi untuk mengukur sendiri jalan yang telah dibangun selama masa pemerintahannya.”

Sekilas berita tersebut hanya memaparkan tentang kinerja presiden yang saat ini sedang menjabat yakni mengerjakan pembangunan jalan. Akan tetapi, bila dilihat fakta-fakta kebahasaan dalam teks berita tersebut, tampak bahwa *Kompas* begitu menonjolkan keberhasilan presiden dalam menjalankan program-programnya. Dalam berita tersebut, kalimat-kalimat yang ditulis menampilkan subjek yakni Presiden Joko Widodo dengan maksud untuk menonjolkan pelaku yang melakukan pembangunan jalan di desa.

Kedua potongan berita di atas merupakan berita yang disajikan oleh *Kompas* tentang calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2.. Dapat dilihat bahwa *Kompas* memiliki kecenderungan berpihak ke arah salah satu pasangan calon presiden dalam menyajikan berita dengan menampilkan fakta-fakta kebahasaan yang menonjolkan salah satu pasangan calon dan memarjinalkan pasangan calon lainnya. Dengan demikian, media *Kompas* terindikasi sebagai media yang tidak netral dalam memberitakan peristiwa atau fenomena terkhusus pada wacana pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Seperti yang dikatakan oleh Tuchman (dalam Maghvira, 2017), media mengikutsertakan perspektif dan cara pandang mereka dalam menafsirkan realitas sosial. Mereka memilihnya untuk menentukan aspek-aspek yang ditonjolkan maupun dihilangkan, menentukan struktur berita

yang sesuai dengan kehendak mereka, dari sisi mana peristiwa yang ada disoroti, bagian mana dari peristiwa yang didahulukan atau dilupakan serta bagian mana dari peristiwa yang ditonjolkan atau dihilangkan; siapakah yang diwawancarai untuk menjadi sumber berita, dan lain-lain. Berita bukanlah representasi dari peristiwa semata-mata, tetapi di dalamnya memuat juga nilai-nilai lembaga media yang membuatnya.

Berita yang hadir dalam sebuah media tidak akan pernah terlepas dari kekuasaan dan ideologi yang menaungi atau dimiliki media tersebut. Dapat dikatakan bahwa berita yang disajikan oleh media merupakan representasi ideologi berupa keberpihakan sehingga menentukan jenis berita yang akan disajikan kepada khalayak. Bahasa yang digunakan oleh media mengunggulkan kelompok tertentu (dominan) dan memarginalkan kelompok yang lain. Bahasa tersebut juga dibangun atas kepentingan tertentu dengan maksud tertentu pula.

Permasalahan keberpihakan oleh media dapat dilihat dari bentuk teks berita yang merepresentasikan gejala-gejala linguistik menguatkan atau melemahkan posisi subjek berita itu. Di sisi lain, produksi teks maupun kesejarahan berita dapat diinterpretasikan tentang ketidaknetralan dari sebuah media. Selanjutnya, media menampilkan fenomena sosial, politik, ekonomi dan lainnya untuk mendukung atau mengunggulkan pihak tertentu. Masalah tersebut merupakan hal lazim yang dipraktikkan oleh media sehingga terjadi ketidaknetralan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh media.

Berangkat dari konsep tersebut, maka teknik analisis yang dianggap mampu membuka makna dari konstruksi berita adalah analisis wacana kritis. Eriyanto (2003) mengatakan bahwa analisis wacana kritis adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis kuantitatif. Jika analisis kuantitatif lebih menekankan pada pernyataan 'apa' (*what*), maka analisis wacana lebih menekankan pada 'bagaimana' (*how*) dari pesan atau teks komunikasi. Melalui analisis wacana kita tidak hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan.

Analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis wacana kritis ancangan Norman Fairclough. Metodenya mencakup deskripsi bahasa terhadap teks, interpretasi terhadap hubungan antara proses wacana (produksi dan interpretasi) dan penjelasan hubungan antara proses wacana dan proses sosial (Fairclough: 1998: 97). Menurut Jorgensen sebagaimana dikutip Widyawari (2016) bahwa pendekatan analisis wacana kritis Fairclough dianggap sebagai teori dan metode dalam analisis wacana kritis yang paling maju (sempurna) dibanding mmdengan pendekatan lainnya. Titik perhatian Fairclough adalah melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu. Fairclough membuat suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana didasarkan pada linguistik, pemahaman sosial, dan politik dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial (Darma, 2014: 127).

Fairclough dan Wodak (1997: 37) menegaskan bahwa analisis wacana kritis melihat wacana (pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan) sebagai bentuk praktik sosial sehingga bisa jadi menampilkan efek ideologi, memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, kelompok mayoritas dan minoritas. Analisis wacana kritis Norman Fairclough terbagi dalam tiga dimensi, yakni *teks*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Pada dimensi *teks*, hal mendasar yang dianalisis adalah perbendaharaan kata yang terait dengan makna tertentu, penggunaan istilah dan metafora karena mengacu ke makna atau tindakan tertentu.. *Discourse practice* memusatkan perhatian pada cara produksi dan konsumsi teks, bagian ini adalah analisis praktik wacana yang melihat kekuatan pernyataan dalam arti wacana mendorong suatu tindakan. Selanjutnya pada dimensi *sociocultural practice*, yakni menganalisis penggunaan bahasa secara empiris dalam konteks sosialnya. Berdasarkan teori tiga dimensi dari Fairclough, penulis mencoba membedah wacana yang lahir dari berita *Kompas* tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, permasalahan umum dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana representasi ideologi dalam teks berita media *Kompas* tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2019?

2. Bagaimana representasi ideologi dalam praktik wacana berita *Kompas* tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2019?
3. Bagaimana representasi ideologi dalam praktik sosio-kultural dalam berita *Kompas* tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan seperti yang dipaparkan sebagai berikut.

1. Untuk mengungkap representasi ideologi melalui bentuk teks berita *Kompas* tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2019?
2. Untuk mengungkap representasi ideologi melalui praktik wacana dalam berita *Kompas* tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2019?
3. Untuk mengungkap representasi ideologi melalui praktik sosio-kultural dalam berita *Kompas* tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2019?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis wacana kritis pada media.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian yang menggunakan kajian analisis wacana kritis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat memberdayakan masyarakat awam untuk lebih berpikir kritis terhadap wacana-wacana yang tampil di hadapan publik.
- b. Menjadi rujukan dan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti hal serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang berkaitan dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough telah dilakukan oleh Assidik (2016) dengan judul *Citra Publik Presiden Republik Indonesia pada Pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo, dan Harian Republika Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough*. Hasil penelitian Assidik menunjukkan bahwa Harian Suara Merdeka dan Harian Republika lebih mengarah ke pembentukan citra positif bagi Presiden Adapun Tabloid Tempo condong ke pembentukan citra negatif bagi Presiden. Citra positif dan negatif tersebut ditentukan oleh praktik wacana yang terdapat di media massa yang bersangkutan.

Widyawari (2016) turut menggunakan kajian analisis wacana kritis perspektif Norman Fairclough dengan judul *Representasi Ideologi dalam Tuturan Santun Pejabat Negara pada Talk Show Mata Najwa*. Dengan penelitian tersebut Widyawari menyatakan bahwa wujud kesantunan tuturan pejabat negara cenderung dominan mematuhi bidal ketimbangrasaan sebab dalam tuturan, mereka berusaha memaksimalkan keuntungan secara bijaksana dengan tidak mementingkan diri sendiri dan meminimalkan biaya sosial. Selain itu, wujud kesantunan, dimensi tuturan, praktik kesantunan, dan alasan bertutur pejabat negara dapat menunjukkan representasi ideologi mereka yaitu ideologi kerakyatan.

Penelitian yang menjadikan media *Kompas* sebagai objek penelitian telah dilakukan oleh Wulandari (2012) dengan judul *Pendayagunaan Struktur Teks Wacana Kesejahteraan Rakyat dalam Tajuk Rencana Harian Kompas*. Wulandari mendapatkan temuan yakni (1) struktur teks tematik yang kuat menunjukkan subjektivitas editornya. Unsur-unsur struktur pendukung topik yang digunakan menunjukkan bahwa *Kompas* berfihak kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan pemerintah; (2) struktur teks skematik cenderung menunjukkan poin penting pada akhir editorial. (3) sintaksis teks struktur menunjukkan bahwa *Kompas* mempertimbangkan berbagai kalangan pembacanya; (4) stilistik struktur teks yang mengkritisi masalah yang ada dalam masyarakat cenderung netral dan dapat diterima.

Suntama (2016) dengan judul *Representasi Komunikasi Politik Jokowi (Analisis Wacana Pemberitaan Blusukan Jokowi di Koran Kompas dan Republika)* mendapatkan hasil penelitian pada aspek teknis dan substansi. *Kompas* menampilkan blusukan Jokowi pada posisi yang dilegitimasi, sementara *Republika* menempatkan blusukan Jokowi pada posisi dimarjinalkan atau *illegitimate* pada setiap pemberitaan.

Muhammad Dahlan Abubakar (2018) dengan judul *Keberpihakan Media terhadap Berita Konflik Partai Golkar: Analisis Wacana Kritis* mendapatkan hasil penelitian pada keberpihakan tiga media yakni *Kompas*, *Tempo*, dan *Republika* pada konflik Partai Golkar dengan melihat tingkat semantik, praktik sosiokultural, dan pembingkai.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kajian tentang analisis wacana kritis Norman Fairclough sudah pernah dilakukan namun dengan objek penelitian yang berbeda yakni media *Kompas* dengan berita tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Oleh karena itu, penting melakukan kajian tersebut untuk menjelaskan praktik ideologi dan kekuasaan media *Kompas* dalam menyajikan berita tentang pemilu 2019.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Wacana, Analisis Wacana, dan Analisis Wacana Kritis

a. Wacana

Wacana (*discourse*) berasal dari bahasa Latin, yakni *discursus* yang menunjuk pada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Kridalaksana (dalam Darma, 2014: 4) mengatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal wacana merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya). Dalam pengertian linguistik, wacana adalah kesatuan makna (semantis) antarbagian di dalam suatu bangun bahasa yang tersusun secara padu. Selain itu, wacana juga terikat dengan konteks. Konteks inilah yang dapat membedakan wacana sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan bahasa yang bukan untuk tujuan komunikasi.

Badudu (dalam Badara, 2014: 16) juga memaparkan penjelasan tentang konsep wacana, yakni 1) Rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. 2) Kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa wacana merupakan satuan bahasa tertinggi atau terbesar di atas kalimat dengan kohesi dan koherensi yang sistematis dan berkesinambungan serta disampaikan secara lisan dan tulisan. Dalam konsep ini, wacana dimaknai sebagai satuan bahasa yang netral dan apa adanya, berada di atas kalimat, memiliki kesatuan makna yang padu dengan ide pokok (*main idea*) dan ide pendukung (*supporting idea*). Dengan demikian, konsep wacana dengan konteks ini mengacu kepada sebuah paragraf yang lengkap.

Sinclair (dalam Sinar, 2008: 5) mengatakan wacana adalah cara ujaran-ujaran saling berhubungan, siapa yang menguasai wacana; bagaimana seseorang melakukan tes kontrol; apakah partisipan lainnya mengambil alih; bagaimana peran penutur dan pendengar ketika terjadi peralihan dari satu peserta ke peserta lain; bagaimana topik baru

diperkenalkan dan topik lama berakhir; bukti linguistik apa yang ada untuk unit wacana yang lebih besar daripada ujaran seperti giliran berbicara dalam percakapan atau teks-teks tulisan, sebagai penggunaan bahasa secara khusus terdiri atas interaksi atas dialog di antara penutur. Sementara itu, Fairclough (dalam Sinar, 2008: 5) menggunakan *language use* diterjemahkan sebagai penggunaan bahasa, baik digunakan secara lisan maupun tulisan yang dipakai secara sosial. Pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, wacana dilihat sebagai penggunaan fungsi bahasa dalam komunikasi dan interaksi. Dalam komunikasi dan interaksi tersebut terdapat sebuah maksud yang terselubung berdasarkan pada konteks tertentu.

b. Analisis Wacana

Analisis wacana merupakan pendekatan yang mengkaji relasi antara bahasa dengan konteks yang melatarbelakanginya. Dalam arti yang paling sederhana, analisis wacana adalah kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat. Lazimnya, perluasan istilah ini dikaitkan dengan konteks lebih luas yang mempengaruhi makna rangkaian ungkapan secara keseluruhan.

Menurut Darma (2014: 10), analisis wacana tidak hanya mengemuka dalam kajian bahasa, tetapi juga dalam berbagai lapangan kajian lain. Kalau dalam linguistik, analisis wacana merujuk pada kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat yang memusatkan perhatian pada arah lebih tinggi dari hubungan ketatabahasaan (*grammatical*). Dalam sosiologi, analisis wacana merujuk pada kajian hubungan konteks sosial dengan pemakaian bahasa. Kalau dalam psikologi sosial, analisis wacana menunjuk pada kajian terhadap struktur dan bentuk percakapan atau wawancara. Sementara itu, dalam ilmu politik, analisis wacana menunjuk pada kajian terhadap praktik pemakaian bahasa dan tali-temalnya dengan kekuasaan. Tampak jelas, analisis wacana bila digunakan dalam bidang kajian apa pun, istilah ini tetap menyertakan telaah bahasa dalam pemakaiannya.

Konsep analisis wacana diterangkan pula oleh Stubs dan Cook. Stubs (Badara, 2014: 18) mengatakan, analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa secara alamiah tersebut berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, Stubs menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar-penutur. Seperti pula yang dikatakan oleh Cook menyatakan bahwa analisis wacana merupakan kajian

yang membahas tentang wacana, sedangkan wacana merupakan bahasa yang digunakan berkomunikasi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa analisis wacana merupakan kajian tentang bahasa dan pemakaiannya. Terdapat beberapa pandangan tentang bahasa dalam analisis wacana. Hikam (dalam Badara, 2014: 19-20) membagi tiga pandangan seperti berikut ini.

Pertama, pandangan positivisme-empiris. Aliran ini memandang bahasa sebagai jembatan antara manusia dan objek di luar dirinya. Salah satu ciri dari pemikiran ini adalah pemisahan antara pemikiran dan realitas. Kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini ialah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya, sebab yang penting menurut aliran ini ialah apakah pernyataan itu dilontarkan menurut kaidah sintaksis dan semantik atau tidak. Oleh karena itu, tata bahasa dan kebenaran sintaksis merupakan bidang utama aliran ini. Jadi, analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata urutan kalimat, bahasa, dan pengertian secara bersama. Titik perhatian pendekatan positivisme terutama didasarkan pada benar tidaknya bahasa itu secara gramatikal. Wacana yang baik ialah wacana yang di dalamnya mengandung kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antarbagian dalam teks yang ditandai oleh penggunaan unsur bahasa.

Adapun koherensi adalah kepaduan hubungan maknawi antara bagian-bagian di dalam sebuah wacana (Badara, 2014: 21).

Kedua, pandangan konstruktivisme. Pandangan ini menolak pandangan positivisme-empirisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Menurut pandangan ini, bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objek belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan, tetapi subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan control terhadap maksud tertentu dalam setiap wacana. Bahasa yang digunakan memiliki tujuan tertentu. Setiap pernyataan pada dasarnya merupakan tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari sang pembicara. Oleh Karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk mengurai maksud dan makna tertentu. Pengungkapan itu dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari pembicara.

Ketiga, pandangan kritis. Pandangan ini mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Pandangan konstruktivisme masih dipandang belum menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana, pada akhirnya dapat membentuk jenis-jenis subjek tertentu dan perilakunya. Analisis wacana dalam pandangan kritis menekankan

pada konstalasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang dapat menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Bahasa dalam pandangan kritis dianggap sebagai representasi yang berperan membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Dengan pandangan tersebut, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam membentuk subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, penulis akan lebih menitikberatkan pada pandangan kritis sesuai dengan penelitian ini yang akan mengkaji tentang analisis wacana kritis berdasarkan praktik-praktik berbahasa pada media dengan sekelumit kekuasaan dan ideologi yang menyertainya.

c. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis merupakan sebuah pandangan tentang kajian wacana yang tidak lagi dipahami semata sebagai sebuah studi bahasa. Analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian formal bahwa bahasa dianalisis pada aspek

kebahasaan, tetapi juga menyertakan konteks tentang bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Oleh karena itu, analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing.

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan pendekatan yang relatif baru dalam mengupas wacana sebagai praksis sosial. Dalam membedah wacana, penafsir tidak boleh lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan wacana, yaitu budaya, politik, ideologi, institusi, dan semua faktor sosial yang melingkupinya.

Jorgensen (2007: 130) mengemukakan bahwa tujuan utama analisis wacana kritis adalah mengeksplorasi hubungan antara penggunaan bahasa dan praktik sosial. Fokus perhatiannya ditujukan pada peran praktik kewacanaan dalam upaya melestarikan tatanan dan perubahan sosial. Setiap peristiwa komunikatif berfungsi sebagai bentuk praktik sosial dalam memproduksi atau menantang tatanan wacana.

Menurut Fairclough dan Wodak (dalam Eriyanto, 2003: 7), analisis wacana kritis melihat wacana –pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan- sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan praktik sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi

menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana kritis dari tulisan Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan Wodak (Eriyanto, 2003: 8).

1) Tindakan

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Orang berbicara atau menulis bukan ditafsirkan sebagai ia menulis atau berbicara untuk dirinya sendiri. Seseorang berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dengan pemahaman semacam ini, ada beberapa konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis memiliki maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami

sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

2) Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dalam hal ini diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Merujuk pada pandangan Cook, analisis wacana juga memeriksa konteks dan komunikasi: siapa yang mengomunikasikan *dengan siapa*, dan *mengapa*; dalam jenis khalayak dan situasi *apa*; melalui medium *apa*, *bagaimana* perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan setiap masing-masing pihak.

Titik tolak analisis wacana tidak dapat dimengerti sebagai mekanisme internal dari linguistic semata. Bahasa dipahami sebagai konteks secara keseluruhan. Cook menyebut ada tiga hal yang sentral dalam pengertian wacana, yaitu: *teks*, *konteks*, dan *wacana*. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang terletak di lembar kertas, melainkan juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, masui, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan memengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Adapun di sini, kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama.

Titik perhatian analisis wacana ialah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Di sini, dibutuhkan tidak hanya proses kognisi dalam arti umum, tetapi juga gambaran spesifik dari budaya yang dibawa. Studi mengenai bahasa di sini memasukkan konteks karena bahasa selalu berada dalam konteks dan tindakan komunikasi tanpa partisipan, interteks, situasi, dan sebagainya.

Wacana tidak dianggap sebagai wilayah yang konstan, terjadi di mana saja dan dalam situasi apa saja. Wacana dibentuk sehingga harus ditafsirkan dalam kondisi dan situasi yang khusus. Wacana kritis mendefinisikan teks dan percakapan pada situasi tertentu: wacana berada dalam situasi sosial tertentu. Meskipun demikian, tidak semua konteks dimasukkan dalam analisis, hanya yang relevan dan berpengaruh atas produksi dan penafsiran teks yang dimasukkan ke dalam analisis.

Beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana. *Pertama*, jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnik, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. *Kedua*, *setting* sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. *Setting*, seperti tempat privat atau publik, dalam suasana formal atau informal, atau pada ruang tertentu akan memberikan wacana tertentu pula. Berbicara di ruang

pengadilan berbeda dengan berbicara di pasar, atau berbicara di rumah berbeda dengan berbicara di ruang kelas. Oleh karena situasi sosial dan aturan yang melingkupnya berbeda, menyebabkan partisipan komunikasi harus menyesuaikan diri dengan konteks yang ada.

3) Histori

Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti suatu teks adalah dengan menempatkan wacana tersebut ke dalam konteks historis tertentu. Misalnya, dilakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa yang menentang Suharto. Pemahaman mengenai wacana teks tersebut hanya dapat diperoleh apabila kita dapat memberikan konteks historis di mana teks tersebut dibuat misalnya, situasi sosial politik dan suasana pada saat itu. Oleh karena itu, pada waktu melakukan analisis diperlukan suatu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang digunakan seperti itu, dan seterusnya.

4) Kekuasaan

Di dalam analisis wacana kritis juga dipertimbangkan elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar, atau pembaca, ia juga bagian

dari anggota kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas atau masyarakat tertentu.

Analitis wacana kritis tidak membatasi diri pada detail teks atau struktur saja, tetapi juga menghubungkannya dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Percakapan antara buruh dan majikan bukanlah percakapan yang alamiah, karena di situ terdapat dominasi kekuasaan majikan terhadap buruh tersebut. Aspek kekuasaan tersebut perlu dikritisi untuk mengamati hal-hal yang tersembunyi. Misalnya yang dikatakan buruh tersebut hanyalah untuk menyenangkan atasannya. Bukan saja pada isi wacana yang digunakan, melainkan bisa juga struktur wacana karena ucapan seseorang buruh dibuat sedemikian rupa agar tidak menyinggung atasan atau agar tampak sopan, hal yang sebaliknya tidak dilakukan oleh majikan pada buruh.

Hubungan antara kekuasaan dan wacana ialah sebagai suatu kontrol. Seseorang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain melalui wacana. Kontrol yang dimaksud dalam konteks ini tidak harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga kontrol secara mental atau psikis. Kelompok yang dominan mungkin membuat kelompok lain bertindak sesuai dengan yang diinginkannya. Kelompok dominan dapat melakukan hal tersebut karena mereka lebih memiliki akses dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan. Kelompok

dominan lebih mempunyai akses seperti pengetahuan, uang, dan pendidikan dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan.

Bentuk kontrol terhadap wacana tersebut dapat bermacam-macam, dapat berupa kontrol atas konteks yang secara mudah dapat dilihat dari yang boleh dan harus berbicara, sementara yang lain hanya bisa mendengar dan mengiyakan. Seseorang sekretaris dalam suatu rapat, karena tidak mempunyai kekuasaan tugasnya hanya mendengar dan menulis, tidak berbicara. Di dalam berita, hal tersebut banyak ditemukan. Pemilik atau politisi yang posisinya kuat dapat menentukan sumber atau bagian yang tidak perlu atau bahkan dilarang untuk diberitakan. Selain konteks, kontrol tersebut juga diwujudkan dalam bentuk kontrol terhadap struktur wacana.

5) Ideologi

Ideologi memiliki pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang menyatakan nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Adapun secara negatif, ideologi dapat dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu sebuah kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial (Jorge Larrain dalam Badara, 2014: 33).

Tindakan yang efektif untuk mendapatkan kekuasaan dengan membujuk orang lain supaya patuh dengan sukarela. Fairclough (1989:

4) mengatakannya sebagai “cara melaksanakan kekuasaan lewat penciptaan persetujuan atau setidaknya menciptakan kerelaan untuk membiarkan kekuasaan itu berjalan.” Agar sebuah kelompok bisa mendapatkan kekuasaan, mereka bisa membujuk orang lain agar percaya bahwa apa yang diinginkan kelompok itu adalah sama dengan yang diinginkan orang lainnya. Maka muncullah ideologi, yaitu sesuatu yang membuat keyakinan-keyakinan yang ingin ditanamkan penguasa kepada warganya menjadi terasa wajar dan masuk akal (Thomas, 1999: 53).

Sebuah teks tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi. Eriyanto menempatkan ideologi sebagai konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini disebabkan oleh teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu (Eriyanto, 2003: 13). Teori-teori klasik mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted*. Wacana dalam pendekatan ini dipandang sebagai medium melalui kelompok dominan mengajak dan menyampaikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki sehingga tampak abash dan benar.

Perkembangan teori komunikasi dan budaya yang kritis pada tahun-tahun terakhir telah membawa perhatian pada ideologi, kesadaran, dan hegemoni. Menurut Sobur (2015: 61), *ideologi* adalah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi: *kesadaran* adalah esensi atau totalitas dari sikap, pendapat, dan perasaan yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok-kelompok; dan *hegemoni* adalah proses ideologi “dominan” disampaikan, kesadaran dibentuk, dan kuasa sosial dijalankan.

Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif jika didasarkan pada kenyataan bahwa anggota komunitas termasuk yang didominasi menganggap hal tersebut sebagai kebenaran dan kewajaran. Menurut Van Dijk, fenomena tersebut disebut sebagai “kesadaran palsu”, cara kelompok dominan memanipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan melalui kampanye disinformasi melalui kontrol media, dan sebagainya.

Van Dijk (dalam Eriyanto, 2003: 13-14) menyatakan bahwa ideologi dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok sehingga bertindak dalam situasi yang sama dan menghubungkan masalah mereka, serta memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok. Dalam perspektif seperti itu, beberapa implikasi yang berkaitan dengan ideologi seperti yang dijelaskan berikut.

Pertama, ideologi secara inheer bersifat sosial, tidak personal atau individual: ia membutuhkan *share* di antara anggota kelompok, organisasi, atau kolektivitas dengan orang lainnya. Hal yang disampaikan tersebut bagi anggota kelompok digunakan untuk membentuk solidaritas dan kesatuan langkah dalam bertindak dan bersikap. Misalnya, kelompok yang mempunyai ideologi feminis, antiras, dan prolingkungan.

Kedua, ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi, tetapi juga membentuk identitas dari kelompok, membedakan dengan kelompok lain. Ideologi bersifat umum, abstrak, dan nilai-nilai yang terbagikan antaranggota kelompok menyediakan dasar cara masalah harus dilihat. Dengan pandangan seperti itu, wacana tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral dan berlangsung secara alamiah karena dalam setiap wacana selalu terkandung ideologi untuk mendominasi dan berebut pengaruh. Oleh karena itu, analisis wacana tidak dapat menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat kondisi terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk wacana. Dalam teks berita, dapat dianalisis teks yang muncul tersebut merupakan pencerminan dari ideologi seseorang, feminis, antifeminis, kapitalis, sosialis, dan sebagainya.

2. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Analisis wacana kritis Norman Fairclough didasarkan pada pernyataan besar, yakni menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakatnya yang makro. Fairclough membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya, sehingga ia mengombinasikan tradisi analisis tekstual, yang memandang bahasa dalam ruang tertutup, dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Titik perhatian besar dari Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Untuk melihat cara pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu, dibutuhkan analisis yang menyeluruh. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada cara bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Fairclough dalam Eriyanto, 2003: 285).

Konsep wacana menurut Fairclough (1989: 22) merupakan bentuk sebagai “praktik sosial” yang memiliki tiga implikasi. Pertama, wacana merupakan bagian dari masyarakat. Wacana tidak bisa berdiri sendiri dengan dipisahkan dari masyarakat. Kedua, pemahaman wacana sebagai praktik sosial memberi implikasi bahwa wacana merupakan proses sosial. Sebagaimana masyarakat berproses dan berkembang, maka wacana (bahasa) juga berproses dan berkembang. Ketiga, wacana berproses sesuai dengan yang dikondisikan dalam masyarakat. Dengan demikian wacana berkaitan erat dengan kondisi sosial, wacana

dipengaruhi oleh kondisi sosial begitu pula wacana memengaruhi kondisi sosial.

Wacana memiliki setidaknya tiga kontribusi sosial yakni *pertama*, wacana memberikan kontribusi dalam mengkonstruksi identitas sosial dan posisi sosial subjek; *kedua*, wacana membantu mengkonstruksi relasi sosial di antara setiap orang dalam suatu ruang sosial; dan *ketiga*, wacana memberi kontribusi dalam membangun sistem, pengetahuan dan sistem kepercayaan. Ketiga kontribusi wacana ini merupakan fungsi bahasa dan dimensi makna bahasa yang dihubungkan dengan identitas, relasional, dan ideasional. Persoalan wacana sebagai praktik sosial, terdapat empat hal yang harus diperhatikan yakni (a) bahasa dan wacana, (b) wacana dan tatanan kewacanaan, (c) kelas dan kekuasaan dalam masyarakat kapitalis, dan (d) struktur dan praktik dialektis (Fairclough, 1995: 19).

Wacana merupakan representasi dari kelompok, institusi, atau subjek yang memproduksinya sebagai wacana. Setiap wacana memiliki subjeknya masing-masing dalam ruang sosial. Kelompok, institusi, atau subjek wacana dalam posisinya sebagai bagian dari praktik sosial, melakukan upaya-upaya saling mempengaruhi dan lebih jauh bahkan saling mendominasi satu sama lain. Setiap subjek wacana, jika hendak bertahan dalam merebut pengaruh, harus memiliki “akar kuat” yang masuk ke dalam isi pikiran publik. Di sinilah wacana diproduksi, didistribusi, lalu dikonsumsi oleh khalayak, lalu menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari khalayak bahkan menjadi anutan khalayak. Pada tataran ini, wacana akan membentuk suatu ideology yang selanjutnya dapat disebut sebagai ideologi kelompok sebagaimana telah disebutkan lebih awal bahwa wacana berkontribusi dalam membentuk identitas sosial. Dengan demikian, wacana juga menjadi representasi kelas, seperti kelas kekuasaan (kelompok dominan; bedakan dengan mayoritas), kelas pendukung kekuasaan, kelas moderat, kelas oposisi, atau kelas marginal atau bawah (Fairclough, 1995: 40).

Dialektika struktur dan praktik sosial, tatanan kewacanaan terkontruksi dari sejumlah wacana dan praktik kewacanaan. Setiap wacana dan praktik kewacanaan, masing-masing memberi pengaruh kepada yang lainnya dan memperoleh pengaruh pula dari wacana lain. proses saling memberi dan menerima pengaruh ini merupakan proses dialektika antara unsur-unsur (struktur) dan praktik sosial. Selain dibentuk oleh struktur sosial, wacana juga berimbaskan balik pada struktur sosial, serta berkontribusi pada pencapaian-pencapaian kesinambungan sosial dan perubahan sosial. Hal ini disebabkan karena antara wacana dan struktur-struktur sosial bersifat dialektis (Fairclough, 1995: 41-42).

Fairclough (1989: 37) menjelaskan mengenai dialektika struktur sosial dan wacana. Fairclough berpendapat bahwa hubungan antara wacana dengan struktur sosial bukanlah hubungan satu arah. Selain ditentukan oleh struktur sosial, wacana juga mempengaruhi struktur sosial sekaligus berkontribusi dalam perubahan struktur sosial itu sendiri.

Dialektika menunjukkan adanya hubungan dua arah, wacana dan struktur sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Wacana penting bagi kekuasaan dan usaha melanggengkan kekuasaannya melalui pengontrolan wacana oleh pihak-pihak di lingkaran kekuasaan dan kekuatan sosial masyarakat yang menjadi faktor penting dalam mempertahankan kekuasaan itu sendiri melalui pembentukan wacana.

Fairclough (dalam Munfarida, 2014: 6) menambahkan bahwa praktik sosial tidak semata-mata sebagai refleksi dari realitas dan bersifat independen, namun selalu berada dalam hubungan yang dialektis dan aktif dengan realitas dan bahkan dapat mentransformasikannya. Begitu pula sebaliknya, realitas dapat mempengaruhi dan membentuk praktik sosial. Implikasinya struktur sosial sebagai bagian dari realitas juga berhubungan secara dialektis dengan diskursus atau praktik sosial. Diskursus memiliki efek terhadap bangunan struktur sosial dan sekaligus memiliki kontribusi bagi terciptanya kontinuitas sosial atau perubahan sosial. Efek ganda ini bermakna bahwa struktur sosial tertentu dapat terus mapan dan terjaga kontinuitasnya melalui penciptaan diskursus tertentu sebagai basis legitimasinya. Sebaliknya, perubahan sosial dapat terjadi ketika muncul diskursus yang mengkritik diskursus yang mapan dan sekaligus mengkritik struktur sosial yang ada.

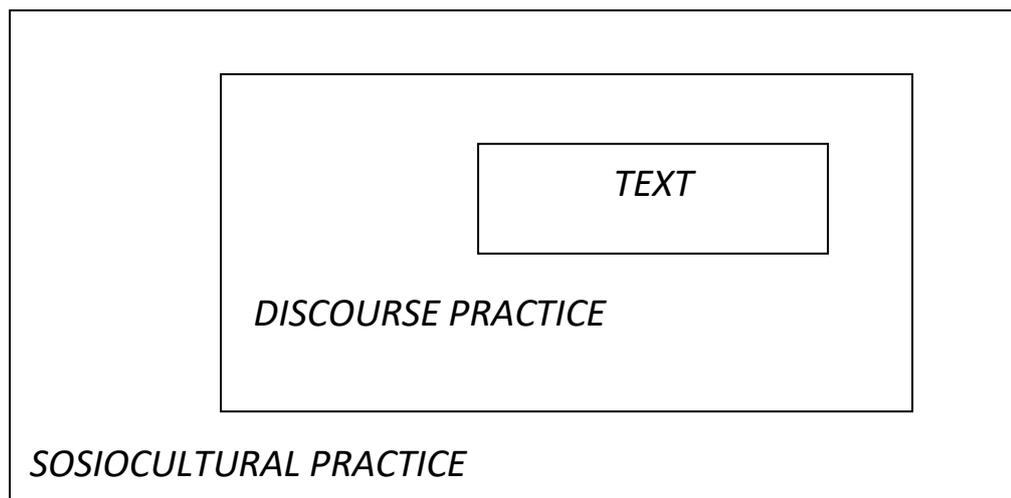
Fairclough (dalam Eriyanto, 2003: 286-288) membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yakni *teks*, *discourse practice*, dan

sociocultural practice. Dalam model Fairclough, teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tatakalimat. Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas. Semua elemen yang dianalisis dipakai untuk melihat tiga masalah. *Pertama*, ideasional yang merujuk pada referensi tertentu, yang ingin ditampilkan dalam teks, umumnya membawa muatan ideologi tertentu. *Kedua*, relasi merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan diantara wartawan dengan pembicara, seperti apakah tekad disampaikan secara informal, terbuka, atau tertutup. *Ketiga*, identitas merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas penulisan dan pembaca serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan.

Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Sebuah teks berita pada dasarnya dihasilkan lewat proses produksi teks yang berbeda, seperti bagaimana pola kerja, bagian kerja, dan rutinitas dalam menghasilkan berita. Teks berita diproduksi dalam cara yang spesifik dengan rutinitas dan pola kerja yang telah terstruktur. Media yang satu mungkin mempunyai pola kerja dan kebiasaan berbeda dibandingkan dengan media lain. Proses konsumsi teks bias jadi juga berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula. Sementara dalam distribusi teks tergantung pada pola dan jenis teks dan bagaimana sifat institusi yang melekat dalam teks tersebut. Pemimpin politik, misalnya, dapat

mendistribusikan teks tersebut dengan mengundang wartawan dan melakukan konferensi pers untuk disebarluaskan kepada khalayak.

Sociocultural practice adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. konteks di sini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks dari praktik institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu. Politik media, ekonomi media, dan budaya media tertentu berpengaruh terhadap berita yang dihasilkan. Ketiga dimensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Sumber: Eriyanto, 2003: 288

a. Teks

Fairclough melihat teks dalam berbagai tingkatan. Sebuah teks tidak hanya menampilkan cara suatu objek digambarkan, tetapi juga cara hubungan antarobjek didefinisikan.

1) Representasi

Representasi pada dasarnya ingin melihat cara seseorang, kelompok, tindakan, dan kegiatan ditampilkan dalam teks. Representasi dalam pengertian Fairclough dilihat dari dua hal, yakni cara seseorang, kelompok, dan gagasan ditampilkan dalam anak kalimat dan gabungan atau rangkaian antaranak kalimat (Eriyanto, 2003: 290).

Pertama, representasi dalam anak kalimat. Menurut Fairclough, ketika sesuatu ditampilkan, pada dasarnya pemakai bahasa dihadapkan pada dua pilihan. (1) Pada tingkat kosakata yang dipakai untuk menampilkan dan menggambarkan sesuatu, yang menunjukkan cara sesuatu dimasukkan dalam satu set kategori. Misalnya, sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai pembunuhan, pertikaian, atau konflik. Orang atau kelompok miskin dapat dibahasakan dengan kata miskin, tidak punya, tidak mampu, kurang beruntung, kelompok terpinggirkan, atau bahkan kelompok tertindas. Semua pilihan kata tersebut menimbulkan asosiasi tertentu pada realitas yang diacu. Dengan pemakaian kata seperti orang miskin, tidak mampu, atau kurang beruntung, persoalan kemiskinan dibatasi hanya pada persoalan mereka miskin karena mereka tidak beruntung, atau mengalami kegagalan usaha. Mereka sendirilah yang menentukan dan menyebabkan kemiskinan. Sebaliknya, dalam kelompok terpinggirkan, kelompok marjinal, atau kelompok tertindas, persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan personal, tetapi berhubungan dengan struktur sosial yang timpang. (2) Pilihan yang

didasarkan pada tingkat *grammar* (tatabahasa). Pertama-tama terutama perbedaan di antara tindakan (dengan aktor sebagai penyebab) dan sebuah peristiwa (tanpa aktor sebagai penyebab). Ini bukan semata persoalan ketatabahasaan karena realitas yang dihadirkan dari pemakaian tatabahasa ini berbeda. Pemakai bahasa dapat memilih seseorang, kelompok, atau kegiatan tertentu hendak ditampilkan sebagai sebuah tindakan (*action*) ataukah sebagai sebuah peristiwa (*event*). Kata “memperkosa” adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi ketika dipilih kata “pemeriksaan” yang tampil bukan sebuah kegiatan atau tindakan, tetapi sebuah peristiwa.

Kedua, representasi dalam kombinasi anak kalimat. Antara satu anak kalimat dengan anak kalimat yang lain dapat digabung sehingga membentuk suatu pengertian yang dapat dimaknai. Gabungan antara anak kalimat ini akan membentuk koherensi lokal, yakni pengertian yang didapat dari gabungan anak kalimat satu dengan yang lain sehingga kalimat itu mempunyai arti. Koherensi ini pada titik tertentu menunjukkan ideologi dari pemakai bahasa. Misalnya, ada fakta seorang wanita mengalami pemeriksaan dan fakta lain menyatakan bahwa wanita itu ternyata seorang janda. Dua fakta itu bisa ditampilkan sebagai saling berhubungan, tetapi dapat juga dibuat terpisah. Kalau dua fakta itu digabung, akan membuat asosiasi kepada khalayak bahwa status janda wanita itu memengaruhi, menjadi faktor wanita itu diperkosa. Sebaliknya,

kalau dua fakta itu dipisah maka akan membuat asosiasi bahwa tidak ada hubungan antara status janda dan peristiwa pemerkosaan tersebut.

Ketiga, representasi dalam rangkaian antarkalimat. Aspek ini berhubungan dengan cara dua kalimat atau lebih disusun atau dirangkai. Representasi ini berhubungan dengan bagian dalam kalimat yang lebih menonjol dengan bagian yang lain. Salah satu aspek penting adalah apakah partisipan dianggap mandiri ataukah ditampilkan memberikan reaksi dalam berita.

2) Relasi

Fairclough (dalam Eriyanto, 2003: 300-301) mengatakan bahwa relasi berhubungan dengan cara partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media dipandang sebagai suatu arena sosial, di mana semua kelompok, golongan, dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan versi pendapat dan gagasannya. Menurut Fairclough, ada tiga kategori partisipan utama dalam media ada tiga kategori partisipan utama dalam media: *wartawan* (memasukkan di antaranya reporter, redaktur, pembaca berita untuk televisi dan radio), *khalayak media*, dan *partisipan publik*, memasukkan di antaranya politisi, pengusaha, tokoh masyarakat, artis, ulama, ilmuan, dan sebagainya. Titik perhatian dari analisis hubungan, bukan pada bagaimana partisipan publik tadi ditampilkan dalam media (representasi), tetapi bagaimana pola hubungan di antara ketiga aktor tadi ditampilkan dalam teks: antara wartawan dengan khalayak, antara

partisipan publik, baik politisi, pengusaha, atau lainnya dengan khalayak, dan antara wartawan dengan partisipan politik tadi. Semua analisis hubungan itu diamati dari teks.

Pengertian tentang cara relasi dikonstruksi dalam media di antara khalayak dan kekuatan sosial yang mendominasi kehidupan ekonomi, politik, dan budaya adalah bagian yang penting dalam memahami pengertian umum relasi antara kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat yang berkembang. Analisis hubungan ini penting dalam dua hal. Pertama, jika dikatakan bahwa media adalah ruang sosial di mana masing-masing kelompok yang ada dalam masyarakat saling mengajukan gagasan dan pendapat, dan berebut mencari pengaruh agar lebih diterima oleh publik, maka analisis hubungan akan memberi informasi yang berharga tentang cara kekuatan-kekuatan sosial ini ditampilkan dalam teks. Kelompok yang mempunyai posisi tinggi umumnya ditempatkan lebih tinggi dalam relasi hubungan dengan wartawan dibandingkan dengan kelompok minoritas.

3) Identitas

Fairclough (Eriyanto, 2013: 303-304) memandang aspek identitas ini terutama dengan cara melihat identitas wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan. Cara tersebut dapat dilihat dalam mengidentifikasi wartawan menampilkan dirinya secara mandiri atau bagian dari kelompok sosial tertentu. Identitas ini akan menentukan isi teks itu akan dibuat, isi pertanyaan yang diajukan kepada narasumber,

dan isi bahan-bahan itu ditulis dalam berita. Identitas itu tidak hanya didlekatkan dan berkaitan dengan wartawan, tetapi juga cara partisipan publik tersebut diidentifikasi dan juga cara khalayak diidentifikasi. Misalnya wawancara mengenai AIDS, antara wartawan dengan dokter dan wartawan dengan penderita jelas berbeda karena diidentifikasi secara berbeda. Identifikasi ini akan menentukan isi wacana yang ingin ditampilkan kepada khalayak.

b. *Discourse Practice*

Analisis *discourse practice* memusatkan perhatian pada cara produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk lewat suatu praktik wacana yang akan menentukan cara teks tersebut diproduksi. Hal yang terjadi dalam media, teks berita melibatkan praktik wacana yang kompleks. Praktik wacana ini yang menentukan cara teks tersebut terbentuk. Dalam pandangan Fairclough (Eriyanto, 2003: 317), ada dua sisi dari praktik wacana, yakni produksi teks (dipihak media) dan konsumsi teks (dipihak khalayak). Jadi, bila terdapat teks media yang merendahkan dan memarjinalkan posisi wanita atau memarjinalkan posisi buruh, harus terlebih dahulu diketahui cara teks tersebut diproduksi dan juga cara teks tersebut dikonsumsi.

Fairclough mengungkapkan bahwa analisis praktik diskursif mau melihat kekuatan pernyataan dalam arti sejauh mana mendorong tindakan atau kekuatan afirmatifnya. Dalam dimensi ini, akan dilihat koherensi teks-teks yang sudah masuk ke wilayah interpretasi. Pada tahap ini

intertekstualitas teks sudah mendapat perhatian khusus (Haryatmoko, 2019: 24).

Produksi teks juga berhubungan dengan struktur organisasi media. Teks yang memarjinalkan seseorang / suatu kelompok bisa jadi lahir dari suatu proses produksi berita yang melibatkan struktur yang timpang. Struktur organisasi ini meliputi bentuk organisasinya, promosi dan jenjang orang-orangnya, proses pengambilan keputusan dibuat, khususnya hal-hal yang berada di luar proses rutinitas media.

Eriyanto (2003: 320) menegaskan bahwa setiap media bisa jadi mempunyai pola dan praktik yang berbeda dalam pengorganisasian dan jenjang pemroduksian berita ini. Di satu surat kabar, mungkin posisi wartawan otonom bukan hanya menulis berita, tetapi juga menentukan peristiwa yang harus ditulis dan diliput. Akan tetapi, ada juga surat kabar yang posisi wartawan tidak dapat menentukan, ia hanya menjalankan hal yang telah ditentukan oleh redaktur.

c. *Sociocultral Practice*

Hubungan antara teks dan struktur sosial dimediasikan oleh konteks sosial wacana. Wacana akan menjadi nyata, beroperasi secara sosial, sebagai bagian dari proses-proses perjuangan institusional dan masyarakat. Analisis wacana kritis tahap ketiga ini berupa tahap menjelaskan relasi fitur-fitur tekstual yang heterogen beserta kompleksitas proses wacana dengan proses perubahan sosiokultural, baik perubahan masyarakat, institusional, dan kultural. Menurut Fairclough (1989: 163),

tujuan tahap eksplanasi ialah menyimpan wacana sebagai bagian proses dan praksis sosial, yang menunjukkan bagaimana wacana itu ditentukan oleh struktur sosial dan reproduktif yang memengaruhi wacana yang secara kumulatif memakai, menopang, atau mengubah struktur-struktur itu.

Fairclough berusaha menghubungkan analisis teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar. Pada tahap analisis, ketiga tahapan itu dilakukan secara bersama-sama. Analisis teks bertujuan untuk mengungkap makna dan itu bisa dilakukan di antaranya dengan menganalisis bahasa secara kritis. Praktik kewacanaan mengantarai teks dengan konteks sosial budaya (praktik sosiokultural). Artinya antara sosiobudaya dengan teks bersifat tidak langsung dan disambungkan oleh praktik kewacanaan. Metodenya mencakup deskripsi bahasa terhadap teks, interpretasi terhadap hubungan antara proses wacana (produksi dan interpretasi) teks dan penjelasan hubungan antara proses wacana dan proses sosial (Haryatmoko, 2019: 24).

Eriyanto (2003: 321-322) menambahkan bahwa *sociocultural practice* ini tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi ia menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Misalnya sebuah teks merendahkan atau memarjinalkan posisi perempuan. Teks semacam ini merepresentasikan ideologi patriarkal yang ada dalam masyarakat. Artinya, ideologi masyarakat yang patriarkal itu berperan dalam membentuk teks yang patriarkal pula. *Sociocultural practice*

menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat memaknai dan menyebarkan ideologi yang dominan kepada masyarakat.

Fairclough (Eriyanto, 2013: 322) membuat tiga level analisis pada *sociocultural practice*, yakni level situasional, institusional, dan sosial. Di bawah ini akan diuraikan tentang ketiga level tersebut.

1) Situasional

Teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas dan unik sehingga satu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Jika wacana dipahami sebagai suatu tindakan, maka tindakan itu sesungguhnya adalah upaya untuk merespon situasi atau konteks sosial tertentu.

2) Institusional

Level institusional melihat pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Faktor institusi yang penting adalah institusi yang berhubungan dengan ekonomi media. Ekonomi media sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul di pemberitaan. Pertama, pengiklan yang menentukan kelangsungan hidup media. Kedua, khalayak pembaca yang dalam dunia industri modern ditentukan dengan data-data seperti oplah dan rating. Tema yang diangkat dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan hal yang 'disukai' oleh khalayak hingga pada akhirnya pemberitaan melakukan dramatisasi isu sehingga menarik minat orang untuk membaca dan melihat berita. Ketiga, persaingan antarmedia

yang pada dasarnya memperebutkan pembaca dan pengiklan. Keempat, intervensi ekonomi lain seperti pemilik modal atau kepemilikan terhadap media. Media menjadi tidak sensitif dengan berita-berita yang berkaitan atau mempunyai hubungan dengan pemilik modal.

Selain ekonomi media, faktor institusi lain yang berpengaruh adalah politik. Pertama, institusi politik yang mempengaruhi kehidupan dan kebijakan yang dilakukan oleh media. Misalnya institusi negara yang bisa menentukan sejauh mana kondisi dan limitasi politis di mana media terbit yang akan berpengaruh terhadap wacana yang diberitakan. Kedua, institusi politik dalam arti media digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat. Media bisa menjadi alat kekuatan-kekuatan dominan yang ada dalam masyarakat untuk memarjinalkan dan merendahkan kelompok lain. Bentuk ekstremnya adalah media partisan yang sengaja dibuat untuk mendukung gagasan atau kekuatan politik tertentu dengan menggunakan media sebagai alatnya (Eriyanto, 2003: 324-325).

Pertimbangan tersebut menentukan peristiwa tertentu akan diberitakan apa adanya ataukah dipotong, bagian mana yang dipotong, dan sebagainya. Produksi berita merupakan proses yang kompleks karena ia menyertakan dan berhubungan dengan banyak kekuatan dan faktor yang ada dalam masyarakat. Hasil akhir dari seluruh elemen ini dapat dideteksi dari cara institusi tersebut melakukan regulasi dan aneka pengaturan yang membatasi proses produksi media. Regulasi dari

berbagai larangan dan kewajiban yang akan menentukan hal yang boleh dan bisa diliput.

3) Sosial

Eriyanto (2003: 325) mengatakan bahwa faktor sosial sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. Bahkan Fairclough menegaskan bahwa wacana yang muncul dalam media ditentukan oleh perubahan masyarakat. Dalam level sosial, misalnya budaya masyarakat, turut menentukan perkembangan dari wacana media. Jika aspek situasional lebih mengarah pada waktu atau suasana mikro (konteks peristiwa saat teks dibuat), aspek sosial lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya secara keseluruhan.

Sistem sosial menentukan siapa yang berkuasa dan nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat. Bagaimana nilai dan kelompok yang berkuasa itu mempengaruhi dan menentukan media. Misalnya, di dalam masyarakat sangat kental ideologi patriarkal yang melihat wanita sebagai kelas dua di bawah laki-laki, nilai-nilai ini akan turut mempengaruhi isi pemberitaan. Teks berita yang dibuat oleh wartawan dari sistem politik otoriter tentu saja berbeda dari wartawan yang dihasilkan oleh sistem politik liberal. Teks berita yang dihasilkan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang ditandai dengan persaingan dan perebutan modal tentu saja akan berbeda dengan teks berita dalam ekonomi sosialisme.

3. Media Massa

Media massa merupakan sarana dalam menyampaikan informasi dan alat komunikasi kepada masyarakat luas. Media massa merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa. Pengertian media massa menurut Sudarman (2008 : 5), media massa merupakan media yang diperuntukkan untuk massa. Dalam ilmu jurnalistik, media massa yang menyiarkan berita atau informasi disebut juga dengan istilah pers.

Fungsi media massa menurut Sudarman (2008 : 7-8) antara lain menginformasikan (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), mempengaruhi (*to influence*), memberikan respon sosial (*to social responsibility*), dan penghubung (*to linkage*). Menginformasikan di sini adalah media massa merupakan tempat untuk menginformasikan peristiwa-peristiwa atau hal-hal penting yang perlu diketahui oleh khalayak. Selanjutnya adalah mendidik yang mana berarti tulisan di media massa dapat mendorong perkembangan intelektual, membentuk watak dan dapat meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang dibutuhkan para pembacanya.

Keberadaan bahasa dalam media massa tidak lagi hanya sebagai alat untuk menggambarkan sebuah realitas, tetapi dapat menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas yang akan muncul di benak khalayak (Badara, 2012: 9). Hal ini juga dinyatakan oleh Sobur (2015: 30) bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Ada

berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Di samping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga berselubung kepentingan yang lain seperti kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan lapangan kerja bagi karyawan dan lainnya. Dalam kondisi dan posisi seperti ini, media massa tidak mungkin berdiri statis di tengah-tengah. Dia akan bergerak dinamis di antara pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain. Kenyataan inilah yang menyebabkan bias berita di media massa sangat sulit untuk dihindari.

Thuchman (dalam Maghvira, 2017: 122) juga menegaskan bahwa media mengikutsertakan perspektif dan cara pandang mereka dalam menafsirkan realitas sosial. Mereka memilihnya untuk menentukan aspek-aspek yang ditonjolkan maupun dihilangkan, menentukan struktur berita yang sesuai dengan kehendak mereka, dari sisi mana peristiwa yang ada disoroti, bagian mana dari peristiwa yang didahulukan atau dilupakan serta bagian mana dari peristiwa yang ditonjolkan atau dihilangkan; siapakah yang diwawancarai untuk menjadi sumber berita, dan lain-lain. Berita bukanlah representasi dari peristiwa semata-mata, akan tetapi di dalamnya memuat juga nilai-nilai lembaga media yang membuatnya.

Terkait dengan media massa sebagai sarana komunikasi massa, selama ini ada dua pandangan, yaitu pandangan positivisme dan pandangan konstruktivisme. Berkaitan dengan fungsi media massa, isi dan sifat berita, cara peristiwa disajikan, dan tugas wartawan, dipahami

secara berbeda oleh kedua pandangan tersebut. Pandangan konstruktivisme memahami tugas dan fungsi media massa berbeda dengan pandangan positivisme. Dalam pandangan positivisme, media massa dipahami sebagai alat penyaluran pesan. Ia sebagai sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator (wartawan, jurnalis) ke khalayak (pendengar, pembaca). Media massa benar-benar sebagai alat yang netral, mempunyai tugas utama penyalur pesan. Tidak ada maksud lain. Kalau media tersebut menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian, memang itulah yang terjadi. Itulah realitas yang sebenarnya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi (Muslich, 2008: 155).

Berdasarkan pandangan konstruktivisme, media massa dipahami sebaliknya. Media massa bukan hanya saluran pesan, tetapi ia juga subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini, media massa dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Pandangan tersebut menolak argumen yang menyatakan bahwa media sebagai tempat saluran bebas. Berita yang kita baca dan kita dengar dari media bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang terkemas dalam pemberitaan. Apa yang kita baca dan kita dengar setiap hari adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen

yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak (Muslich, 2008: 155).

Paradigma kritis berdasarkan pandangan konstruktivisme memiliki pandangan tersendiri tentang berita yang diproduksi oleh media. Fakta yang dihadirkan dalam sebuah berita tidak mutlak adalah sebuah kebenaran yang apa adanya. Menurut Hallin (dalam Eriyanto, 2003: 34), fakta yang ada dalam sebuah berita merupakan fakta yang semu yang dibentuk oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mungkin mengharapkan realitas apa adanya karena sudah tercelup oleh kelompok ekonomi dan politik yang dominan. Berita adalah hasil pertarungan wacana antara berbagai kekuatan dalam masyarakat yang selalu melibatkan pandangan dan ideologi wartawan atau media.

Hall (dalam Eriyanto, 2013: 35-37) mengatakan bahwa realitas yang hadir di depan wartawan sesungguhnya adalah realitas yang telah terdistorsi. Realitas tersebut telah disaring dan disuarakan oleh kelompok yang dominan dalam masyarakat. Realitas pada dasarnya adalah pertarungan antara berbagai kelompok untuk menonjolkan basis penafsiran masing-masing. Media massa itu tidak memproduksi, melainkan menentukan (*to define*) realitas melalui pemaknaan kata-kata yang terpilih. Makna tidaklah secara sederhana dapat dianggap sebagai produksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial (*social struggle*), dan perjuangan dalam memenangkan wacana. Media di sini dipandang sebagai arena perang antarkelas. Perjuangan antarkelompok

ini melahirkan pemaknaan untuk mengunggulkan satu kelompok dan merendahkan kelompok yang lain. Pada akhirnya, kelompok dominanlah yang lebih menguasai pembicaraan dan menentukan arena wacana.

Kesimpulan berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa media memilih kejadian mana yang patut diekspos sebagai bahan berita dan mana yang tidak patut. Media juga memilih orang atau tokoh sebagai sumber berita berdasarkan kriterianya sendiri sehingga hasil pemberitaannya pun cenderung sepihak. Dengan demikian, media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga mendefinisikan peristiwa dan sumber berita. Lewat pemberitaan, media dapat membingkai peristiwa dengan bingkai tertentu. Peristiwa yang telah terbingkai itulah yang didengar dan dibaca khalayak. Khalayak tidak dapat melihatnya dari bingkainya sendiri dan apa yang dibacanya itulah yang menjadi sebuah fakta dan kebenaran di mata publik.

4. Representasi

Representasi adalah suatu wujud kata, gambar, sekuen, cerita dan sebagainya yang mewakili ide, emosi, fakta, dan sebagainya. Representasi tersebut memiliki ketergantungan pada tanda dan juga citra yang ada dan dipahami secara kultur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), representasi dapat diartikan sebagai perbuatan yang mewakili, ataupun keadaan yang bersifat mewakili disebut representasi. Representasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan suatu keadaan yang dapat mewakili simbol, gambar, dan semua hal yang

berkaitan dengan yang memiliki makna. Penggambaran yang dimaksud dalam proses ini dapat berupa deskripsi dari adanya perlawanan yang berusaha dijabarkan melalui penelitian dan analisis semiotika.

Menurut Stuart Hall (1997:15) representasi adalah sebuah produksi konsep makna dalam pikiran melalui bahasa. Ini adalah hubungan antara konsep dan bahasa yang menggambarkan obyek, orang, atau bahkan peristiwa nyata ke dalam obyek, orang, maupun peristiwa fiksi. Representasi dapat dikatakan sebagaimana kita menggunakan Bahasa dalam menggunakan atau menyampaikan sesuatu dengan penuh arti kepada orang lain. Makna dikonstruksi oleh sistem representasi dan makna tersebut diproduksi melalui sistem bahasa yang fenomenanya tidak hanya terjadi melalui ungkapan verbal, namun juga visual. Sistem representasi tidak hanya tersusun bukan seperti konsep individual, melainkan masuk juga melalui konsep perorganisasian, penyusupan serta berbagai kompleks hubungan.

Representasi merujuk pada konstruksi segala bentuk media (terutama media massa) terhadap segala aspek realitas atau kenyataan, seperti masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi adalah tindakan menghadirkan atau menggambarkan sesuatu baik peristiwa, orang, maupun objek lewat sesuatu yang lain di luar dirinya., biasanya berupa simbol atau tanda (Hall, 1997:28). Dapat dikatakan bahwa representasi merupakan perwujudan dalam bentuk bahasa terhadap realitas objek dan peristiwa yang dihadirkan oleh media.

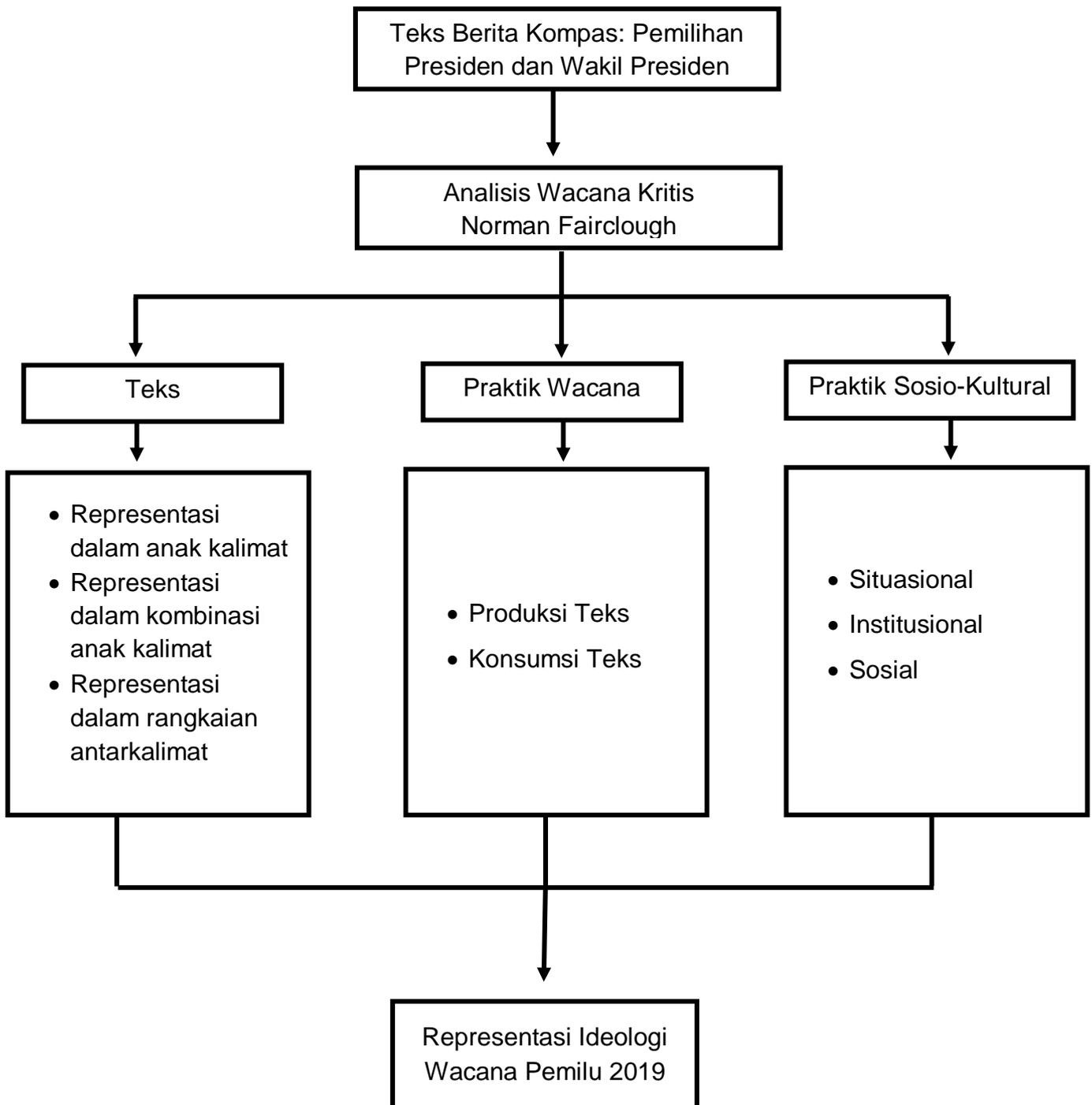
C. Kerangka Pikir

Kompas merupakan media di Indonesia dengan skala nasional yang memiliki jangkauan luas hingga ke semua kalangan masyarakat. Pada musim pemilihan umum (pemilu) 2019, *Kompas* menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami peristiwa dan perkembangan politik di Indonesia khususnya pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2019. *Kompas* turut aktif memberitakan tentang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sedang berkompetisi agar masyarakat dapat menentukan pilihan mereka yang dianggap benar. Dalam menyebarkan berita, media menyisipkan ideologi dan kekuasaannya yang dapat mengonstruksi realitas dan memengaruhi opini masyarakat tentang hal yang diberitakan termasuk pemilu 2019.

Analisis wacana kritis merupakan kajian mendalam yang berusaha mengungkap kegiatan, ideologi, kekuasaan, marginalisasi dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan dalam wacana. Melalui pandangan analisis wacana kritis wacana tidak hanya dilihat dari pesan yang disampaikan, tetapi berusaha membongkar maksud terselubung yang terdapat di dalamnya. Analisis wacana kritis menganalisis bahasa tidak saja dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks.

Salah satu teori dalam analisis wacana kritis yang banyak digunakan ialah teori yang diperkenalkan oleh Norman Fairclough.

Konsep Fairclough menganalisis teks berita yang merepresentasikan ideologi media dan diungkap melalui representasi kosa kata dan tatabahasa, representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan representasi dalam rangkaian antarkalimat. Penelitian ini akan menggunakan analisis wacana kritis perspektif Fairclough yang mengungkap ideologi dalam wacana berita *Kompas* tentang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Analisis bahasa media tersebut dapat dilihat pada segi teks yang terdiri atas (1) representasi dalam anak kalimat, (2) representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan (3) representasi dalam rangkaian antarkalimat. Selanjutnya pada segi *discourse practice* (praktik wacana) yang melihat (1) produksi teks dan (2) konsumsi teks. Pada bagian ketiga dari segi *sociocultural practice* (praktik sosiokultural) yang terdiri atas (1) situasional, (2) institusional, dan (3) sosial.

BAGAN KERANGKA PIKIR

D. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk penyamaan persepsi terhadap penelitian ini maka berikut adalah batasan istilah:

1. Wacana pemilu merupakan kesatuan makna baik dalam bentuk tulisan maupun tuturan yang memuat informasi tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
2. Analisis wacana kritis, yaitu sebuah kajian tentang bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Sebuah upaya yang dilakukan untuk mengungkapkan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan.
3. Ideologi adalah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi (teks, percakapan, dan lainnya). Ideologi yakni “cara melaksanakan kekuasaan lewat penciptaan persetujuan atau setidaknya menciptakan kerelaan untuk membiarkan kekuasaan itu berjalan.” Agar sebuah kelompok bisa mendapatkan kekuasaan, mereka bisa membujuk orang lain agar percaya bahwa apa yang diinginkan kelompok itu adalah sama dengan yang diinginkan orang lainnya.
4. Representasi ideologi adalah perwujudan atau implementasi ideologi yang dimiliki oleh media massa dalam hal ini berupa keberpihakan terhadap salah satu pihak yang dimuat dalam berita.
5. Media massa merupakan institusi yang berperan sebagai alat komunikasi yang menyebarkan informasi massal kepada masyarakat.

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, media mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik.

6. Dimensi Teks, yaitu semua yang mengacu ke wicara, tulisan, grafik, dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks (khasanah kata, gramatika, sintaksis, struktur metafora, dan retorika. Bagian ini akan melihat cara seseorang, kelompok, tindakan, dan kegiatan ditampilkan dalam teks. Dimensi teks terdiri atas representasi kosa kata dan tatabahasa, representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan representasi dalam rangkaian antarkalimat.
7. *Discourse practice* yaitu semua bentuk produksi dan konsumsi teks. Dalam dimensi ini, ada proses menghuungkan produksi dan konsumsi teks atau sudah ada interpretasi. Fokusnya diarahkan pada cara pengarang teks mengambil wacana dan *genre* yang ada dengan memerhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan.
8. *Sociocultural practice* yaitu tertanam dalam tujuan, jaringan, dan praksis budaya sosial yang luas. Dalam dimensi ini, sudah mulai masuk pemahaman intertekstual, peristiwa sosial telah terlihat bahwa teks dibentuk oleh dan membentuk praksis sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok. Menurut Nazir (1988: 63), penelitian kualitatif adalah metode penelitian suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Sementara penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa dan gejala (Sugiyono, 2016: 336).

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa sebagai bentuk dari praktik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti melalui penggunaan kosakata dan gramatika untuk menggambarkan sifat-sifat suatu hal (individu atau kelompok), keadaan, fenomena, dan tidak terbatas pada pengumpulan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang dimiliki (Moleong, 2013: 49).

B. Sumber Data

Data adalah semua informasi atau bahan mentah yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan masalah yang diteliti (Subroto,

1992: 34). Data dalam penelitian kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati (Taylor, 1984). Sumber data dalam penelitian ini adalah berita yang dipublikasikan oleh *Kompas.com* selama musim pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019.

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kosakata, frasa, dan kalimat dalam teks berita media *Kompas* yang dipublikasikan melalui *Kompas.com* tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku referensi terkait media *Kompas* untuk mengetahui representasi ideologi yang ada dalam berita pemilu presiden dan wakil presiden 2019.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2009: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berita yang ditulis oleh *Kompas.com* tentang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2009: 116). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam upaya menjangkau semua data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mendokumentasikan teks-teks berita tentang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 pada *Kompas.com*. Teks berita yang didapatkan sebagai sampel akan diklasifikasi berdasarkan topik berita dan dianalisis berdasarkan teori yang digunakan.

2. Teknik Observasi Teks

Observasi merupakan teknik untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. Melalui observasi dapat dilihat dan dapat dites kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas. Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan

membaca intensif data penelitian, yaitu penggunaan kosakata dan gramatika pada berita yang dipublikasikan oleh *Kompas Gramedia*.

3. Teknik Catat

Hasil pengamatan terhadap data penting dalam berita dicatat dalam format yang telah disiapkan. Objek penelitian adalah bahasa tertulis, maka akan dicatat kalimat atau paragraf teks berita yang dibutuhkan berdasarkan pilihan variabel penelitian teori yang digunakan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan kajian analisis wacana kritis. Analisis data yang digunakan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penggunaan bahasa baik dalam bentuk teks maupun tuturan tentang berita yang dipublikasikan oleh *Kompas* tentang pemilihan umum presiden dan calon presiden 2019.
2. Melakukan pengklasifikasian terhadap keseluruhan data penelitian yang telah terkumpul. Klasifikasi tersebut berdasarkan penguatan dan pelemahan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 yang dipaparkan lewat kosakata dan gramatika bahasa media.
3. Setelah diidentifikasi dan diklasifikasikan, data dideskripsikan serta dianalisis berdasarkan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Pertama, analisis teks berita *Kompas* meliputi penggunaan

kosakata, tatabahasa, dan rangkaian kalimat. Kedua, analisis praktik wacana melalui cara produksi dan konsumsi teks berita. Ketiga, analisis praktik sosio-kultural dengan melihat bagian situasional, institusional, dan sosial.

4. Meyimpulkan hasil analisis data yang dilakukan sebelumnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dimensi Teks

Analisis wacana kritis Norman Fairclough terlebih dahulu melakukan pengkajian pada dimensi teks dengan memperhatikan bentuk linguistik teks. Dalam hal ini Fairclough menjabarkan ke dalam 3 bentuk analisis, yakni representasi dalam anak kalimat (kosakata dan tatabahasa), representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan representasi dalam rangkaian anak kalimat.

Analisis dimensi teks tentang berita pemilihan presiden dan wakil presiden diklasifikasikan ke dalam beberapa topik berita. Klasifikasi topik berita tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

a. Topik 1: Program Kartu Baru Pasangan Calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin

1) Berita 1 : *Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Penonjolan Subjek	Menguatkan posisi subjek	a) " Joko Widodo memperkenalkan kartu baru."

		<p>b) “Jokowi mengatakan, KIP dibuat untuk menjamin anak Indonesia bisa terus bersekolah tanpa hambatan ekonomi”</p> <p>c) “Jokowi ingin jaminan pendidikan itu bisa dilanjutkan hingga kuliah.”</p>
Penggunaan verba	Menampilkan peristiwa sebagai tindakan	<p>a) “Jokowi mengatakan, KIP dibuat untuk menjamin anak Indonesia.”</p> <p>b) “Jokowi mengatakan, sudah ada 18,7 juta siswa yang mendapatkan manfaat KIP.”</p> <p>c) “Kartu ini akan membantu para pencari kerja meningkatkan keterampilan mereka.”</p>

Penggunaan kosakata dan tatabahasa pada berita tersebut terdiri atas penonjolan pelaku dengan menyebutkan secara terang subjek pada setiap kalimatnya. Pemunculan subjek dalam kalimat mengindikasikan bahwa pihak wartawan ingin menonjolkan tokoh yang menjadi subjek tersebut melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya baik positif maupun negative. Dalam hal ini, wartawan menjadikan subjek “Joko Widodo” sangat menonjol dalam tindakannya yang juga

positif sehingga subjek dibuat unggul pada program yang direncanakan.

Selain itu, tatabahasa yang digunakan dalam berita tersebut banyak menggunakan verba tanpa adanya proses nominalisasi sehingga peristiwa yang ada dalam berita ditampilkan berupa tindakan. Dengan adanya verba tersebut semakin memperkuat hal yang telah dilakukan oleh subjeknya yaitu Joko Widodo dan program kartu yang dicanangkannya.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelas	Menguatkan pernyataan kalimat pertama dengan adanya kalimat kedua.	<p>a) "KIS menjamin kesehatan masyarakat dan memastikan mereka tidak jatuh miskin ketika ada anggota keluarga yang sakit. "Tetapi semua hal itu tidak cukup, saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat," kata Jokowi.</p> <p>b) "Maka Program Keluarga</p>

		<p>Harapan (PKH) akan saya perkuat dengan program Kartu Sembako Murah," tambah dia sambil menunjukkan kartunya.</p> <p>Relawan yang hadir langsung bertepuk tangan dan bersorak.</p> <p>c) Jokowi mengatakan, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, sebenarnya lapangan kerja yang tercipta semakin banyak. Namun, masyarakat juga harus semakin meningkatkan keterampilan mereka.</p> <p>Untuk mendukung itu, kata Jokowi, pemerintah sudah punya berbagai program vokasi.</p>
--	--	---

Koherensi antara kalimat-kalimat dalam sebuah mengandung maksud tertentu dan tujuan tertentu. Untuk mendukung suatu peristiwa atau keadaan, wartawan akan menampilkan koherensi penjelas dengan maksud untuk menguatkan makna kalimat yang satu dengan menampilkan kalimat berikutnya. Dapat dilihat pada kutipan berita tersebut, poin (a) digunakan anak kalimat “tetapi semua hal itu tidak cukup” untuk menguatkan ambisi Jokowi dengan lebih menyejahterahkan rakyat. Pada poin (b) kalimat “Relawan yang hadir langsung bertepuk tangan dan bersorak” dapat memberikan efek dukungan terhadap program yang akan dilakukan Jokowi. Selanjutnya, pada poin (c) memperlihatkan keadaan yang tidak seperti harapan dengan memberikan konjungsi “Namun,” dan dilanjutkan dengan memberikan anak kalimat “Untuk mendukung itu,” sebagai solusi terhadap hal yang tidak sesuai harapan pada kalimat sebelumnya.

Kombinasi kalimat yang dituliskan dalam berita tersebut menggambarkan keunggulan yang terdapat dalam program Joko Widodo tanpa menampilkan kelemahan dalam program tersebut.

c) Representasi dalam Rangkaian Antarkalimat

Saling mendukung	"Maka Program Keluarga Harapan (PKH) akan saya perkuat dengan program Kartu Sembako Murah," tambah dia sambil menunjukan kartunya. Relawan yang hadir
------------------	---

	langsung bertepuk tangan dan bersorak.
Saling mendukung	Jokowi mengatakan, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, sebenarnya lapangan kerja yang tercipta semakin banyak. Namun, masyarakat juga harus semakin meningkatkan keterampilan mereka. Untuk mendukung itu, kata Jokowi, pemerintah sudah punya berbagai program vokasi. Program vokasi itu akan diperkuat dengan program baru yaitu Kartu Pra-kerja. Kartu ini akan membantu para pencari kerja meningkatkan keterampilan mereka. "Saya akan meluncurkan kartu pra-kerja untuk memberikan layanan pelatihan vokasi. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan," ujar Jokowi.

Jika dilihat dari rangkaian antara kalimat yang dikombinasikan, narasumber sangat berguna untuk membenarkan teks yang dibentuk oleh wartawan. Pada kutipan teks berita di atas, tampak bahwa pernyataan yang dituliskan oleh wartawan didukung dan diperkuat oleh pernyataan Jokowi sebagai narasumber dari berita tersebut. Penulis berita tidak menampilkan pernyataan dari narasumber lain yang

memiliki pendapat yang berseberangan. Dengan demikian, pemaparan tentang program yang dicanangkan oleh Joko Widodo semakin diperkuat lagi oleh pernyataan narasumber yang ditampilkan wartawan yakni Joko Widodo itu sendiri.

2) Berita 2 : 3 *Kartu Baru Jokowi Dinilai untuk Tangkal Serangan Kubu Prabowo*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Pemilihan diksi	Memberi kesan negatif	a) Ujang menilai, Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah mulai berani menjanjikan program-program yang konkret kepada masyarakat. b) Kubu Prabowo-Sandi lebih banyak membangun narasi negatif dan sporadis dari isu lama. c) Kubu Prabowo-Sandiaga dinilainya belum mampu membuat program pamungkas seperti milik Jokowi-Ma'ruf.

Pemilihan kata (diksi) dalam sebuah berita menjadi hal yang penting untuk memberikan pemaknaan yang berbeda. Pada berita di atas dapat dilihat bahwa penggunaan diksi seperti kata “konkret” yang ditujukan untuk program Calon Presiden Joko Widodo dapat memberikan makna nyata, realistis, dan dapat diterapkan. Selanjutnya, kata “pamungkas” untuk program Calon Presiden Joko Widodo diartikan sebagai senjata (program) mematikan. Ini berarti dengan adanya program tersebut telah mengalahkan bahkan mematikan program yang ditawarkan oleh lawan.

Sementara itu, diksi “narasi negatif” dan “sporadis” yang dapat memberikan arti hanya sebuah cerita yang belum ada tindakan dan tidak dapat diterapkan disegala kondisi.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Perpanjangan Kontras	Mengunggulkan pernyataan pertama dengan melemahkan pernyataan selanjutnya.	a) “Ujang menilai, Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah mulai berani menjanjikan program-program yang konkret kepada masyarakat. Sementara, kubu Prabowo-Sandiaga

		dinilainya belum mampu membuat program pamungkas seperti milik Jokowi-Ma'ruf.
Penyebab	Menguatkan pernyataan pertama dengan menyertakan alasan	a) Menurut dia, kubu Prabowo-Sandi lebih banyak membangun narasi negatif dan sporadis dari isu lama. " Karena narasi yang dikembangkan adalah program yang tidak ada maka serangan itu mudah dipatahkan oleh 01," ujar Direktur Eksekutif <i>Indonesian Political Review</i> ini.

Koherensi penjelasan kontras merupakan koherensi yang mempertentangkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyangkal ataupun membandingkan pernyataan yang satu dengan pernyataan lainnya. Seperti pada kutipan berita di atas, wartawan membuatnya dengan koherensi penjelasan kontras yang dibangun dengan menampilkan penjelasan yang kontradiktif

antara calon pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Calon pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Pernyataan kontradiktif dapat dilihat pada perbandingan program kedua pasangan calon menggunakan kata hubung “sementara”. Dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa program yang ditawarkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih baik dari program yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

Awal	<p>Pengamat politik dari dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, calon presiden petahana Joko Widodo mempunyai alasan khusus dalam memperkenalkan tiga kartu sakti barunya di masa kampanye Pemilihan Presiden 2019.</p> <p>Menurut dia, tiga kartu baru itu yakni Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah, bukan semata-mata untuk melengkapi kartu-kartu dan program yang sudah ada. Lebih dari itu, pengenalan tiga kartu tersebut dinilainya untuk menjawab kritik hingga serangan yang kerap disampaikan kubu Prabowo Subianto.</p>
-------------	---

	"Ini jurus pamungkas yang digunakan paslon 01 untuk membantah semua narasi kubu 02 soal pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pangan," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).
Akhir	Menurut dia, kubu Prabowo-Sandi lebih banyak membangun narasi negatif dan sporadis dari isu lama. "Karena narasi yang dikembangkan adalah program yang tidak ada maka serangan itu mudah dipatahkan oleh 01," ujar Direktur Eksekutif <i>Indonesian Political Review</i> ini. .

Pada awal berita dinyatakan bahwa program Joko Widodo memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat mengatasi kritikan dari kubu Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut dijelaskan dengan beberapa paragraf. Selanjutnya, berita diakhiri dengan menonjolkan kelemahan yang ada pada kubu Prabowo Subianto sehingga berita di atas mengunggulkan program Joko Widodo dan memberikan kritik terhadap kubu Prabowo Subianto.

3) Berita 3: *Fadli Zon Sebut 3 Program Kartu Jokowi sebagai "Jurus Mabuk"*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Pemilihan diksi	Memberi kesan negatif	<p>a) Ini menurut saya adalah jurus mabuk gitu ya. Jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).</p> <p>b) Fadli mengatakan, Jokowi tengah panik sehingga menggunakan segala cara untuk menang. Termasuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam kapasitasnya sebagai presiden.</p>

Penggunaan diksi “jurus mabuk” pada poin (a) dapat memberikan arti negatif terhadap program yang dikeluarkan oleh Joko Widodo. Hal itu mengartikan bahwa program yang ditawarkan Joko Widodo tidak masuk akal karena dibuat dalam keadaan “mabuk” atau tidak sadarkan diri. Diksi tersebut memiliki makna yang sangat

melemahkan dibanding dengan langsung menggunakan kata tidak baik atau tidak masuk akal.

Pernyataan pada poin (a) diperkuat dengan memaparkan alasan bahwa keadaan calon presiden Joko Widodo tengah “panik” dan menggunakan “segala cara” untuk menang pada poin (b). Pernyataan tersebut menjadi alasan lahirnya “jurus mabuk” atau ketidaklogisan program Joko Widodo.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penyebab	Menguatkan pernyataan dengan menyertakan alasan	a) "Ini menurut saya adalah jurus mabuk gitu ya. Jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini," ujar Fadli
Penjelas	Menguatkan pernyataan pertama dengan memberikan penjelasan tambahan pada	a) Fadli menganggap, program kartu-kartu yang ada sebelumnya banyak yang gagal. Fadli juga menyoroti pemberian tunjangan hari raya (THR) yang dipercepat

	pernyataan berikutnya	oleh Jokowi. b) Menurut dia, ini juga bagian dari jurus mabuk itu. Fadli mengatakan, Jokowi tengah panik sehingga menggunakan segala cara untuk menang. Termasuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam kapasitasnya sebagai presiden.
--	--------------------------	---

Koherensi penyebab yang dibangun pada berita di atas digunakan untuk menguatkan pernyataan Fadli Zon dengan memberikan alasan elektabilitas Jokowi telah jatuh. Selain itu, pernyataan Fadli Zon semakin diperkuat dengan adanya koherensi penjas yang memaparkan dengan beberapa kalimat tentang kelemahan-kelemahan program calon presiden Joko Widodo.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

Saling Mendukung	a) Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir program-program baru yang dicetuskan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Menurut dia, cara ini
-------------------------	--

	<p>dipakai karena elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak kunjung mengalami kenaikan jelang Pemilu 2019. "Ini menurut saya adalah jurus mabuk gitu ya. Jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).</p> <p>b) Fadli menganggap, program kartu-kartu yang ada sebelumnya banyak yang gagal. Fadli juga menyoroti pemberian tunjangan hari raya (THR) yang dipercepat oleh Jokowi. Menurut dia, ini juga bagian dari jurus mabuk itu. Fadli mengatakan, Jokowi tengah panik sehingga menggunakan segala cara untuk menang. Termasuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam kapasitasnya sebagai presiden.</p>
--	--

Pemaparan peristiwa pada berita di atas terlihat saling mendukungnya setiap kalimat dan pendapat dari narasumber. Berita tersebut hanya memaparkan satu narasumber yang memiliki pendapat

yang saling mendukung terhadap pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya.

4) Berita 4: *BPN Prabowo Nilai Kartu Pra Kerja Jokowi Tak Bagus, Bikin Ketergantungan*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Penggunaan verba aktif	Subjek ditempatkan sebagai unsur yang melakukan tindakan.	Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik program Kartu Pra Kerja capres petahana Joko Widodo.
Pemilihan diksi	Menggunakan suatu kata dengan makna negatif	Ledia Hanifa menilai program tersebut bisa membuat ketergantungan karena pemegang kartu tetap digaji meskipun belum mendapat pekerjaan.

Penggunaan verba aktif “mengkritik” pada berita tersebut menampilkan subjek yang melakukan tindakan (kritikan) yakni pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selain itu, juga

ditampilkan objek dari kalimatnya yakni yang menjadi kritikan adalah program Joko Widodo. Hal tersebut menjelaskan tentang pelemahan posisi Joko Widodo yang dilakukan oleh lawannya Prabowo Subianto. Penggunaan diksi “ketergantungan” tersebut mengindikasikan bahwa program yang dicanangkan oleh Joko Widodo bukan merupakan program yang baik karena memiliki efek negatif.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penyebab	Menguatkan pernyataan satu dengan menyertakan alasan.	Ledia Hanifa menilai program tersebut bisa membuat ketergantungan karena pemegang kartu tetap digaji meskipun belum mendapat pekerjaan.
Penjelasan Kontras	Melemahkan satu pernyataan dengan memberikan pernyataan lain yang lebih baik.	a) Enggak bagus juga. Seharusnya lebih dilatih lebih baik supaya mereka bisa berkembang. b) Sebetulnya enggak usah ada kartu itu. Yang paling penting bagaimana

		menyiapkan anak-anaknya.
--	--	--------------------------

Koherensi penyebab yang dibangun dalam berita tersebut digunakan untuk menguatkan pernyataan Prabowo dengan menyertakan alasan negative terhadap program Joko Widodo. Selanjutnya, terdapat pula koherensi penjelasan kontras yang bersifat kontradiksi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan lain. Penjelasan kontras tersebut digunakan untuk melemahkan pernyataan tentang program yang disampaikan oleh Joko Widodo

5) Berita 5: *BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Pemilihan diksi	Menggunakan pilihan kata yang dapat membuat makna negatif ataupun sebaliknya.	a) Menurut Priyo, program tiga kartu Jokowi-Ma'ruf berpotensi menjadi beban anggaran negara b) Penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan

		<p>negara.</p> <p>c) Sandiaga optimistis dapat memanfaatkan sistem teknologi <i>Single Identification Number</i> yang terdapat dalam e-KTP.</p>
Kata ganti	Penggunaan kata ganti yang dapat mewakili seluruh masyarakat.	<p>a) Kita punya programmer-programmer canggih. Kita punya anak-anak muda yang memiliki kemampuan khusus untuk teknologi digital ini.</p> <p>b) Bagi kami, kita sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk KTP elektronik dan ada chip teknologi, revolusi industri 4.0, ada digital ekonomi di belakang KTP kita.</p>

Penggunaan diksi “beban” dalam berita tersebut menunjukkan ketidaksetujuan dan pemberian makna negatif terhadap program Joko Widodo. Dengan diksi tersebut menyatakan bahwa program Joko Widodo merupakan program yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Selain itu, diksi “optimis” yang ditunjukkan oleh Sandiaga

Uno mengindikasikan keyakinan yang kuat tentang program yang akan dilakukan oleh lawan dari calon presiden Joko Widodo.

Selain itu, penggunaan kata ganti “kita” dalam berita tersebut memiliki makna yang lebih luas dibanding hanya menggunakan kata ganti “saya” atau “kami”. Kata ganti “kita” berarti mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia tentang ketidaksetujuan program Joko Widodo dan keyakinan terhadap program Prabowo-Sandiaga Uno

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penyebab	Menguatkan pernyataan dengan menyertakan alasan.	Menurut Priyo, program tiga kartu Jokowi-Ma'ruf berpotensi menjadi beban anggaran negara "Itu adalah alternatif, karena pembikinan kartu-kartu pasti membebani anggaran negara.
Penjelasan Kontras	Melemahkan pernyataan satu dengan memberikan perbandingan.	a) Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon

		<p>presiden Joko Widodo. Ketiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja. Namun program tersebut mendapat kritik dari rival debatnya Sandiaga Uno.</p> <p>b) Meski konsep <i>single identity number</i> belum sepenuhnya sempurna, Sandiaga yakin hal itu akan dapat diatasi. Ia mengatakan, Indonesia memiliki banyak anak-anak muda yang mampu berinovasi dalam bidang teknologi.</p>
--	--	--

Koherensi yang dibangun dalam berita di atas terdapat koherensi penyebab yang digunakan untuk menguatkan sebuah pernyataan dengan menyertakan alasan ditandai dengan pemakaian konjungsi “karena”. Narasumber yang ditampilkan menyertakan

alasan ketidaksetujuan terhadap program tiga kartu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Koherensi yang dibangun selanjutnya ialah perpanjangan kontras, yakni menguatkan satu pernyataan dengan melemahkan pernyataan selanjutnya, begitupun sebaliknya. Dalam berita tersebut pada poin (a), dipaparkan tentang program tiga kartu Joko Widodo-Ma'ruf Amin kemudian diberi konjungsi “namun” pada kalimat berikutnya yang berarti penentang dan dapat melemahkan pernyataan tersebut. Sementara pernyataan pada poin (b) dipaparkan kelemahan pada program Sandiaga dengan menggunakan konjungsi “meski”, dilanjutkan dengan pertentangan pernyataan tersebut dengan menampilkan penguatan pada pernyataan selanjutnya.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

Saling Menentang	Pada saat debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019), calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo. Ketiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja. Namun program tersebut mendapat kritik dari rival debatnya Sandiaga Uno. Ia menilai, penggunaan banyak kartu untuk
-------------------------	--

	<p>mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, Sandiaga enggan mengeluarkan program berbasis kartu apabila terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.</p>
--	--

Berita tersebut ditampilkan dengan pertentangan antara program tiga kartu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan kritikan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno beserta pendukungnya. Berita tersebut lebih menonjolkan kritikan-kritikan yang dilayangkan oleh Sandiaga Uno beserta pendukungnya sebagai penentang terhadap program tiga kartu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

6) Berita 6: *Jokowi: Tidak Setuju? Orang Ini Program Bagus Kok..*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Pemilihan diksi	Memberi tanggapan dan alasan yang	a) Calon presiden petahana Joko Widodo heran mengapa ada pihak yang tidak setuju terhadap program tiga kartu barunya.

	persuasif	<p>b) KIP Kuliah ini menyempurnakan KIP yang selama 4,5 tahun terakhir telah dibagikan kepada 13 juta penerima tingkat SD, SMP dan SMA.</p> <p>c) Ia juga memastikan, pemegang kartu itu akan mendapatkan insentif selama maksimal 1 tahun apabila belum mendapatkan pekerjaan.</p>
--	-----------	---

Berita di atas menyatakan tentang keunggulan yang dimiliki oleh program Joko Widodo. Penggunaan diksi “heran” pada poin (a) mengandung makna ketidakpercayaan yang kuat sebagai jawaban Joko Widodo atas kritikan yang ditujukan terhadap programnya. Joko Widodo ditampilkan dapat menjawab segala kritikan yang ditujukan kepadanya dengan menggunakan diksi “menyempurnakan” dan “memastikan” yang mengandung arti bahwa program Joko Widodo merupakan program yang lengkap dan nyata.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk	Tujuan	Kutipan Berita
Koherensi		

Penjelasan Rinci	Memperinci pernyataan yang dituliskan sebelumnya	a) .Tiga kartu program baru Jokowi itu, yaitu Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Prakerja. Jokowi menjelaskan , melalui KIP Kuliah, anak miskin yang berniat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
Penjelas	Menguatkan pernyataan dengan melakukan penekanan	Ada yang tidak setuju? Kalau ada, maju ke depan sini , saya berikan sepeda," ujar Jokowi disambut tepuk tangan dan keriuhan, orang ini program bagus, kok tidak setuju, "

Koherensi dalam berita di atas dibangun dengan koherensi penjelas dengan tujuan dapat menguatkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Joko Widodo. Pada koherensi penjelasan rinci, kalimat-kalimat yang dibuat secara rinci menjelaskan tentang pernyataan Joko Widodo tentang program tiga kartu miliknya.

Sementara pada koherensi penjelas selanjutnya ditampilkan pernyataan yang menguatkan dengan menyimpulkan “orang ini program bagus, kok tidak setuju.”

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

<p>Saling Mendukung</p>	<p>Calon presiden petahana Joko Widodo heran mengapa ada pihak yang tidak setuju terhadap program tiga kartu barunya. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam acara kampanye terbuka perdana di Stadion Yusuf Maulana, Kota Serang, Banten, Minggu (24/3/2019) sore.</p> <p>"Ada yang tidak setuju? Kalau ada, maju ke depan sini, saya berikan sepeda," ujar Jokowi disambut tepuk tangan dan keriuhan. orang ini program bagus, kok tidak setuju," lanjut dia.</p>
--------------------------------	---

Rangkaian kalimat dan paragraf pada berita di atas ditampilkan dengan mendukung pernyataan Joko Widodo tentang program tiga kartu miliknya. Kalimat-kalimat dibuat saling mendukung untuk menguatkan posisi program yang dimiliki Joko Widodo.

7) Berita 7: *Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Penggunaan verba aktif	Menguatkan pernyataan dengan menempatkan subjek sebagai unsur yang melakukan tindakan.	<p>a) Korban PHK akan mendapat pelatihan untuk memasuki industri serta mendapat uang saku dalam jangka waktu tertentu</p> <p>b) Kartu Indonesia Pintar Kuliah memungkinkan anak-anak Indonesia dari keluarga tidak mampu bisa menempuh ilmu di perguruan tinggi.</p> <p>c) Adapun Kartu Sembako akan membuat warga mendapat diskon saat membeli kebutuhan pokok.</p>
Pemilihan diksi	Menggunakan suatu kata dengan makna yang lebih mendalam	<p>a) Jadi ketiga kartu ini kita keluarkan berdasarkan survei. Jadi bukan awur-awuran.</p> <p>b) Saya berikan tiga senjata ini untuk menjelaskan ke masyarakat apa yang akan kita kerjakan ke depan</p>

	dan ampuh.	
--	------------	--

Penggunaan tatabahasa dalam berita di atas ditampilkan dengan banyak menggunakan verba aktif. Hal tersebut digunakan untuk menampilkan peristiwa sebagai sebuah tindakan bukan dalam bentuk keadaan. Verba aktif “akan mendapat”, “bias menempuh”, dan “akan membuat” menempatkan posisi Joko Widodo sebagai sebagai subjek yang melakukan tindakan positif kepada masyarakat.

Selanjutnya, diksi “awur-awuran” digunakan untuk memastikan program Joko Widodo memiliki dasar dan bukan program yang asal. Selain itu, program Joko Widodo ditampilkan dengan diksi “senjata” yang bias digunakan sebagai alat untuk kesejahteraan masyarakat.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penyebab	Menguatkan pernyataan satu dengan menyertakan alasan.	Menurut dia, berdasarkan hasil survei, kebutuhan utama rakyat berturut-turut ialah harga sembako, pekerjaan, dan pendidikan. Oleh karena itu , Jokowi meluncurkan tiga kartu baru, yakni Kartu Sembako

		Murah, Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Penjelas	Menguatkan pernyataan satu dengan menjelaskan tujuan.	Saya berikan tiga senjata ini untuk menjelaskan ke masyarakat apa yang akan kita kerjakan ke depan," kata Jokowi disambut sorak-sorai pendukungnya.

Keunggulan program Joko Widodo ditampilkan dengan konjungsi “oleh karena itu” sebagai hasil dari kebutuhan rakyat yang terdiri atas sembako, pekerjaan, dan pendidikan. Selain itu, koherensi penjelas dengan konjungsi “untuk” digunakan sebagai penguat program Joko Widodo dengan memaparkan tujuan serta manfaat dari program yang ditawarkan.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

Saling Mendukung	Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut tiga kartu baru yang akan diluncurkannya jika memenangi Pilpres 2019 muncul berdasarkan survei kebutuhan masyarakat. Menurut dia, berdasarkan hasil survei, kebutuhan utama rakyat berturut-turut
-------------------------	---

	<p>ialah harga sembako, pekerjaan, dan pendidikan. Oleh karena itu, Jokowi meluncurkan tiga kartu baru, yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. "Jadi ketiga kartu ini kita keluarkan berdasarkan survei. Jadi bukan awur-awuran," kata Jokowi yang saat bertemu pengurus dan anggota pengurus dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Tenggara, di Kendari, Sabtu (2/3/2019).</p>
<p>Saling mendukung</p>	<p>Dengan Kartu Prakerja, lulusan SMA atau SMK, perguruan tinggi, serta korban PHK akan mendapat pelatihan untuk memasuki industri serta mendapat uang saku dalam jangka waktu tertentu. Kartu Indonesia Pintar Kuliah memungkinkan anak-anak Indonesia dari keluarga tidak mampu bisa menempuh ilmu di perguruan tinggi.</p>
<p>Inti Berita</p>	<p>Adapun Kartu Sembako akan membuat warga mendapat diskon saat membeli kebutuhan pokok. Jokowi meminta tim suksesnya di Sulawesi Tenggara membantu</p>

	<p>menyosialisasikan ketiga kartu tersebut.</p> <p>"Saya berikan tiga senjata ini untuk menjelaskan ke masyarakat apa yang akan kita kerjakan ke depan," kata Jokowi disambut sorak-sorai pendukungnya.</p>
--	---

Rangkaian kalimat maupun paragraph berita di atas menampilkan Joko Widodo sebagai narasumber. Kalimat-kalimat ditampilkan saling mendukung terhadap program yang disampaikan oleh Joko Widodo. Selanjutnya, pada akhir paragraph ditampilkan inti berita bahwa program tersebut merupakan senjata untuk kepemimpinannya kelak.

8) Berita 8: *Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Pemilihan diksi	Memberi tanggapan dan alasan yang	a) Bambang menilai, program tersebut merupakan terobosan baru . "Terobosan itu sudah banyak dilakukan.

	persuasif	b) Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir .
Penguunaan kata ganti		a) Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir..

Berita di atas ditampilkan tentang keunggulan program Joko Widodo yang disampaikan oleh narasumber. Penggunaan diksi “terobosan baru” menyatakan bahwa program Joko Widodo merupakan inovasi untuk menjawab kondisi yang dialami rakyat Indonesia. Selanjutnya, diksi “nyinyir” ditujukan kepada pihak penentang program Joko Widodo yang mengandung arti hanya bisa mencibir tanpa memberikan solusi.

Berita di atas juga ditampilkan dengan penggunaan kata ganti “kita” yang bertujuan agar pendapat yang disampaikan untuk mendukung program Joko Widodo dapat mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelasan Kontras	Menguatkan pernyataan satu dengan	a) Menurut saya, ini justru kita harus memberikan apresiasi. b) Jadi bukan soal ada duitnya

	melemahkan pernyataan yang lain.	atau tidak, tetapi justru kewajiban negara mencari sumber-sumber pendapatan negara untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya. c) Itulah terobosan yang dilakukan oleh Presiden. Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir
--	----------------------------------	--

Koherensi berita di atas dibentuk dengan penjelasan kontras yang menampilkan pertentangan antara program Joko Widodo dengan pihak penentangya. Penggunaan adverbial “justru” menampilkan hal yang sebaiknya dilakukan dan menyalahkan kelakuan pihak penentang. Hal tersebut diperkuat lagi dengan adverbial “harusnya” yang menyatakan masyarakat sepatutnya setuju terhadap program Joko Widodo dan bukan sebaliknya.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

Saling Mendukung	Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, program baru Presiden RI Joko Widodo seperti Kartu Pra-kerja, Kartu
-------------------------	--

	<p>Indonesia Pintar-Kuliah, dan Kartu Sembako Murah harus diapresiasi. Bambang menilai, program tersebut merupakan terobosan baru. "Terobosan itu sudah banyak dilakukan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah, kemudian terobosan kartu kesehatan, dan sekarang kartu untuk tenaga kerja. Menurut saya, ini justru kita harus memberikan apresiasi," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).</p>
<p>Ketidaksesuaian</p>	<p>Bambang juga menanggapi adanya pandangan bahwa salah satu program baru Jokowi, yaitu Kartu Pra-kerja, tidak ideal dengan kondisi finansial negara. Sebab Jokowi akan menggaji pemegang kartu tersebut meski belum mendapat pekerjaan. Bambang mengatakan, justru ini adalah tugas negara untuk mencari anggarannya. Negara wajib memenuhi. "Jadi bukan soal ada duitnya atau tidak, tetapi justru kewajiban negara mencari sumber-sumber pendapatan</p>

	<p>negara untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya. Itu dijamin dalam konstitusi," ujar Bambang.</p>
<p>Inti Berita</p>	<p>Bambang juga tidak mempermasalahkan Jokowi yang baru mengeluarkan program ini menjelang pemilu 2019. Menurut dia, semua pemerintah memiliki proses masing-masing. Pada awal pemerintahan, Bambang menilai, Jokowi fokus memperjuangkan KIP dan KIS. Setelah berhasil diterapkan, bukan hal aneh jika Jokowi mengembangkannya dalam bentuk kartu lain. "Itulah terobosan yang dilakukan oleh Presiden. Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir," kata dia.</p>

Berita di atas diawali dengan kalimat-kalimat yang saling mendukung terhadap program kartu Joko Widodo berdasarkan penyampaian dari ketua DPR Bambang Soesatyo. Dilanjutkan dengan argumen Bambang Soesatyo yang tidak sepatutnya atas pihak yang menentang program kartu Joko Widodo tersebut. Pada akhir paragraph, Bambang Soesatyo memberikan kesimpulan bahwa

program Joko Widodo telah meraih keberhasilan dan dikembangkan dengan program tiga kartu.

9) Berita 9: *Pengamat: Kartu Pra-Kerja Jokowi Konkret, Sementara Gagasan Prabowo Tak Sentuh Bumi*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Pemilihan Diksi	Menggunakan kata untuk memberikan makna negatif	<p>a) Program Kartu Pra-Kerja Joko Widodo merupakan gagasan yang konkret.</p> <p>b) Menurut Adi, dalam menjawab program kerja petahana idealnya kubu penantang bisa menyuguhkan gagasan yang lebih brilian dan rasional</p> <p>c) Prabowo selalu berlindung di bawah narasi besar, tapi gagasan yang menyentuh bumi enggak ada.</p> <p>d) Lebih banyak retorika besarnya, tapi gagasan operasionalnya kering," kata Adi Prayitno.</p>

		<p>e) Adi tidak menampik jika program ini akan memiliki insentif elektoral untuk Jokowi, sekaligus mengesankan kubu 02 panik dengan kartu prakerja ini.</p>
--	--	--

Berita di atas sarat dengan penggunaan kata yang menjatuhkan calon presiden Prabowo Subianto dan mengunggulkan calon presiden Joko Widodo. Diksi “konret” disematkan pada program Jokowi yang mengandung arti program nyata dan dapat diterapkan dalam realita. Sementara diksi “idealnya” dan “lebih brilian” digunakan untuk menyatakan kelemahan terhadap kritikan kubu Prabowo. Diksi “lebih brilian” juga menyatakan bahwa program Joko Widodo telah “brilian” atau begitu hebat.

Selanjutnya, diksi “menyentuh bumi” pada kalimat “gagasan yang menyentuh bumi nggak ada” digunakan untuk meremehkan tindakan dan pendapat yang dilakukan oleh Prabowo beserta pendukungnya dengan menyampaikan bahwa ide yang nyata tidak dimiliki oleh Prabowo. Diperkuat lagi dengan diksi “retorika” yang menggambarkan kubu Prabowo hanya unggul dalam berbicara dan mengkritik. Akhirnya, Bambang Soesatyo menyimpulkan keadaan Prabowo dengan diksi “panik” yang mengartikan keadaan Prabowo tidak dapat berpikir dengan baik.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelasan Kontras	Menguatkan pernyataan satu dengan melemahkan pernyataan lain.	<p>a) Meskipun nanti perlu dipikirkan soal pendanannya, namun jangan mencibir program Jokowi itu tanpa memberikan solusi.</p> <p>b) Prabowo sebenarnya semangatnya sama ingin membantu rakyat, tapi jawabannya semua akan diselesaikan dalam program 100 hari. Tidak ada basis argumentasi yang detail.</p> <p>c) Selama ini masyarakat juga tidak pernah membayangkan pembangunan infrastruktur yang jor-joran itu ada uangnya, bahkan dananya dari mana enggak jelas, tapi dalam praktiknya infrastruktur</p>

		jelas.
Penyebab	Menguatkan pernyataan dengan memberikan alasannya.	Karena ini program populis dan visi misi Jokowi dari tiga kartu ini lebih detail. Artinya ketika ditanya bagaimana ibu-ibu bisa mengakses barang mudah, jawabannya ya sederhana dikasih kartu sembako murah, ketika ditanya anak muda bisa kerja, dikasih keterampilan lalu disubsidi.

Berita di atas berisi kalimat-kalimat yang bertujuan untuk melemahkan pendapat kubu Prabowo dengan memberikan kalimat penentangannya. Dua konjungsi pada poin (a) yakni “meskipun” dan “namun” diberikan sebagai respon dari pendapat Prabowo dan pendukungnya. Hal itu dapat melemahkan pendapat pihak Prabowo sekaligus menguatkan program yang ditawarkan Joko Widodo. Konjungsi “tapi” pada poin (b) dan (c) juga memberikan makna yang sama yakni menentang pendapat dari kubu Prabowo.

Koherensi penyebab juga dihadirkan pada berita di atas dengan tujuan untuk mengunggulkan program kartu Joko Widodo dengan memberikan alasan menggunakan konjungsi “karena”.

Dengan demikian, berita di atas mengunggulkan program yang ditawarkan Joko Widodo sekaligus melemahkan kritikan yang telah dipaparkan oleh kubu Prabowo.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

<p>Saling Menentang</p>	<p>Politisi PKS Fahri Hamzah, misalnya, menyebut Kartu Pra-Kerja tidak masuk akal karena menurut dia tidak ada dana untuk membiayai program ini. Waketum Gerindra Fadli Zon bahkan menyebut Kartu Pra-Kerja ini impian kosong, politis, dan norak. Adi menyarankan kepada pendukung pasangan Prabowo-Sandi selaku penantang untuk menjawab Kartu Pra-Kerja dengan program serupa yang dianggap lebih masuk akal untuk memfasilitasi kelompok lulusan SMA dan SMK dalam mengakses pekerjaan. "Bukan hanya mengatakan itu program tidak rasional, enggak ada dananya, kemudian dilaporin ke Bawaslu.</p>
--------------------------------	--

Rangkaian kalimat dalam berita di atas ditampilkan dengan mempertentangkan pendapat antara pendukung Prabowo dengan seorang pengamat politik Adi Prayitno. Di awal paragraf, ditampilkan

pendapat dari Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang mengkritik program Joko Widodo. Selanjutnya, berita tersebut menampilkan pandangan dari pengamat politik yang menentang kritikan dari Fadli Zon dan Fahri Hamzah dengan melemahkan kedua pendapat dari pendukung Prabowo tersebut.

b. Topik 2 : Program dan Visi Misi Calon Pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno

1) Berita 10: *Janji Program Kerja Prabowo-Sandiaga, dari Persoalan Ekonomi, Susu Gratis hingga Ancaman Persekusi*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Nominalisasi	Penghilangan subjek dan peristiwa ditampilkan sebagai keadaan, bukan tindakan	Kelima fokus program kerja itu kemudian ia jabarkan lagi melalui sejumlah janji-janji politik, dari soal penciptaan lapangan kerja, penyediaan susu gratis hingga penghentian ancaman persekusi terhadap kelompok minoritas.
Pemilihan diksi	Menentukan sebuah kata	Kelima fokus program kerja itu kemudian ia jabarkan lagi melalui

	dengan makna yang negatif	sejumlah janji-janji politik .
Kalimat tak langsung	Menyampaikan informasi tanpa adanya penekanan langsung dari narasumber	<p>a) Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi andalannya terkait Pilpres 2019.</p> <p>b) Visi misi tersebut ia paparkan saat menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta,</p> <p>c) Prabowo menjabarkan lima fokus program kerja nasional bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno jika keduanya terpilih.</p> <p>d) Kelima fokus program kerja itu kemudian ia jabarkan lagi melalui sejumlah janji-janji politik, dari soal penciptaan lapangan kerja, penyediaan susu gratis hingga penghentian ancaman persekusi terhadap kelompok minoritas.</p>

Berita di atas menampilkan visi misi Prabowo-Sandiaga berdasarkan pidato yang telah disampaikan oleh Prabowo. Kalimat yang digunakan dalam menggambarkan visi misi tersebut berupa nominalisasi, yakni menampilkan peristiwa dalam bentuk keadaan bukan tindakan. Nominalisasi juga berfungsi untuk mengaburkan subjeknya seperti “penciptaan” lapangan kerja, “penyediaan” susu gratis hingga “penghentian” ancaman persekusi.

Selain itu, penggambaran visi misi Prabowo dilakukan dengan menggunakan diksi “janji-janji politik” yang telah menjadi makna yang lazim di masyarakat bahwa janji politik merupakan sebuah janji yang tidak terbukti. Selanjutnya, pelemahan visi misi Prabowo dilakukan dengan menggambarkan pernyataan Prabowo menggunakan kalimat tidak langsung. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya penekanan pada pesan yang disampaikan dibandingkan dengan penggunaan kalimat langsung pada kutipan berita.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelas	Menggambarkan pernyataan yang telah disampaikan	a) Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi andalannya terkait Pilpres

	oleh Calon Presiden Prabowo	<p>2019. Visi misi tersebut ia paparkan saat menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta</p> <p>b) Prabowo menjabarkan lima fokus program kerja nasional bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno jika keduanya terpilih. Kelima fokus program kerja itu kemudian ia jabarkan lagi melalui sejumlah janji-janji politik, dari soal penciptaan lapangan kerja, penyediaan susu gratis hingga penghentian ancaman persekusi terhadap kelompok minoritas.</p>
--	-----------------------------------	---

Pemaparan visi misi Prabowo dalam berita di atas ditampilkan dengan koherensi penjelas. Hal tersebut menggambarkan visi misi Prabowo terjelaskan dengan beberapa kalimat tanpa ditampilkan dasar, alasan, maupun tanggapan terhadap program tersebut. Dapat dikatakan bahwa berita di atas hanya menampilkan informasi seputar visi misi Prabowo.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

<p>Saling Mendukung</p>	<p>Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi andalannya terkait Pilpres 2019. Visi misi tersebut ia paparkan saat menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.</p> <p>Prabowo menjabarkan lima fokus program kerja nasional bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno jika keduanya terpilih. Kelima fokus program kerja itu kemudian ia jabarkan lagi melalui sejumlah janji-janji politik, dari soal penciptaan lapangan kerja, penyediaan susu gratis hingga penghentian ancaman persekusi terhadap kelompok</p>
--------------------------------	--

	minoritas.
--	------------

Seperti yang dipaparkan pada poin sebelumnya, berita di atas hanya menampilkan kalimat-kalimat eksposisi. Meskipun kalimat-kalimat dipadukan dengan makna yang saling mendukung, kalimat tersebut hanya mengandung informasi semata tentang visi misi Prabowo.

2) Berita 11: *Alasan Tim Prabowo-Sandiaga Gunakan Kata "Menyelamatkan Indonesia" di Visi Misi*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Nominalisasi	Penghilangan subjek dan peristiwa ditampilkan sebagai keadaan, bukan tindakan	<p>a) Prabowo-Sandiaga menilai perlunya penyelamatan Indonesia di bidang ekonomi.</p> <p>b) Pengembangan sumber daya manusia akan dijadikan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.</p>

Tatabahasa yang digunakan pada berita di atas menggunakan kaidah nominalisasi, yakni perubahan dari verba ke nomina. Perubahan tersebut juga mengubah makna dari tindakan menjadi keadaan. Seperti pada kata “penyelamatan”, meskipun subjeknya ditampilkan, tidak digambarkan secara jelas tentang dari mana sebab penyelamatan itu. Selanjutnya pada kata “pengembangan” juga tidak ditampilkan subjek yang akan melakukan pengembangan tersebut.

b) Representasi dalam kombinasi antarkalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelasan	Menguatkan pernyataan satu dengan menjelaskan pada pernyataan berikutnya.	Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo mengatakan, penggunaan kata "Menyelamatkan Indonesia" di butir pilar ekonomi bukan tanpa alasan . "Butir tersebut dasar pertimbangannya adalah , Indonesia tidak boleh lagi hanya mengandalkan kekayaan alam sebagai tulang

		punggung ekonomi.
Penyebab	Menguatkan satu pernyataan dengan menyertakan alasan	Dradjad yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini terlalu mudah digoyang oleh faktor eksternal karena rapuhnya sumber-sumber pertumbuhan domestik.

Koherensi pada berita di atas terdapat koherensi penjas yang bertujuan untuk menguatkan pendapat Dradjad Wibowo yang menguatkan visi Calon Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, terdapat koherensi penyebab yang menampilkan pernyataan Drajad disertai alasan yang menguatkan pendapat tersebut.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

Saling Mendukung	Salah satu yang menjadi fokus pasangan ini adalah pilar bidang ekonomi. Dalam salah satu butir pilar ekonomi tersebut, Prabowo-Sandiaga menilai perlunya penyelamatan Indonesia di bidang ekonomi. Bunyi lengkap butir ini adalah "Menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan
-------------------------	--

	<p>di bidang ekonomi, dengan mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan mampu bersaing di tingkat dunia".</p> <p>Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo mengatakan, penggunaan kata "Menyelamatkan Indonesia" di butir pilar ekonomi bukan tanpa alasan. "Butir tersebut dasar pertimbangannya adalah, Indonesia tidak boleh lagi hanya mengandalkan kekayaan alam sebagai tulang punggung ekonomi," ujar Dradjad kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (12/10/2018).</p>
--	--

Berita di atas dirangkai dengan kalimat yang mendukung visi Prabowo untuk menyelamatkan Indonesia. Pernyataan dukungan disampaikan oleh Drajad Wibowo dengan mengunggulkan visi yang telah disampaikan oleh Prabowo pada pernyataan sebelumnya.

3) Berita 12: *Timses Sebut Prabowo-Sandi Janji Alokasikan 10 Persen Dana Pendidikan untuk Kompetisi Antar-sekolah*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata	Tujuan	Kutipan Berita

dan Tatabahasa		
Penonjolan subjek	Menyebutkan subjek beserta hal yang akan dilakukan	<p>a) Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen untuk menghidupkan kompetisi siswa antar-sekolah jika terpilih pada Pilpres 2019.</p> <p>b) Prabowo-Sandiaga berencana menggelar kompetisi olahraga setiap tahunnya.</p>
Kata Ganti	Seluruh lapisan masyarakat terlibat (menyetujui) dalam program yang dicanangkan.	Kita berkomitmen, 10 persen dari dana pendidikan itu difokuskan pada menghidupkan semangat kompetisi. Semua jenis kompetisi mulai dari sains sampai dengan olahraga.

Penempatan subjek yakni pasangan Calon Presiden Prabowo-Sandiaga begitu ditonjolkan. Kalimat-kalimat dibuat dengan menyertakan subjeknya seperti pada poin (a) dan (b) yang akan melakukan perbuatan positif di bidang pendidikan. Selain itu, kata

ganti yang digunakan juga mengidentikkan seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan kata ganti “kita”.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelasan Kontras	Menguatkan pernyataan satu dengan membandingkan dengan pernyataan selanjutnya.	Terkait dengan isu kesehatan, kata Dahnil, Prabowo-Sandiaga berencana menggelar kompetisi olahraga setiap tahunnya. Sementara di banyak negara maju, liga sekolah telah menjadi laboratorium untuk mencari atlet-atlet berbakat di berbagai cabang olahraga.
Penyebab	Menjelaskan pernyataan satu sebagai sebab dan pernyataan selanjutnya sebagai hasilnya.	Ia menjelaskan, penyelenggaraan kompetisi tersebut nantinya akan mensinergikan antar-kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Olahraga, dan Kementerian Pendidikan Tinggi.

		<p>Dengan demikian, kompetisi akan menjadi tradisi antarsekolah dan kampus yang bergulir setiap tahun.</p>
--	--	---

Berita di atas menampilkan koherensi penjelasan kontras yang bertujuan untuk memberikan perbandingan antara pendidikan di Indonesia dan di negara maju. Pernyataan tersebut dapat menguatkan visi Prabowo yang menawarkan sebuah visi positif di bidang pendidikan seperti yang dilakukan oleh banyak negara maju.

Selanjutnya, koherensi penjelasan dilakukan untuk lebih memperincikan gambaran visi Prabowo tersebut sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Hasil tersebut ditampilkan dengan menggunakan konjungsi "dengan demikian".

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

Awal	<p>Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen untuk menghidupkan kompetisi siswa antar-sekolah jika terpilih pada Pilpres 2019. Dahnil mengatakan, 10 persen dari dana pendidikan dalam anggaran negara</p>
-------------	---

	<p>akan difokuskan untuk menggelar kompetisi, mulai dari bidang ilmu pengetahuan hingga olahraga. "Kita berkomitmen, 10 persen dari dana pendidikan itu difokuskan pada menghidupkan semangat kompetisi. Semua jenis kompetisi mulai dari sains sampai dengan olahraga," ujar Dahnil.</p>
Akhir	<p>Ia menjelaskan, penyelenggaraan kompetisi tersebut nantinya akan mensinergikan antar-kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Olahraga, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, kompetisi akan menjadi tradisi antarsekolah dan kampus yang bergulir setiap tahun. "Semuanya saling terkait untuk menghidupkan tradisi kompetisi ini. Kompetisi sepakbola antar sekolah, antar kampus, itu harus hidup setiap tahun. Terus bergulir, harus hidup," kata Dahnil. "Dana pendidikan itu minimal 10 persen itu harus digunakan untuk kompetisi-kompetisi seperti ini," ucap mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah</p>

	itu.
--	------

Berita di atas diawali dengan pernyataan visi pasangan Prabowo-Sandiaga yang ingin menghidupkan tradisi berkompetisi di lingkungan sekolah. Kalimat-kalimat yang dirangkai dalam berita tersebut dibuat saling mendukung. Setelah itu, berita diakhiri dengan pernyataan narasumber yang memberikan penjelasan terkait cara melakukan visi dan efek positif dari visi tersebut.

4) Berita 13: *Solusi Masalah Rokok, Prabowo-Sandi Akan Dorong Petani Tembakau Beralih Profesi*

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Pelemahan subjek	Menggunakan kalimat pasif untuk melemahkan posisi subjek	Dia menyebutkan, jika Prabowo-Sandiaga terpilih, petani tembakau akan didorong beralih ke industri lain dengan menambah anggaran untuk industri tertentu.
Pemilihan diksi	Menggunakan diksi dengan makna yang	Meskipun tidak mudah, Hermawan meyakini Prabowo-Sandiaga memiliki kemauan politik yang kuat agar

	lebih negatif	jumlah pengguna rokok bisa menurun.
--	---------------	-------------------------------------

Berita di atas menampilkan rencana Prabowo yang disampaikan kepada masyarakat tentang rokok. Dalam berita tersebut, digunakan frasa “akan didorong” yang menyatakan rakyat sebagai sasaran dan Prabowo sebagai pelaku atau yang melakukan tindakan. Akan tetapi, dengan penggunaan verba pasif “akan didorong” seperti dalam kalimat “petani tembakau *akan didorong* beralih ke industri lain” mengakibatkan subjek tersamarkan. Meskipun diawal kalimat dinyatakan kehadiran Prabowo, tetap saja tersamar dibandingkan dengan menggunakan verba aktif seperti “Prabowo Sandiaga *akan mendorong* petani tembakau beralih ke industri lain”.

Selanjutnya, penggunaan diksi “kemauan politik” mengandung makna yang negatif disebabkan oleh kata “politik” yang menyertainya. Pemaknaan tentang politik dalam konteks saat ini telah berubah menjadi sesuatu yang negative karena beberapa kasus politik yang menimpa rakyat Indonesia. Hal tersebut menyebabkan “kemauan politik” yang disematkan pada Prabowo memiliki makna yang negative dibandingkan jika tidak menggunakan kata “politik” pada kalimat tersebut.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk	Tujuan	Kutipan Berita
--------	--------	----------------

Koherensi		
Penjelasan Kontras	Menguatkan pernyataan dengan memaparkan kelemahan pada kalimat sebelumnya.	<p>a) Kita naikkan cukai pun, tapi selama budaya dan perilaku masyarakat merokok tidak berubah serta petani yang menggantungkan diri di tembakau, ya tidak akan selesai. Maka dari itu, yang perlu dibenahi adalah alternatif dan sumber kesejahteraan petani tembakau.</p> <p>b) Meskipun tidak mudah, Hermawan meyakini Prabowo-Sandiaga memiliki kemauan politik yang kuat agar jumlah pengguna rokok bisa menurun.</p>

Koherensi yang ditampilkan dalam berita di atas menunjukkan penjelasan kontras yang digunakan untuk memperkuat suatu pernyataan dengan melemahkan pernyataan yang lain. Kalimat berita

di atas menggunakan konjungsi “tapi=tetapi” dan “meskipun” yang bertujuan sebagai penentang dari kalimat yang dikaitkan dengannya.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

<p style="text-align: center;">Awal</p>	<p>Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyebut, program pengendalian produksi tembakau akan menjadi perhatian dalam debat ketiga Pilpres 2019. Anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, mengungkapkan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memberikan solusi agar pengguna rokok di Indonesia bisa menurun. Menurut dia, yang perlu dibereskan adalah hulu masalah industri rokok, yaitu mendorong petani tembakau untuk beralih profesi di bidang lain.</p>
<p style="text-align: center;">Akhir</p>	<p>Meskipun tidak mudah, Hermawan meyakini Prabowo-Sandiaga memiliki kemauan politik yang kuat agar jumlah pengguna rokok bisa menurun. Dia mengatakan, tim kesehatan BPN sudah membuat rencana dan merancang program kesehatan yang bisa dipaparkan Sandiaga saat debat ketiga.</p>

	Adapun tema debat ketiga ialah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.
--	--

Rangkaian kalimat yang ditampilkan dalam berita di atas dibuat saling mendukung. Di awal paragraf ditampilkan tentang rencana peralihan petani tembakau ke profesi yang lain. Selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan bahwa rencana tersebut dapat dilakukan dan merupakan solusi yang baik meskipun terdapat kendala dalam prosesnya.

c. Topik: Kecurangan Pemilu

1) Berita 14: *Prabowo: Katanya Pemilu Jujur, tapi Belum Mulai Sudah Nyoblos Sendiri*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Pemilihan diksi	Menggunakan diksi dengan makna yang lebih negatif	a) Manusia tidak suka dibohongi, tidak suka dicurangi. Ibarat main sepak bola kita lihat wasit tidak netral, memihak satu kesebelasan. b) Rakyat tidak mau terus dibohongi

		dan dicurangi. "Walaupun miskin tapi rakyat Indonesia punya harga diri
Nominalisasi	Menggunakan kata yang tidak menyebutkan pelaku	Prabowo menyesalkan terjadinya dugaan kecurangan ini.
Kata Ganti	Menggunakan kata yang mewakili seluruh masyarakat	Kita mau enggak ikut main dalam pertandingan seperti itu?" kata Prabowo

Penggunaan diksi dalam pernyataan yang ditampilkan dalam berita di atas memiliki makna yang begitu kontras. Diksi "manusia" digunakan sebagai ungkapan kekecewaan yang mengartikan bahwa pelaku yang melakukan tindakan bukanlah manusia. Selanjutnya, digunakan kata "miskin" untuk menggambarkan keadaan rakyat Indonesia. Diksi tersebut memiliki arti sebuah keadaan yang masih dapat diubah dibandingkan dengan menggunakan diksi "tidak mampu". Hal ini mengartikan bahwa Prabowo pandai memilih kata dengan maksud masih dapat mengubah keadaan tersebut.

Penggunaan kaidah bahasa terlihat pada proses nominalisasi. Berita tersebut menggunakan nomina “kecurangan” untuk menutupi pelaku/ subjek. Hal tersebut berbeda jika menggunakan kalimat “Pendukung Joko Widodo melakukan kecurangan” yang secara jelas menampilkan pelaku/ subjek. Selain itu, Prabowo menggunakan kata ganti “kita” untuk menyampaikan bahwa kekecewaan tidak saja dialami oleh dirinya, tetapi dialami oleh seluruh rakyat Indonesia.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelasan Kontras	Menguatkan pernyataan dengan memaparkan kelemahan pada kalimat sebelumnya.	a) Katanya pemilu jujur, bersih, adil, tapi belum mulai saja udah ada yang nyoblos nyoblos sendiri. b) Rakyat tidak mau terus dibohongi dan dicurangi. "Walaupun miskin tapi rakyat Indonesia punya harga diri.

Koherensi dalam kalimat-kalimat yang dibangun dalam berita di atas berupa penjelasan kontras dengan menggunakan konjungsi

“tapi=tetapi”. Hal itu menggambarkan keadaan yang seharusnya terjadi, namun tidak berjalan seperti hal yang sewajarnya (terjadi kecurangan). Pernyataan tentang kondisi ideal dipertentangkan dengan kondisi pelanggaran yang terjadi pada saat itu.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

<p style="text-align: center;">Awal</p>	<p>Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung kasus surat suara tercoblos di Malaysia untuk pasangan rivalnya, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Katanya pemilu jujur, bersih, adil, tapi belum mulai saja udah ada yang nyoblos nyoblos sendiri," kata Prabowo saat menghadiri deklarasi dukungan dari Aliansi Advokat Indonesia Bersatu di Jakarta,</p>
<p style="text-align: center;">Akhir</p>	<p>Dalam acara yang sama, pimpinan aliansi Advokat Indonesia Bersatu Otto Hasibuan menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya siap melawan secara hukum apabila ada kecurangan. "Lakukan langkah hukum jika ada kecurangan. Hari ini kita lihat, di Malaysia</p>

	<p>ada kecurangan, sangat menyedihkan," kata dia. Sebelumnya, beredar video amatir yang menunjukkan temuan surat suara sudah tercoblos. Surat suara itu disebut dimuat dalam puluhan kantong. Diduga, hal ini terjadi di Selangor, Malaysia. Informasi dalam video tersebut, surat suara tercoblos untuk caleg Partai Nasdem. Sementara surat suara Pilpres, tercoblos untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.</p>
--	--

Berita di atas dipaparkan dengan pernyataan-pernyataan saling mendukung antara Prabowo dengan pendukungnya. Pada awal berita ditampilkan kekecewaan Prabowo terhadap kecurangan pemilu yang terjadi. Selanjutnya, diakhiri dengan pernyataan yang mendukung pendapat Prabowo tersebut. Narasumber yang dihadirkan mendukung pernyataan Prabowo bahkan akan mengawal ke jalur hukum.

2) Berita 15: *Kubu Prabowo-Sandiaga Nilai Wajar jika Masyarakat Ragukan Kredibilitas KPU*

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata	Tujuan	Kutipan Berita
dan		

Tatabahasa		
Pemilihan diksi	Menggunakan kata untuk melemahkan pernyataan	<p>a) Ia menyinggung masalah dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.</p> <p>b) Yandri Susanto menilai wajar jika ada sebagian masyarakat yang khawatir mengenai rendahnya profesionalitas atau kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p>
Nominalisasi	Menggunakan kata untuk menggambarkan peristiwa sebagai keadaan, bukan tindakan aktif.	<p>a) Yandri memandang fenomena tersebut sebagai bentuk kepedulian sekaligus kontrol dari masyarakat.</p> <p>b) Ia menyinggung masalah dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.</p> <p>c) Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar.</p>

Penggunaan diksi pada poin (a) yakni “dugaan” dapat memberikan pengertian bahwa kecurangan pemilu hanyalah sebatas perkiraan dan keakuratannya belum bisa dipastikan. Hal tersebut dapat melemahkan pendapat dari kubu pasangan calon nomor urut 1 tentang adanya kecurangan pemilu. Pada poin (b) menggunakan diksi “khawatir” yang dapat memperkuat bahwa kecurangan pemilu belum terbukti dan belum ada protes langsung dari masyarakat.

Wartawan juga menggunakan nominalisasi dalam membuat berita di atas. Pada bagian yang dicetak tebal di atas, kata yang dipilih adalah berbenatuk nomina sehingga peristiwa dalam berita tersebut ditampilkan dalam bentuk keadaan, bukan sebagai tindakan. Hal itu mengindikasikan tidak adanya tindakan langsung dari subjek, malah subjek tidak ditonjolkan dalam berita tersebut. Oleh karena itu, wartawan membuat berita tersebut untuk melemahkan kritikan yang disampaikan oleh kubu pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelasan	Menguatkan pernyataan dengan adanya	a) Yandri Susanto menilai wajar jika ada sebagian masyarakat yang khawatir

	pernyataan selanjutnya.	mengenai rendahnya profesionalitas atau kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU). b) Yandri menuturkan, kekhawatiran masyarakat terkait kredibilitas KPU menjadi wajar jika melihat dari berbagai persoalan yang muncul belakangan ini.
Penyebab	Menguatkan satu pernyataan dengan memaparkan hasil tindakan.	Dia (KPU) tetap fokus saja dengan kerja-kerja riilnya. Sehingga masyarakat diperlihatkan kepada publik ya memang KPU profesional

Wartawan dengan pandangannya tentang sesuatu peristiwa tidak bisa terlepas dari sikap netral yang dimiliki oleh media. Hal itu membuat wartawan sebisa mungkin membuat kalimat-kalimat yang tidak terlalu kontras dalam beritanya. Dalam berita di atas, koherensi yang digunakan adalah koherensi penjelas dan penyebab yang membuat berita tersebut mendukung pernyataan dari narasumber

yang berasal dari pihak pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

<p style="text-align: center;">Awal</p>	<p>Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Yandri Susanto menilai wajar jika ada sebagian masyarakat yang khawatir mengenai rendahnya profesionalitas atau kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yandri memandang fenomena tersebut sebagai bentuk kepedulian sekaligus kontrol dari masyarakat agar penyelenggara pemilu dapat bersikap netral. "Nah kekhawatiran-kekhawatiran itu sih menurut saya wajar-wajar saja. Sehingga kontrol masyarakat itu kan berjalan," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).</p>
<p style="text-align: center;">Akhir</p>	<p>Kemudian politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung masalah 103 warga negara asing yang memiliki e-KTP dan masuk DPT. "Jadi kalau</p>

	<p>hari ini ada sebagian masyarakat yang meragukan kredibilitas KPU, ya enggak apa-apa, terima saja, itu bagian dari kontrol," kata Yandri. "Tdk perlu juga merasa tersudutkan, merasa terdegradasi atau tidak legitimate lagi, enggak perlu. Dia (KPU) tetap fokus saja dengan kerja-kerja riilnya. Sehingga masyarakat diperlihatkan kepada publik ya memang KPU profesional," tutur dia.</p>
--	---

Wartawan menulis berita di atas dengan mengawali dengan pernyataan dari Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga. Dari awal hingga akhir berita, wartawan membuatnya dengan pernyataan-pernyataan yang saling mendukung. Di akhir berita, wartawan menuliskan pendapat dari politisi dari Partai Amanat Nasional yang juga mendukung dari pernyataan narasumber di awal.

3) Berita 16: *KPU Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal 17,5 Juta Data*

Pemilih Tak Wajar

a) Representasi dalam anak kalimat

<p>Kosakata dan Tatabahasa</p>	<p>Tujuan</p>	<p>Kutipan Berita</p>
--	----------------------	------------------------------

Pemilihan diksi	Menggunakan kata untuk menguatkan sebuah pernyataan	KPU Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar.
Verba aktif	Menguatkan pernyataan dengan menempatkan subjek sebagai unsur yang melakukan tindakan.	a) Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar. b) Selama kami temukan itu ganda, pasti kami akan coret, sama seperti data WNA, orang meninggal, itu satu kelompok.

Penggunaan diksi dalam berita di atas dapat dilihat bahwa wartawan melalui pernyataan dari KPU menentang laporan dari kubu BPN Prabowo tentang kecurangan pemilu dengan adanya data yang tidak wajar. Wartawan menggunakan kata “bantah” mengartikan bahwa dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pihak calon presiden nomor urut 1 adalah tidak benar. Fakta tersebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan institusi yang resmi dan valid akan data-data yang diberikan. Selain itu, wartawan dalam memperkuat

pernyataan dari KPU menggunakan verba aktif dalam kalimat-kalimatnya seperti yang dicetak tebal pada poin (a) dan poin (b).

Penggunaan diksi dan verba aktif dalam berita di atas mengindikasikan pandangan wartawan yang melemahkan posisi dari calon presiden nomor urut 2 sekaligus memperkuat posisi calon presiden nomor urut 1.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelasan Kontras	Menguatkan pernyataan dengan melemahkan pernyataan sebelumnya.	Sementara itu , mengenai dugaan 775.000 data ganda yang disampaikan BPN, Viryan menyebut bahwa potensi data ganda itu sudah disampaikan KPU ke BPN pada Februari.
Penjelas	Menguatkan satu pernyataan dengan adanya pernyataan berikutnya.	Selama kami temukan itu ganda, pasti kami akan coret, sama seperti data WNA, orang meninggal, itu satu kelompok. Kami menyebutnya perbaikan DPT," kata Viryan.

Penyebab	Menguatkan pernyataan dengan memberikan alasan	Viryan menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut.
----------	--	--

Wartawan mengonstruksi berita di atas dengan koherensi yang memperkuat pandangan bahwa tidak adanya kecurangan dalam pemilu tahun 2019. Koherensi pertama yang digunakan adalah penjelasan kontras yang menentang laporan BPN Prabowo-Sandiaga terkait data tidak wajar yang ditemukannya. Penggunaan konjungsi “Sementara itu” dalam kalimatnya menjadi pernyataan penentang dari ketidakwajaran data pemilih tersebut. Dengan kata lain, data pemilih yang ditemukan oleh BPN Prabowo masih termasuk data pemilih yang wajar.

Wartawan memperkuat setiap pernyataan dari berita di atas dengan koherensi penjas yakni ditampilkannya pernyataan lain yang dapat menguatkan pernyataan sebelumnya. Tampak dalam kalimat yang dicetak tebal, bahwa ketidakwajaran data pemilih tidak ada lagi setelah adanya perbaikan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Selain itu, koherensi penyebab ditampilkan oleh wartawan agar pernyataan BPN Prabowo terkait data pemilih yang tidak wajar disanggah dengan alasan yang kuat.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

Saling Menentang	"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa. Hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 1 bulan 12, dan tanggal 1 bulan 1," katanya. Menurut Viryan, data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014. Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar.
	BPN Prabowo-Sandiaga menemukan 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Data tersebut didapat BPN dari hasil pencermatan mereka terhadap DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

Wartawan mengonstruksi berita di atas dengan paragraf yang berisi bantahan terhadap laporan BPN Prabowo tentang adanya data pemilih yang tidak wajar. Dari awal paragraf, wartawan menampilkan pernyataan langsung dari KPU agar fakta-fakta yang ditampilkan dalam berita itu semakin kuat dan valid. Paragraf awal yang ditampilkan oleh wartawan juga merupakan penentang dari paragraf akhir yang memperlihatkan pernyataan BPN Prabowo tentang data

pemilih yang tidak wajar. Oleh karena itu, wartawan semakin menampakkan adanya pernyataan-pernyataan yang saling menentang dan mengindikasikan pelemahan posisi dari pihak calon pasangan nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga.

4) Berita 17: *Kemendagri Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal DPT*

Tak Wajar, Ini Penjelasannya

a) Representasi dalam anak kalimat

Kosakata dan Tatabahasa	Tujuan	Kutipan Berita
Pemilihan diksi	Menggunakan kata untuk menguatkan sebuah pernyataan	c) Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 d) Temuan ini dianggap janggal oleh BPN Prabowo-Sandiaga.
Kata ganti	Menggunakan kata ganti untuk mewakili seluruh	Dengan demikian, kita sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15 ya.

	masyarakat	
--	------------	--

Penggunaan diksi dalam berita di atas menggunakan diksi “angkat bicara” yang dapat diartikan sebagai sebuah sumber informasi yang akhirnya diungkapkan dan berisi kebenaran. Diksi tersebut tentunya memiliki makna yang berbeda jika menggunakan kata “menyampaikan” ataupun “mengatakan”. Selain itu, penggunaan diksi “janggal” mengandung pengertian bahwa hal yang disampaikan oleh Prabowo belum mutlak sebagai sebuah kecurangan. Dengan kata tersebut terkandung arti bahwa subjek belum memastikan adanya kecurangan itu.

Peristiwa kecurangan pemilu juga ditampilkan sebagai hal yang tidak benar dikuatkan dengan adanya penggunaan kata ganti “kita” pada pernyataan narasumber. Hal tersebut menyatakan bahwa perkataan yang disampaikan oleh narasumber merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat tentang ketidakbenaran bahwa dalam pemilu terjadi kecurangan.

b) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Bentuk Koherensi	Tujuan	Kutipan Berita
Penjelasan Kontras	Menguatkan pernyataan	Temuan ini dianggap janggal oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

	dengan melemahkan pernyataan sebelumnya.	Namun , menurut Zudan, temuan itu justru merupakan sesuatu yang wajar.
Penjelas	Memberikan pernyataan tambahan untuk mengutkan pernyataan sebelumnya.	Dukcapil menggunakan (SIAK) Sistem Informasi Kependudukan dalam pengelolaan data base warga negara Indonesia. Sejak menggunakan SIAK, warga negara yang tak mengetahui atau lupa akan tanggal lahirnya, akan ditulis lahir pada 1 Juli. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat kembali menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Penulisan kalimat demi kalimat dalam berita di atas dapat dilihat dengan penggunaan penjelasan kontras yakni pernyataan yang

bertentangan antara BPN Prabowo Sandiaga dan pihak Dukcapil. Penggunaan konjungsi “namun” menjelaskan bahwa hal yang disampaikan oleh BPN Prabowo-Sandiaga telah disangkal kebenarannya oleh pihak dukcapil. Selanjutnya, koherensi penjas yang ditampilkan juga menguatkan pernyataan dari pihak dukcapil dengan menjelaskan bahwa penyampaian pihak dukcapil tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

c) Representasi dalam rangkaian antarkalimat

<p>Saling Menentang</p>	<p>Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang disebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, banyak yang tidak wajar. Ketidakwajaran itu, menurut BPN, lantaran ada jutaan nama yang memiliki tanggal lahir sama, yakni 31 Desember. Bahkan, ada ratusan ribu nama yang berusia di atas 90 tahun. Temuan ini dianggap janggal oleh BPN Prabowo-Sandiaga. Namun, menurut Zudan, temuan itu justru merupakan sesuatu yang wajar. "Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember sudah</p>
--------------------------------	---

	berlangsung lama, semenjak Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," ujar Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (11/3/2019).
--	---

Berita di atas dikemas dengan menampilkan pernyataan yang saling menentang antara pendapat BPN Prabowo dan penjelasan pihak dukcapil yakni Zudan Arif Fakrullah. Pernyataan Zudan menentang laporan dari BPN Prabowo-Sandiaga yang mengatakan terjadinya kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut disangkal oleh Zudan dengan mengacu pada aturan dukcapil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi teks di atas, media menampilkan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada posisi yang lebih diunggulkan dibandingkan dengan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta linguistik dalam berita yang lebih didominasi pada penguatan posisi pasangan calon presiden nomor urut 1 tersebut. Berikut tabel perbandingan jumlah data tentang hasil analisis dimensi teks.

- a) Representasi dalam anak kalimat pada teks berita Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Bentuk	Tujuan	Jumlah Data
Penonjolan Subjek	Menguatkan	3
Verba Aktif	Menguatkan	8
Diksi Positif	Menguatkan	11
Diksi Negatif	Melemahkan	6
Kata Ganti	Menguatkan	2

- b) Representasi dalam anak kalimat pada teks berita Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Bentuk	Tujuan	Jumlah Data
Penonjolan Subjek	Menguatkan	2
Nominalisasi	Melemahkan	6
Diksi Positif	Menguatkan	3
Diksi Negatif	Melemahkan	11
Kata Ganti	Menguatkan	4
Verba Pasif	Melemahkan	1

- c) Representasi dalam kombinasi anak kalimat pada teks berita
Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Bentuk	Tujuan	Jumlah Data
Penjelas	Menguatkan	9
Penyebab	Menguatkan	4
Penyebab	Melemahkan	2
Penjelasan Kontras	Melemahkan	4
Penjelasan Kontras	Menguatkan	7

- d) Representasi dalam kombinasi anak kalimat pada teks berita
Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Bentuk	Tujuan	Jumlah Data
Penjelas	Menguatkan	7
Penyebab	Menguatkan	5
Penyebab	Melemahkan	2
Penjelasan Kontras	Melemahkan	5
Penjelasan Kontras	Menguatkan	6

- e) Representasi dalam rangkaian antarkalimat pada teks berita
Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Bentuk	Tujuan	Jumlah Data
Saling Mendukung	Menguatkan	4
Saling Mendukung	Melemahkan	3
Saling Menentang	Menguatkan	5
Saling Menentang	Melemahkan	-

- f) Representasi dalam rangkaian antarkalimat pada teks berita
Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Bentuk	Tujuan	Jumlah Data
Saling Mendukung	Menguatkan	7
Saling Mendukung	Melemahkan	3
Saling Menentang	Menguatkan	1
Saling Menentang	Melemahkan	5

Berdasarkan hasil analisis data pada dimensi teks di atas, dapat dilihat bahwa teks berita tentang pemilihan presiden dan wakil presiden

tahun 2019 yang dipublikasikan oleh *Kompas.com* lebih berpihak kepada pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Keberpihakan tersebut dapat dilihat dari representasi anak kalimat, representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan representasi dalam rangkaian antarkalimat.

B. Praktik Wacana (*Discourse Practice*)

Analisis *discourse practice* (praktik wacana) memusatkan perhatian pada cara teks berita diproduksi dan akhirnya dikonsumsi oleh pembaca atau masyarakat. Praktik wacana yang diterapkan media dapat dianalisis melalui interpretasi pada dimensi teks dan cara media tersebut membuat berita, yakni dimulai oleh wartawan, memasuki ruang editor, dan tidak terlepas dari ideologi yang dibentuk oleh institusi tersebut.

Berdasarkan analisis dimensi teks yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa praktik wacana yang dilakukan oleh *Kompas.com* tentang peristiwa pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2019 mencakup dua hal, yakni dari produksi teks berita dan intertekstualitas.

1. Produksi Teks Berita

Produksi teks berita yang dilakukan oleh media umumnya berdasarkan kebijakan dari direktur media dan pimpinan redaksi yang mengatur arah berita. Dengan demikian, berita yang lahir dari *Kompas.com* tidak hanya ditentukan oleh wartawan, namun tidak terlepas dari campur tangan petinggi-petinggi media tersebut.

Teks berita yang diproduksi oleh *Kompas.com* tentang pemilihan presiden tahun 2019 menampilkan adanya ketidakseimbangan antara

dua pasangan calon. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah berita yang memuat tentang Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dibandingkan dengan berita yang memuat calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Produksi teks yang memuat tentang program tiga kartu milik Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang didapatkan oleh peneliti sebanyak 9 judul berita. Judul berita tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Judul Berita
1	<i>Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja</i>
2	<i>3 Kartu Baru Jokowi Dinilai untuk Tangkal Serangan Kubu Prabowo</i>
3	<i>Fadli Zon Sebut 3 Program Kartu Jokowi sebagai "Jurus Mabuk"</i>
4	<i>BPN Prabowo Nilai Kartu Pra Kerja Jokowi Tak Bagus, Bikin Ketergantungan</i>
5	<i>BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara</i>
6	<i>Jokowi: Tidak Setuju? Orang Ini Program Bagus Kok..</i>

7	<i>Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran</i>
8	<i>Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir</i>
9	<i>Pengamat: Kartu Pra-Kerja Jokowi Konkret, Sementara Gagasan Prabowo Tak Sentuh Bumi</i>

Produksi teks berita yang memuat tentang program tiga kartu pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin tersebut memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan produksi teks berita yang memuat tentang visi misi pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Judul Berita
1	<i>Janji Program Kerja Prabowo-Sandiaga, dari Persoalan Ekonomi, Susu Gratis hingga Ancaman Persekusi</i>
2	<i>Alasan Tim Prabowo-Sandiaga Gunakan Kata "Menyelamatkan Indonesia" di Visi Misi</i>
3	<i>Timses Sebut Prabowo-Sandi Janji Alokasikan 10 Persen Dana Pendidikan untuk Kompetisi Antar-sekolah</i>
4	<i>Solusi Masalah Rokok, Prabowo-Sandi Akan Dorong Petani</i>

	<i>Tembakau Beralih Profesi</i>
--	---------------------------------

Produksi teks berita tentang program tiga kartu pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin terdapat tiga berita yang berisi kritikan terhadap program tiga kartu tersebut oleh pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakni *Fadli Zon Sebut 3 Program Kartu Jokowi sebagai "Jurus Mabuk"*, *BPN Prabowo Nilai Kartu Pra Kerja Jokowi Tak Bagus, Bikin Ketergantungan*, dan *BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara*. Namun, ketiga judul berita tersebut dibantahkan dengan adanya berita dukungan terhadap program tiga kartu tersebut serta berita yang berisi tanggapan dari kritikan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan jumlah yang lebih banyak. Hal serupa juga terlihat pada produksi teks berita yang memuat tentang kecurangan pemilu yang disampaikan oleh pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan judul berita *Prabowo: Katanya Pemilu Jujur, tapi Belum Mulai Sudah Nyoblos Sendiri* mendapatkan tanggapan dengan berita yang berjudul *Kemendagri Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal DPT Tak Wajar, Ini Penjelasannya*.

2. Intertekstualitas

Praktik wacana juga dapat dilihat pada intertekstualitas berita yakni teks berita lain yang memiliki kaitan dengan produksi teks berita yang sedang berlangsung. Keberpihakan media *Kompas.com*

terhadap pasangan calon presiden Joko Widodo memiliki unsur kesejarahan dan dapat dilihat pada teks-teks berita yang telah diproduksi sebelumnya. Seperti pada produksi teks berita tentang pelaksanaan pemilu presiden tahun 2014. Judul berita tersebut dapat dilihat pada table berikut.

No	Judul Berita
1	<i>Cara Kampanye Jokowi Patut Ditiru di Pemilu 2014</i>
2	<i>Jokowi dan "Personality Politics" Penentu Pemilu Presiden 2014</i>
3	<i>Tanpa Jokowi, 2014 Bukan Pemilu</i>
4	<i>MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta</i>
5	<i>Pengamat: Tuduhan Prabowo-Hatta soal Pemilu Curang Tak Meyakinkan</i>
6	<i>Halalkan "Serangan Fajar", Prabowo Dianggap Tidak Paham Pemilu</i>

Judul berita nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 pada tabel di atas berisikan tentang citra calon presiden Joko Widodo yang positif dan diunggulkan. Berbeda dengan judul berita nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 yang memojokkan dan memarginalkan calon presiden

Prabowo Subianto dengan mengonstruksi berita-berita negatif tentang Prabowo Subianto selama masa kampanye.

Intertekstualitas praktik wacana tentang keberpihakan media *Kompas.com* juga dapat dilihat pada teks berita yang mendukung partai PDI-Perjuangan dan Mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri. Dukungan media *Kompas.com* terhadap partai mendukung partai PDI-Perjuangan dan Mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri dapat dilihat pada teks berita berjudul *Jangan Rebut Hak Rakyat* (Sabtu, 20 September 2014).

Megawati menilai, berbagai upaya melalui konsolidasi kekuasaan oleh pihak tertentu untuk mengubah pelaksanaan pemilu langsung harus disikapi secara kritis. "Upaya itu nyata-nyata mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat ke sekelompok elit yang sering kali justru menyalahgunakan kekuasaan," katanya. Megawati berpendapat, perdebatan akhir-akhir ini terkait RUU Pilkada yang ingin dikembalikan ke pemilihan melalui DPRD merupakan sebuah gerak mundur. "Gerak mundur ini dipastikan **tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat karena mencoba mencabut hak politik rakyat,**" kata Megawati.

Berita ini menonjolkan partai PDI-P yang berpihak kepada rakyat dan ditampilkan bahwa partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berketetapan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai reformasi. Calon presiden Joko Widodo tentunya berkaitan erat dengan partai PDI-

Perjuangan karena partai tersebutlah yang mengusung Joko Widodo untuk naik menjadi calon presiden dan ditunjuk oleh Mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri. Dengan kata lain, dilihat dari segi kesejarahannya, media *Kompas* telah menempatkan keberpihakan pada Joko Widodo dan Pengusungnya yakni Megawati Soekarno Putri dari beberapa tahun silam.

C. Praktik Sosiokultural (*Sociocultural Practice*)

Praktik sosiokultural merupakan struktur makro yang telah berada diluar teks (bahasa). Analisis praktis sosiokultural didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media memengaruhi wacana yang muncul di media. Menurut Fairclough, hubungan itu bukan langsung, melainkan dimediasi oleh praktik wacana. Dia menyebutkan tiga level analisis pada praktik sosiokultural ini, yakni situasional, institusional, dan sosial.

1. Situasional

Unsur situasional adalah situasi dan kondisi di mana media memproduksi teks. Teks diproduksi dalam kondisi dan keadaan khusus, karena fakta sebagai unsur berita terdapat beberapa hal yang unik dan khusus yang membuat teks menjadi unik. Jika wacana dipahami sebagai tindakan, maka tindakan adalah respons terhadap situasi atau latar belakang sosial tertentu.

Pembuatan berita oleh wartawan dapat dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di dalam realitas. Wartawan menggambarkan situasi yang

terjadi di negara Indonesia yang berkaitan dengan program Joko Widodo. Situasi yang ditampilkan yakni kebutuhan utama masyarakat yang sejalan dengan program yang ditawarkan oleh Joko Widodo seperti dalam kutipan berita berikut.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut tiga kartu baru yang akan diluncurkannya jika memenangi Pilpres 2019 muncul berdasarkan survei kebutuhan masyarakat. Menurut dia, berdasarkan hasil survei, **kebutuhan utama rakyat berturut-turut ialah harga sembako, pekerjaan, dan pendidikan. Oleh karena itu, Jokowi meluncurkan tiga kartu baru, yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.** "Jadi ketiga kartu ini kita keluarkan berdasarkan survei. Jadi bukan awur-awuran," kata Jokowi yang saat bertemu pengurus dan anggota pengurus dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Tenggara, di Kendari, Sabtu (2/3/2019).

Wartawan melalui pernyataan calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo menampilkan situasi masyarakat Indonesia yang memiliki kebutuhan utama dan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya program yang ditawarkan oleh calon presiden nomor urut 1 tersebut.

Situasi yang ditampilkan wartawan dalam beritanya akan memberi gambaran dan pemahaman kepada pembaca agar pembaca menerima informasi tersebut sebagai sebuah fakta. Dalam berita berikut,

wartawan menjelaskan situasi kepada pembaca tentang protes yang disampaikan oleh kubu pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga dengan menampilkan pernyataan dari pengamat politik.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebutkan, program Kartu Pra-Kerja Joko Widodo merupakan gagasan yang konkret. Meskipun nanti perlu dipikirkan soal pendanannya, namun jangan mencibir program Jokowi itu tanpa memberikan solusi. **"Logika jangan semua yang disampaikan petahana itu buruk. Pola pikirnya jangan hitam dan putih. Menurut saya, kalau program kerja ini dianggap enggak realistis, mestinya dijawab dengan program kerja yang menurut (kubu paslon) 02 realistis,"** kata Adi, di Jakarta, Sabtu (9/3/2019), seperti dikutip Antara. Pernyataan Adi ini menyikapi kritik dari sejumlah kalangan perihal mustahilnya program ini diterapkan.

Situasi tentang program tiga kartu milik calon preseiden nomor urut 1 Joko Widodo yang menuai banyak kritik dari kubu calon presiden nomor urut 2 dijawab oleh wartawan melalui penerbitan berita di atas. Dalam berita tersebut wartawan melalui pengamat politik yang dijadikan sebagai narasumber mematahkan kritikan yang ditujukan oleh program tiga kartu tersebut. Berdasarkan teks berita yang dicetak tebal, situasi dalam berita ditampilkan melemahkan kritikan yang disampaikan kubu

paslon 02 (Prabowo-Sandiaga) dan mengunggulkan program milik calon presiden nomor urut 1.

2. **Institusional**

Produksi teks berita oleh wartawan ditentukan oleh pengaruh internal dan eksternal organisasi media. Pengaruh internal media bersumber dari kalangan pemilik modal media, sementara pihak eksternal adalah organisasi atau lembaga yang berpengaruh terhadap media dan wartawan. Wartawan menuliskan teks berita tentang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 juga dipengaruhi oleh berbagai institusi eksternal yang sesuai dengan ideologi dan instruksi dari institusi media tersebut.

Pada berita berikut ini, peran institusional yang ditampilkan oleh wartawan adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, program baru Presiden RI Joko Widodo seperti Kartu Pra-kerja, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, dan Kartu Sembako Murah harus diapresiasi. Bambang menilai, program tersebut merupakan terobosan baru. "Terobosan itu sudah banyak dilakukan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah, kemudian terobosan kartu kesehatan, dan sekarang kartu untuk tenaga kerja. Menurut saya, ini justru kita harus memberikan apresiasi," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Peran institusional yang ditampilkan wartawan dalam beritanya memiliki pengaruh yang besar terhadap pembaca. Label ketua DPR yang ditampilkan wartawan untuk mendukung program kartu milik pasangan calon nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Secara tidak langsung, wartawan mengambil institusi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai narasumber untuk menggambarkan pendapat dan aspirasi dari rakyat yang disampaikan oleh wakilnya yakni DPR tersebut.

Pemilu 2019 diwarnai dengan adanya dugaan kecurangan yang disampaikan oleh pihak pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pihak paslon nomor urut 2 melaporkan dugaan adanya kecurangan pemilu ditandai dengan adanya data pemilih yang tidak wajar. Olehnya itu, wartawan menampilkan institusi dari Komisi Pemilihan Umum untuk menyampaikan klarifikasi atas adanya laporan dugaan kecurangan dalam pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal 17,5 juta data tak wajar dan 775.000 data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU mengakui, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu. Para pemilih tersebut kebanyakan lahir di bulan Januari, Juli, dan Desember. Data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu disebabkan warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses

administrasi Dukcapil. "Data dengan tanggal lahir tersebut demikian adanya. Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah," kata komisioner KPU, Viryan Azis, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Wartawan melalui institusi KPU menyatakan bahwa dugaan data yang tidak wajar merupakan hal yang keliru sehingga kecurangan pemilu yang disampaikan oleh kubu paslon nomor urut 2 dibantah langsung oleh institusi yang mengatur berlangsungnya pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum.

Wartawan kemudian memperkuat bantahan terhadap kecurangan pemilu yang disampaikan oleh pihak paslon nomor urut 2 dengan menampilkan istitusi Kementerian Dalam Negeri, seperti dalam kutipan teks berita berikut.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang disebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, banyak yang tidak wajar. Ketidakwaajaran itu, menurut BPN, lantaran ada jutaan nama yang memiliki tanggal lahir sama, yakni 31 Desember. Bahkan, ada ratusan ribu nama yang berusia di atas 90 tahun. Temuan ini dianggap janggal oleh BPN Prabowo-Sandiaga. Namun, menurut Zudan, temuan itu justru merupakan

sesuatu yang wajar. "Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember sudah berlangsung lama, semenjak Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," ujar Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Institusi yang ditampilkan wartawan dalam berita tersebut semakin memperkuat bantahan terhadap dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh pihak pasangan calon nomor urut 2. Wartawan menampilkan Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi resmi dalam beritanya untuk mendapatkan fakta yang relevan dan valid di bidang data penduduk sehingga kritik yang disampaikan oleh kubu pasangan calon nomor urut 2 dibantah langsung oleh pakar atau institusi yang menanganinya.

3. Sosial

Media sulit untuk melepaskan diri dari faktor sosial saat memproduksi suatu berita. Aspek sosial dalam analisis Fairclough ini lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini menentukan siapa yang berkuasa, dan nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat. Di dalam penelitian yang berkaitan dengan peran sosial ini dilihat seperti apa media memanfaatkan pengaruh sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung pandangan media terhadap wacana pemilu presiden tahun 2019.

Media memanfaatkan narasumber yang berlabel kelembagaan tertentu dari sisi yang spesifik, misalnya, ilmu pengetahuan, untuk memberi penekanan kepada para pihak untuk berpikir sebagaimana ditawarkan media. *Kompas.com* dalam berita berikut ini memanfaatkan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah untuk menyampaikan pandangannya kepada masyarakat berkaitan dengan program yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebutkan, program Kartu Pra-Kerja Joko Widodo merupakan gagasan yang konkret. Meskipun nanti perlu dipikirkan soal pendanannya, namun jangan mencibir program Jokowi itu tanpa memberikan solusi. "Logika jangan semua yang disampaikan petahana itu buruk. Pola pikirnya jangan hitam dan putih. Menurut saya, kalau program kerja ini dianggap enggak realistis, mestinya dijawab dengan program kerja yang menurut (kubu paslon) 02 realistis," kata Adi, di Jakarta, Sabtu (9/3/2019), seperti dikutip Antara. Pernyataan Adi ini menyikapi kritik dari sejumlah kalangan perihal mustahilnya program ini diterapkan.

Pandangan narasumber tersebut dimanfaatkan media untuk melihat suatu persoalan dari sisi yang lain, seperti kepakaran. Narasumber yang dipilih selalu dilabeli dengan lembaga baik ilmu pengetahuan, sosial politik, maupun budaya tempat narasumber itu

bekerja. Pencantuman nama lembaga seperti ini disesuaikan dengan relevansi pengetahuan narasumber berkaitan dengan masalah yang disoroti akan memperkuat posisi legitimasi pemberitaan media.

Melalui pandangan pakar ini, media dapat meyakinkan khalayak tentang pandangannya sendiri terkait dengan program yang ditawarkan oleh calon pasangan presiden nomor urut 1. Dengan memanfaatkan pandangan pakar tersebut, *kompas.com* dapat mempertahankan legitimasinya sebagai media yang netral dan dapat diterima oleh khalayak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas representasi ideologi media *Kompas* di balik wacana pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Maka pada bab ini akan diberikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

Ideologi media *Kompas* terkait pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 merepresentasikan keberpihakan pada Pasangan Calon Presiden nomor urut 1 yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Keberpihakan tersebut dapat dilihat pada tiga hal terkait dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough yakni dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural.

Berdasarkan analisis data teks berita *Kompas.com* terkait pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 22 teks berita menunjukkan keberpihakan pada pasangan calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan melihat pada dimensi teks yakni representasi anak kalimat, representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan representasi dalam rangkaian antar kalimat sebanyak 13 berita yang mengunggulkan calon presiden nomor urut 1 dan melemahkan calon presiden nomor urut 2. Sedangkan hanya 8 berita yang mengunggulkan pasangan calon presiden nomor urut 2.

Analisis data pada dimensi praktik wacana dapat dilihat dari produksi teks berita yang dikeluarkan oleh *Kompas* lebih banyak memuat tentang pasangan calon presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yakni 9 teks berita tentang program calon presiden nomor urut 1 dan 4 teks berita tentang calon presiden nomor urut 2. Selain itu, bentuk keberpihakan *Kompas* kepada calon pasangan presiden nomor urut 1 dilihat dari produksi teks berita yang berisi pelemahan terhadap calon presiden nomor urut 1 akan dibuat teks berita selanjutnya yang dapat membantah teks berita tersebut.

Analisis data dari segi intertekstualitas, media *Kompas* melakukan praktik wacana dengan mengunggulkan calon presiden Joko Widodo pada pemilu periode tahun 2014 dan menonjolkan dukungan terhadap Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) dan Mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri yang diketahui merupakan partai yang mengusung Joko Widodo untuk maju dalam pemilu presiden tahun 2019.

Analisis data dari segi praktik sosiokultural yang terdiri atas situasional, institusional, dan sosial menunjukkan bahwa teks berita *Kompas.com* sebanyak 5 berita semuanya berisi keberpihakan terhadap calon pasangan presiden nomor urut 1.

Berdasarkan hasil penelitian, media *Kompas* melalui teks berita tentang pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 merupakan media

yang berpihak atau tidak netral dengan menyajikan berita yang tidak berimbang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis ,menyarankan beberapa hal berikut.

1. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali sehingga penelitian AWK perlu dikembangkan terus sebagai masukan untuk menganalisis dan mengembangkan bidang kebahasaan dalam wacana berita.
2. Seiring dengan kemajuan komunikasi dan informasi, media akan dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, diharapkan penelitian AWK dapat dikembangkan lebih lanjut dan ditargetkan pada media massa (cetak, elektronik dan online), sehingga mereka dapat menerapkan kenetralan lebih baik. Produksi teks berita dibuat secara berimbang, tidak saja secara normatif melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan peliputan kedua sisi, tetapi juga keberimbangan dalam porsi konten teks yang diberitakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. Dahlan. 2018. *Keberpihakan Media Terhadap Berita Konflik Partai Golkar: Analisis Wacana Kritis*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Assidik, Karunia Gallant dan B. Wahyudi Joko Santoso. 2016. "Citra Publik Presiden Republik Indonesia pada Pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo, dan Harian Republika Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough". *Jurnal Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 5 (2). Universitas Negeri Semarang.
- Badara, Aris. 2014. *Analisis Wacana-Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eriyanto.2003. *Analisis Wacana-Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. Terjemahan oleh Indah Rohani. Malang: Boyan Publishing.
- _____. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman
- Fairclough, Norman dan Ruth Wodak. 1997. *Critical Discourse Analysis*. In T.A. van Dijk (ed). *Discourse as Social Interaction*. London: Sage.
- Fauzan, Umar. 2014. "Analisis Wacana Kritis dari Model Faiclough hingga Mills." *Jurnal Pendidik*. 6 (1).STAIN Samarinda.
- Hall, Stuart (Ed.). 1997. *Representation: Cultural Representations dan Signifying Practices*. London: Sage Publications.
- Haryatmoko, 2019. *Critical Discourse Analysis*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jorgensen, Marianne W. dan Luise J. Philips. 2010. *Discourse Analysis: Theory and Method*. Diterjemahkan oleh Imam Suyitno, dkk. dengan judul: *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Cet. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Maghvira, Genta. 2017. "Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Tempo.Co tentang Kematian Taruna Stip Jakarta". *Jurnal The Messenger*. 9 (2): 122.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, Asep Saepul. 1999. *Jurnalistik Prndekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Munfarida, Elya. 2014. "Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough" *Komunika*. 8 (1)
- Muslich, Masnur. 2008. *Kekuasaan Media Massa Mengonstruksi Realitas*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Nasir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Santoso, Anang. 2012. *Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Setiawan, T., 2014. Ancangan awal praktik analisis wacana kritis. *Diksi*, 2(22).
- Sinar, Tengku Silvana. 2008. *Teori dan Analisis Wacana-Pendekatan Sistemik – Fungsional*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Subroto. 1992. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Sudarman, Paryati. 2008. *Menulis di Media Massa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Suntama (2016). *Representasi Komunikasi Politik Jokowi (Analisis Wacana Pemberitaan Blusukan Jokowi di Koran Kompas dan Republika)*. (Tesis). Jakarta (D): Universitas Mercu Buana.

- Taylor, SJ dan R Bogdan. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*, Second Edition. John Wiley and Sons. Toronto.
- Thomas, Linda & Shan Wareing. 1999. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyawari, Caecilia Petra Gading May. 2016. *Representasi Ideologi dalam Tuturan Santun Pejabat Negara Pada Talk Show Mata Najwa* (Tesis). Semarang (ID): Universitas Negeri Semarang.
- Wulandari, Yosi. 2012. "Pendayagunaan Struktur Teks Wacana Kesejahteraan Rakyat dalam Tajuk Rencana Harian Kompas". *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*. 24 (2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

LAMPIRAN

Lampiran berita 1

Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan kartu baru yang menjadi program yang ditawarkannya jika kembali terpilih pada Pemilihan Presiden 2019. Sejumlah program itu disampaikan Jokowi dalam pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Kartu baru yang disebutkan Jokowi adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), dan Kartu Pra-kerja. Jokowi memamerkan satu per satu contoh kartu tersebut saat menyebutnya dalam pidato.

Berikut ini adalah kartu baru yang menjadi program Jokowi:

1. Kartu Sembako Murah

Jokowi pertama kali menunjukkan Kartu Sembako Murah. Kartu ini menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jokowi mengatakan, KIP dibuat untuk menjamin anak Indonesia bisa terus bersekolah tanpa hambatan ekonomi. Sementara, KIS menjamin kesehatan masyarakat dan memastikan mereka tidak jatuh miskin ketika ada anggota keluarga yang sakit. "Tetapi semua hal itu tidak cukup, saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat," kata Jokowi

"Maka Program Keluarga Harapan (PKH) akan saya perkuat dengan program Kartu Sembako Murah," tambah dia sambil menunjukkan kartunya. Relawan yang hadir langsung bertepuk tangan dan bersorak.

2. KIP kuliah

Program kedua adalah KIP-Kuliah. Jokowi mengatakan, sudah ada 18,7 juta siswa yang mendapatkan manfaat KIP. Namun, pelajar yang merasakan manfaat KIP hanya sampai tingkat SMA. Jokowi ingin jaminan pendidikan itu bisa dilanjutkan hingga kuliah. Dia pun membuat program baru yaitu KIP-Kuliah. "Kartu Indonesia Pintar yang sekarang hanya sampai di SMA, akan kami jadikan sampai kuliah. Artinya Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini akan

membantu biaya pendidikan. Membantu biaya pendidikan dari anak usia dini hingga kuliah dengan kartu ini," kata dia

3. Kartu Pra-kerja

Jokowi mengatakan, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, sebenarnya lapangan kerja yang tercipta semakin banyak. Namun, masyarakat juga harus semakin meningkatkan keterampilan mereka. Untuk mendukung itu, kata Jokowi, pemerintah sudah punya berbagai program vokasi. Program vokasi itu akan diperkuat dengan program baru yaitu Kartu Pra-kerja. Kartu ini akan membantu para pencari kerja meningkatkan keterampilan mereka. "Saya akan meluncurkan kartu pra-kerja untuk memberikan layanan pelatihan vokasi. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan," ujar Jokowi.

Lampiran berita 2

3 Kartu Baru Jokowi Dinilai untuk Tangkal Serangan Kubu Prabowo

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, calon presiden petahana Joko Widodo mempunyai alasan khusus dalam memperkenalkan tiga kartu sakti barunya di masa kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, tiga kartu baru itu yakni Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah, bukan semata-mata untuk melengkapi kartu-kartu dan program yang sudah ada. Lebih dari itu, pengenalan tiga kartu tersebut dinilainya untuk menjawab kritik hingga serangan yang kerap disampaikan kubu Prabowo Subianto. "Ini jurus pamungkas yang digunakan paslon 01 untuk membantah semua narasi kubu 02 soal pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pangan," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (28/2/2019)

Menurut Ujang, tiga kartu ini setidaknya dapat mengambil dua ceruk suara pemilih. KIP kuliah dan kartu pra kerja akan dapat menarik perhatian para milenial yang jumlahnya sangat besar pada pilpres kali ini. Sementara, kartu sembako murah bisa menarik simpati dari emak-emak. "Tapi apakah itu akan efektif, tergantung. Karena dalam konteks program incumbent jika dia dikelola dengan baik maka tentu akan ada hasil dampak terhadap elektoral. Begitu pun sebaliknya," ujar Ujang.

Terlepas apakah akan efektif atau tidak untuk menggaet pemilih, Ujang menilai, Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah mulai berani menjanjikan program-program yang konkret kepada masyarakat. Sementara, kubu Prabowo-Sandiaga dinilainya belum mampu membuat program pamungkas seperti milik Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, kubu Prabowo-Sandi lebih banyak membangun narasi negatif dan sporadis dari isu lama. "Karena narasi yang dikembangkan adalah program yang tidak ada maka serangan itu mudah dipatahkan oleh 01," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Political Review ini.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan kartu baru yang menjadi programnya. Hal ini dia sampaikan dalam pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center, Minggu (24/2/2019). Kartu baru yang disebutkan Jokowi adalah Kerti Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), dan Kartu Pra-kerja.

Lampiran berita 3

Fadli Zon Sebut 3 Program Kartu Jokowi sebagai "Jurus Mabuk"

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir program-program baru yang dicetuskan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Menurut dia, cara ini dipakai karena elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak kunjung mengalami kenaikan jelang Pemilu 2019. "Ini menurut saya adalah jurus mabuk gitu ya. Jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Fadli menganggap, program kartu-kartu yang ada sebelumnya banyak yang gagal. Fadli juga menyoroti pemberian tunjangan hari raya (THR) yang dipercepat oleh Jokowi. Menurut dia, ini juga bagian dari jurus mabuk itu. Fadli mengatakan, Jokowi tengah panik sehingga menggunakan segala cara untuk menang. Termasuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam kapasitasnya sebagai presiden.

"Sudahlah jangan menghina akal sehat kita bahwa ini adalah cara-cara politik untuk memenangkan pilpres dengan menggunakan segala macam resources yang ada," ujar Fadli. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan kartu baru yang menjadi programnya. Hal ini dia sampaikan dalam pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center, Minggu (24/2/2019). Kartu baru yang disebutkan Jokowi adalah Kerti Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), dan Kartu Pra-kerja.

Lampiran berita 4

BPN Prabowo Nilai Kartu Pra Kerja Jokowi Tak Bagus, Bikin Ketergantungan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik program Kartu Pra Kerja capres petahana Joko Widodo. Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ledia Hanifa menilai program tersebut bisa membuat ketergantungan karena pemegang kartu tetap digaji meskipun belum mendapat pekerjaan. "Enggak bagus juga. Seharusnya lebih dilatih lebih baik supaya mereka bisa berkembang. Karena kalau enggak, ketergantungannya cukup besar," kata Ledia dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Ledia juga menilai, Kartu Pra-Kerja tidak bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Menurut dia, salah satu solusi mengatasi pengangguran adalah menyiapkan kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan pencari kerja. "Sebetulnya enggak usah ada kartu itu. Yang paling penting bagaimana menyiapkan anak-anaknya. Kalau sudah disiapkan, juga dibuat *link and match* dunia usaha dengan sekolah dan kampus, itu bisa," ujarnya.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sebelumnya menyebut pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan. Hal itu disampaikan Jokowi saat ngopi bareng milenial di Kendari, Jumat (1/3/2019).

Menurut Jokowi, para pemegang kartu itu mulanya akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki. Namun, jika memang setelah pelatihan dilakukan namun pemegang kartu pra kerja tetap belum mendapatkan pekerjaan, maka ia akan mendapat honor dari pemerintah. "Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," kata Jokowi

Lampiran berita 5

BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso menuturkan bahwa gagasan satu kartu untuk mengakses seluruh program pemerintah merupakan gagasan alternatif yang ditawarkan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Gagasan alternatif itu sekaligus menjadi kritik terhadap program tiga kartu yang menjadi andalan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut Priyo, program tiga kartu Jokowi-Ma'ruf berpotensi menjadi beban anggaran negara "Itu adalah alternatif, karena pembikinan kartu-kartu pasti membebani anggaran negara," ujar Priyo dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Priyo mengatakan, memasuki era digital seperti saat ini pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk mengakses seluruh program pemerintah sangat dimungkinkan. Di sisi lain, kata Priyo, saat debat, Sandiaga optimistis dapat memanfaatkan sistem teknologi *Single Identification Number* yang terdapat dalam e-KTP. "e-KTP ini yang dicoba ditawarkan terhadap hiruk pikuk kubu sebelah dalam menawarkan tiga kartu," kata Sekjen Partai Berkarya itu.

Pada saat debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019), calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo. Ke-tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja. Namun program tersebut mendapat kritik dari rival debatnya Sandiaga Uno. Ia menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, Sandiaga enggan mengeluarkan program berbasis kartu apabila terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Sandiaga, e-KTP dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah. Artinya masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah. Dari mulai akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah. "Jadi cukup membawa

kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapatkan layanan," kata Sandiaga. "Bagi kami, kita sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk KTP elektronik dan ada chip teknologi, revolusi industri 4.0, ada digital ekonomi di belakang KTP kita," ucapnya.

Meski konsep *single identity number* belum sepenuhnya sempurna, Sandiaga yakin hal itu akan dapat diatasi. Ia mengatakan, Indonesia memiliki banyak anak-anak muda yang mampu berinovasi dalam bidang teknologi. "Dengan terobosan inovasi, dengan pendekatan digital sangat mudah dilakukan. Kita punya programmer-programmer canggih. Kita punya anak-anak muda yang memiliki kemampuan khusus untuk teknologi digital ini. Jadi itu harapan kita," tutur Sandiaga.

Lampiran berita 6

Jokowi: Tidak Setuju? Orang Ini Program Bagus Kok...

Calon presiden petahana Joko Widodo heran mengapa ada pihak yang tidak setuju terhadap program tiga kartu barunya. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam acara kampanye terbuka perdana di Stadion Yusuf Maulana, Kota Serang, Banten, Minggu (24/3/2019) sore.

"Ada yang tidak setuju? Kalau ada, maju ke depan sini, saya berikan sepeda," ujar Jokowi disambut tepuk tangan dan keriuhan. orang ini program bagus, kok tidak setuju," lanjut dia. Tiga kartu program baru Jokowi itu, yaitu Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Prakerja. Jokowi menjelaskan, melalui KIP Kuliah, anak miskin yang berniat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

KIP Kuliah ini menyempurnakan KIP yang selama 4,5 tahun terakhir telah dibagikan kepada 13 juta penerima tingkat SD, SMP dan SMA. Sementara, Kartu Sembako ke depannya dapat digunakan khusus untuk ibu-ibu untuk mendapatkan diskon sembilan bahan pokok. Adapun, Kartu Prakerja bakal menyasar para lulusan sekolah yang baru mencari pekerjaan dan orang yang hendak berpindah pekerjaan.

Dengan kartu ini, saudara-saudara akan dilatih di BUMN, kementerian, BLK, baik di dalam maupun luar negeri. Ini akan kita lakukan besar-besaran di tahun depan," ujar Jokowi. Ia juga memastikan, pemegang kartu itu akan mendapatkan insentif selama maksimal 1 tahun apabila belum mendapatkan pekerjaan.

Lampiran berita 7

Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut tiga kartu baru yang akan diluncurkannya jika memenangi Pilpres 2019 muncul berdasarkan survei kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei, kebutuhan utama rakyat berturut-turut ialah harga sembako, pekerjaan, dan pendidikan. Oleh karena itu, Jokowi meluncurkan tiga kartu baru, yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. "Jadi ketiga kartu ini kita keluarkan berdasarkan survei. Jadi bukan awur-awuran," kata Jokowi yang saat bertemu pengurus dan anggota pengurus dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Tenggara, di Kendari, Sabtu (2/3/2019).

Dengan Kartu Prakerja, lulusan SMA atau SMK, perguruan tinggi, serta korban PHK akan mendapat pelatihan untuk memasuki industri serta mendapat uang saku dalam jangka waktu tertentu. Kartu Indonesia Pintar Kuliah memungkinkan anak-anak Indonesia dari keluarga tidak mampu bisa menempuh ilmu di perguruan tinggi.

Adapun Kartu Sembako akan membuat warga mendapat diskon saat membeli kebutuhan pokok. Jokowi meminta tim suksesnya di Sulawesi Tenggara membantu menyosialisasikan ketiga kartu tersebut. "Saya berikan tiga senjata ini untuk menjelaskan ke masyarakat apa yang akan kita kerjakan ke depan," kata Jokowi disambut sorak-sorai pendukungnya.

Lampiran berita 8

Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, program baru Presiden RI Joko Widodo seperti Kartu Pra-kerja, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, dan Kartu Sembako Murah harus diapresiasi. Bambang menilai, program tersebut merupakan terobosan baru. "Terobosan itu sudah banyak dilakukan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah, kemudian terobosan kartu kesehatan, dan sekarang kartu untuk tenaga kerja. Menurut saya, ini justru kita harus memberikan apresiasi," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Bambang juga menanggapi adanya pandangan bahwa salah satu program baru Jokowi, yaitu Kartu Pra-kerja, tidak ideal dengan kondisi finansial negara. Sebab Jokowi akan menggaji pemegang kartu tersebut meski belum mendapat pekerjaan. Bambang mengatakan, justru ini adalah tugas negara untuk mencari anggarannya. Negara wajib memenuhi. "Jadi bukan soal ada duitnya atau tidak, tetapi justru kewajiban negara mencari sumber-sumber pendapatan negara untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya. Itu dijamin dalam konstitusi," ujar Bambang.

Bambang juga tidak mempermasalahkan Jokowi yang baru mengeluarkan program ini menjelang pemilu 2019. Menurut dia, semua pemerintah memiliki proses masing-masing. Pada awal pemerintahan, Bambang menilai, Jokowi fokus memperjuangkan KIP dan KIS. Setelah berhasil diterapkan, bukan hal aneh jika Jokowi mengembangkannya dalam bentuk kartu lain. "Itulah terobosan yang dilakukan oleh Presiden. Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir," kata dia.

Lmpiran berita 9

Pengamat: Kartu Pra-Kerja Jokowi Konkret, Sementara Gagasan Prabowo Tak Sentuh Bumi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebutkan, program Kartu Pra-Kerja Joko Widodo merupakan gagasan yang konkret. Meskipun nanti perlu dipikirkan soal pendanannya, namun jangan mencibir program Jokowi itu tanpa memberikan solusi. "Logika jangan semua yang disampaikan petahana itu buruk. Pola pikirnya jangan hitam dan putih. Menurut saya, kalau program kerja ini dianggap enggak realistis, mestinya dijawab dengan program kerja yang menurut (kubu paslon) 02 realistis," kata Adi, di Jakarta, Sabtu (9/3/2019), seperti dikutip Antara. Pernyataan Adi ini menyikapi kritik dari sejumlah kalangan perihal mustahilnya program ini diterapkan.

Politisi PKS Fahri Hamzah, misalnya, menyebut Kartu Pra-Kerja tidak masuk akal karena menurut dia tidak ada dana untuk untuk membiayai program ini. Waketum Gerindra Fadli Zon bahkan menyebut Kartu Pra-Kerja ini impian kosong, politis, dan norak. Adi menyarankan kepada pendukung pasangan Prabowo-Sandi selaku penantang untuk menjawab Kartu Pra-Kerja dengan program serupa yang dianggap lebih masuk akal untuk memfasilitasi kelompok lulusan SMA dan SMK dalam mengakses pekerjaan. "Bukan hanya mengatakan itu program tidak rasional, enggak ada dananya, kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Ini kan, menurut saya, cara-cara yang ingin menyederhanakan sesuatu dengan lapor melapor.

Mestinya Ini dilawan dengan program lain yang rasional," imbuh Adi. Dia juga mengkritisi cara-cara pasangan calon Prabowo-Sandi memberikan solusi permasalahan, yang hanya terfokus pada 100 hari kerja. Menurut Adi, dalam menjawab program kerja petahana idealnya kubu penantang bisa menyuguhkan gagasan yang lebih brilian dan rasional dalam mempermudah akses pendidikan, mengatasi lonjakan calon-calon tenaga kerja, dan mahalnnya harga-harga bahan pokok.

Kendati demikian, Adi sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendanaan dari program ini tetap harus dipikirkan secara matang dan terukur. "Isu dari mana (uangnya) itu memang perlu dijawab. Apakah akan diambil dari pengetatan dana Badan dan Kementerian, pajak, atau nambah

utang sekalipun itu enggak soal selama itu untuk kebaikan rakyat miskin," ujarnya. "Selama itu untuk kebaikan anak-anak muda kita supaya bisa memiliki pekerjaan. Jangan sampai sirkulasi keuangan ini hanya berkutat pada kelompok-kelompok menengah tertentu," tambah Adi.

Selama ini masyarakat juga tidak pernah membayangkan pembangunan infrastruktur yang jor-joran itu ada uangnya, bahkan dananya dari mana enggak jelas, tapi dalam praktiknya infrastruktur jelas. "Banyak lubang untuk mengeluarkan dana. Misalnya, dari pengetatan dana pengeluaran kementerian. Artinya semua kementerian itu dipaksa mengencangkan ikat pinggang biar dananya dialokasikan untuk infrastruktur. Itu kan salah satu upaya. Dulu infrastruktur juga dicibir dianggap gak realistis, duitnya gak ada. Buktinya ada. Setelah dana-dana BUMN, dana pajak juga diambil," tuturnya.

Adi mengatakan, cita-cita dari program ini besar agar anak-anak muda tidak jadi pengangguran dan lulusan-lulusan SMA dan SMK punya "skill" di bidang usaha dan pekerjaan. "Apa itu salah? Semua diawali dari ide," ucapnya. Adi tidak menampik jika program ini akan memiliki insentif elektoral untuk Jokowi, sekaligus mengesankan kubu 02 panik dengan kartu prakerja ini. "Tentu (berpengaruh). Karena ini program populis dan visi misi Jokowi dari tiga kartu ini lebih detail. Artinya ketika ditanya bagaimana ibu-ibu bisa mengakses barang mudah, jawabannya ya sederhana dikasih kartu sembako murah, ketika ditanya anak muda bisa kerja, dikasih keterampilan lalu disubsidi," ujar Adi.

Menurut Adi, hal itu lebih kongkret daripada jawaban kubu Prabowo-Sandi yang selalu bersifat umum dengan jawaban 100 hari kerja. "Prabowo sebenarnya semangatnya sama ingin membantu rakyat, tapi jawabannya semua akan diselesaikan dalam program 100 hari. Tidak ada basis argumentasi yang detail. Prabowo selalu berlindung di bawah narasi besar, tapi gagasan yang menyentuh bumi enggak ada. Lebih banyak retorika besarnya, tapi gagasan operasionalnya kering," kata Adi Prayitno.

Lampiran berita 10

Janji Program Kerja Prabowo-Sandiaga, dari Persoalan Ekonomi, Susu Gratis hingga Ancaman Persekusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi andalannya terkait Pilpres 2019. Visi misi tersebut ia paparkan saay menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam.

Dalam pidatonya, Prabowo menjabarkan lima fokus program kerja nasional bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno jika keduanya terpilih. Kelima fokus program kerja itu kemudian ia jabarkan lagi melalui sejumlah janji-janji politik, dari soal penciptaan lapangan kerja, penyediaan susu gratis hingga penghentian ancaman persekusi terhadap kelompok minoritas.

Berikut lima fokus program kerja nasional pasangan Prabowo-Sandiaga:

Fokus pertama: Ekonomi yang mengutamakan rakyat, adil, makmur, berkualitas dan berwawasan lingkungan

1. Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat
2. Memastikan BUMN kuat dan tidak merugi
3. Pemberdayaan dan pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Kecil
4. Memastikan utang tidak membengkak
5. Mengubah jutaan hektar hutan yang sudah rusak jadi hutan produktif untuk produksi pangan, energi dan air bersih
6. Pendirian bank tani dan nelayan
7. Kepastian hukum untuk para pengemudi ojek online, taksi, bis dan penentuan tarif minimal yang menguntungkan pekerja dan pengusaha
8. Perbaikan penghasilan prajurit TNI, polisi, hakim dan jaksa yang bertugas di daerah terpencil.

Fokus kedua: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial

1. Perbaikan gaji guru honorer dan tenaga kesehatan
2. Perbaikan tata kelola BPJS dan jaminan sosial lainnya
3. Memperkuat program Keluarga Berencana
4. Penyediaan susu gratis bagi anak sekolah

5. Pembangunan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas
6. Perbaikan kualitas sekolah, universitas hingga pondok pesantren dan madrasah
7. Membangun Lembaga Tabung Haji
8. Negosiasi dengan Arab Saudi untuk membangun gedung milik Indonesia untuk mengurangi biaya naik haji.

Fokus ketiga: Memastikan keadilan hukum dan menjalankan demokrasi yang berkualitas

1. Menjamin kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan pers
2. Menghentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi dan insan pers yang berseberangan pendapat dengan pemerintah
3. Membebaskan dari ancaman kriminalisasi
4. Memastikan tidak ada organisasi yang terstigma dan dihakimi tanpa proses pengadilan
5. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih
6. Memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman
7. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga daerah.

Fokus keempat: Menjadikan Indonesia rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Memastikan TNI menjadi angkatan pertahanan yang kuat dan bertaraf dunia
2. Meningkatkan kemampuan kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi bentuk kejahatan baru
3. Meningkatkan kemampuan negara dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, penanganan cepat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kasus-kasus bencana alam.

Fokus kelima: Penguatan karakter dan kepribadian bangsa: Melakukan proses pembangunan karakter.

Lampiran berita 11

Alasan Tim Prabowo-Sandiaga Gunakan Kata "Menyelamatkan Indonesia" di Visi Misi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno sudah memasukkan dokumen visi misinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dirilis ke publik melalui situsweb KPU. Pasangan calon nomor urut dua itu menjabarkan visi misinya dalam 4 pilar besar.

Salah satu yang menjadi fokus pasangan ini adalah pilar bidang ekonomi. Dalam salah satu butir pilar ekonomi tersebut, Prabowo-Sandiaga menilai perlunya penyelamatan Indonesia di bidang ekonomi. Bunyi lengkap butir ini adalah "Menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan di bidang ekonomi, dengan mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan mampu bersaing di tingkat dunia".

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo mengatakan, penggunaan kata "Menyelamatkan Indonesia" di butir pilar ekonomi bukan tanpa alasan. "Butir tersebut dasar pertimbangannya adalah, Indonesia tidak boleh lagi hanya mengandalkan kekayaan alam sebagai tulang punggung ekonomi," ujar Dradjad kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Dradjad yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini terlalu mudah digoyang oleh faktor eksternal karena rapuhnya sumber-sumber pertumbuhan domestik. Ia mencontohkan, industri yang terlalu bertumpu pada industri primer, ekspor terlalu mengandalkan komoditas, dan dominansi impor dalam proses produksi dan konsumsi terlalu tinggi. Sementara, sumber daya manusia dinilai belum menjadi sumber kekuatan ekonomi. "Jadi ada kelemahan mendasar yang membuat ekonomi mudah goyang seperti sekarang," kata dia.

Menurut Dradjad, Prabowo-Sandiaga akan menjadikan kondisi ekonomi tersebut sebagai fokus dalam visi misinya. Pengembangan sumber daya manusia akan dijadikan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan kreativitas, kata Dradjad, akan menjadi motor, baik untuk sektor seperti pengolahan hasil pertanian hingga ke sektor modern seperti ekonomi digital dan pengembangan IT.

Inovasi dan kreativitas bisa menghasilkan para usahawan muda. Ia menyebutkan, di Italia, para usahawan muda mampu mengolah limbah hasil pertanian seperti jeruk menjadi tekstil untuk industri fashion di negara tersebut. Di AS dan Eropa Barat, para pengusaha muda bisa menghasilkan outlet ritel kopi dengan nama-nama besar. Di Singapura, muncul para traders muda. Sementara, di Indonesia, inovasi dan kreativitas itu bisa menghasilkan orang seperti CEO Go-jek Nadiem Makarim. "Sayangnya, Nadiem ini adalah hasil inisiatif individual. Negara kurang atau bahkan tidak hadir dalam menyiapkan 'pemenang' seperti Nadiem," ujar Dradjad. "Inilah salah satu pilar kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi. Rinciannya banyak. Tapi bahasa gampang, negara harus pro-aktif dan menginvestasikan dana APBN yang memadai untuk menghasilkan lebih banyak lagi Nadiem baru," lanjut dia.

Lampiran berita 12

Timses Sebut Prabowo-Sandi Janji Alokasikan 10 Persen Dana Pendidikan untuk Kompetisi Antar-sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen untuk menghidupkan kompetisi siswa antar-sekolah jika terpilih pada Pilpres 2019. Dahnil mengatakan, 10 persen dari dana pendidikan dalam anggaran negara akan difokuskan untuk menggelar kompetisi, mulai dari bidang ilmu pengetahuan hingga olahraga. "Kita berkomitmen, 10 persen dari dana pendidikan itu difokuskan pada menghidupkan semangat kompetisi. Semua jenis kompetisi mulai dari sains sampai dengan olahraga," ujar Dahnil dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Terkait dengan isu kesehatan, kata Dahnil, Prabowo-Sandiaga berencana menggelar kompetisi olahraga setiap tahunnya. Sementara di banyak negara maju, liga sekolah telah menjadi laboratorium untuk mencari atlet-atlet berbakat di berbagai cabang olahraga. "Kalau di beberapa negara maju, liga-liga sekolah itu menjadi laboratorium utama para atlet-atlet hebat. Atlet-atlet basket itu lahir dari liga-liga sekolah dan liga-liga kampus," tutur Dahnil.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan kompetisi tersebut nantinya akan mensinergikan antar-kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Olahraga, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, kompetisi akan menjadi tradisi antarsekolah dan kampus yang bergulir setiap tahun. "Semuanya saling terkait untuk menghidupkan tradisi kompetisi ini. Kompetisi sepakbola antar sekolah, antar kampus, itu harus hidup setiap tahun. Terus bergulir, harus hidup," kata Dahnil. "Dana pendidikan itu minimal 10 persen itu harus digunakan untuk kompetisi-kompetisi seperti ini," ucap mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Lampiran berita 13

Solusi Masalah Rokok, Prabowo-Sandi Akan Dorong Petani Tembakau Beralih Profesi

Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyebut, program pengendalian produksi tembakau akan menjadi perhatian dalam debat ketiga Pilpres 2019. Anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, mengungkapkan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memberikan solusi agar pengguna rokok di Indonesia bisa menurun. Menurut dia, yang perlu dibereskan adalah hulu masalah industri rokok, yaitu mendorong petani tembakau untuk beralih profesi di bidang lain.

"Kita naikkan cukai pun, tapi selama budaya dan perilaku masyarakat merokok tidak berubah serta petani yang menggantungkan diri di tembakau, ya tidak akan selesai," ujar Hermawan saat ditemui dalam sebuah diskusi bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga Pilpres 2019 di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019). Maka dari itu, lanjut Hermawan, yang perlu dibenahi adalah alternatif dan sumber kesejahteraan petani tembakau.

Dia menyebutkan, jika Prabowo-Sandiaga terpilih, petani tembakau akan didorong beralih ke industri lain dengan menambah anggaran untuk industri tertentu, misalnya ekonomi kreatif. "Anggaran untuk industri ekonomi kreatif akan kami tambahkan. Maka, petani dengan sendirinya akan mudah teralihkan dari yang awalnya menjadi petani tembakau ke industri kreatif," ungkapnya.

Meskipun tidak mudah, Hermawan meyakini Prabowo-Sandiaga memiliki kemauan politik yang kuat agar jumlah pengguna rokok bisa menurun. Dia mengatakan, tim kesehatan BPN sudah membuat rencana dan merancang program kesehatan yang bisa dipaparkan Sandiaga saat debat ketiga. Adapun tema debat ketiga ialah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

Lampiran berita 14

Prabowo: Katanya Pemilu Jujur, tapi Belum Mulai Sudah Nyoblos Sendiri

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung kasus surat suara tercoblos di Malaysia untuk pasangan rivalnya, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Katanya pemilu jujur, bersih, adil, tapi belum mulai saja udah ada yang nyoblos nyoblos sendiri," kata Prabowo saat menghadiri deklarasi dukungan dari Aliansi Advokat Indonesia Bersatu di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Prabowo menyesalkan terjadinya dugaan kecurangan ini. Ia menilai pemilu yang tidak jujur adalah bentuk pelanggaran dan penggunaan terhadap kehendak rakyat. Ia pun mengibaratkan kecurangan ini layaknya permainan sepak bola.

"Manusia tidak suka dibohongi, tidak suka dicurangi. Ibarat main sepak bola kita lihat wasit tidak netral, memihak satu kesebelasan, hakim garis demikian, semua aturan dilanggar. Kita mau enggak ikut main dalam pertandingan seperti itu?" kata Prabowo. "Manusia yang normal tidak mau dan saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia manusia yang normal. Manusia yang punya akal sehat.

Prabowo mengingatkan bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah pintar. Rakyat tidak mau terus dibohongi dan dicurangi. "Walau pun miskin tapi rakyat Indonesia punya harga diri," sambung Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Dalam acara yang sama, pimpinan aliansi Advokat Indonesia Bersatu Otto Hasibuan menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya siap melawan secara hukum apabila ada kecurangan. "Lakukan langkah hukum jika ada kecurangan. Hari ini kita lihat, di Malaysia ada kecurangan, sangat menyedihkan," kata dia. Sebelumnya, beredar video amatir yang menunjukkan temuan surat suara sudah tercoblos. Surat suara itu disebut dimuat dalam puluhan kantong. Diduga, hal ini terjadi di Selangor, Malaysia. Informasi dalam video tersebut, surat suara tercoblos untuk caleg Partai Nasdem. Sementara surat suara Pilpres, tercoblos untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Lampiran berita 15

Kubu Prabowo-Sandiaga Nilai Wajar jika Masyarakat Ragukan Kredibilitas KPU

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Yandri Susanto menilai wajar jika ada sebagian masyarakat yang khawatir mengenai rendahnya profesionalitas atau kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yandri memandang fenomena tersebut sebagai bentuk kepedulian sekaligus kontrol dari masyarakat agar penyelenggara pemilu dapat bersikap netral. "Nah kekhawatiran-kekhawatiran itu sih menurut saya wajar-wajar saja. Sehingga kontrol masyarakat itu kan berjalan," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Yandri menuturkan, kekhawatiran masyarakat terkait kredibilitas KPU menjadi wajar jika melihat dari berbagai persoalan yang muncul belakangan ini. Ia menyinggung masalah dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPT_{hp}) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

Kemudian politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung masalah 103 warga negara asing yang memiliki e-KTP dan masuk DPT. "Jadi kalau hari ini ada sebagian masyarakat yang meragukan kredibilitas KPU, ya enggak apa-apa, terima saja, itu bagian dari kontrol," kata Yandri. "Tdk perlu juga merasa tersudutkan, merasa terdegradasi atau tidak legitimate lagi, enggak perlu. Dia (KPU) tetap fokus saja dengan kerja-kerja riilnya. Sehingga masyarakat diperlihatkan kepada publik ya memang KPU profesional," tutur dia.

Lampiran berita 16

KPU Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal 17,5 juta data tak wajar dan 775.000 data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU mengakui, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu. Para pemilih tersebut kebanyakan lahir di bulan Januari, Juli, dan Desember. Data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu disebabkan warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil. "Data dengan tanggal lahir tersebut demikian adanya. Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah," kata komisioner KPU, Viryan Azis, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa. Hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 1 bulan 12, dan tanggal 1 bulan 1," katanya. Menurut Viryan, data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014. Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar.

"Ini bukan data tidak wajar, melainkan data yang secara administrasi kependudukan demikian adanya," ujarnya. Viryan menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sementara itu, mengenai dugaan 775.000 data ganda yang disampaikan BPN, Viryan menyebut bahwa potensi data ganda itu sudah disampaikan KPU ke BPN pada Februari. Ia mengatakan, sejak September 2018 pihaknya terus berkoordinasi dengan Partai Gerindra untuk menyerahkan pembaruan jumlah potensi data ganda. Potensi data ganda itu saat ini tengah diklarifikasi oleh jajaran KPU daerah. "Selama kami temukan itu ganda, pasti kami akan coret, sama seperti data WNA, orang meninggal, itu satu kelompok. Kami menyebutnya perbaikan DPT," kata Viryan.

BPN Prabowo-Sandiaga menemukan 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Data tersebut didapat BPN dari hasil pemerhatian mereka terhadap DPT hasil perbaikan II (DPT_{hp}) yang dirilis KPU 15 Desember 2018. "Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata juru kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). Tak hanya itu, BPN juga menemukan ada 775.248 data ganda dalam DPT Pemilu 2019.

Lampiran berita 17

Kemendagri Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal DPT Tak Wajar, Ini Penjelasan

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang disebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, banyak yang tidak wajar. Ketidakwajaran itu, menurut BPN, lantaran ada jutaan nama yang memiliki tanggal lahir sama, yakni 31 Desember. Bahkan, ada ratusan ribu nama yang berusia di atas 90 tahun. Temuan ini dianggap janggal oleh BPN Prabowo-Sandiaga. Namun, menurut Zudan, temuan itu justru merupakan sesuatu yang wajar. "Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember sudah berlangsung lama, semenjak Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," ujar Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Ketika Dukcapil Kemendagri menggunakan SIMDUK, sebelum tahun 2004, seluruh penduduk di Indonesia yang lupa atau tidak tahu akan tanggal lahirnya, akan dituliskan lahir pada tanggal 31 Desember pada kartu identitasnya. Kemudian, pada 2004, Dukcapil menggunakan (SIAK) Sistem Informasi Kependudukan dalam pengelolaan data base warga negara Indonesia. Sejak menggunakan SIAK, warga negara yang tak mengetahui atau lupa akan tanggal lahirnya, akan ditulis lahir pada 1 Juli.

"Bila dia tidak ingat tanggal, tapi ingat bulannya, maka ditulis tanggal 15 dengan bulan lahir yang dia ingat," papar Zudan. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat kembali menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. "Dengan demikian, kita sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15 ya," ujar Zudan.

Diberitakan, sejumlah petinggi BPN Prabowo-Sandiaga mendatangi kantor KPU, Senin siang. Kehadiran mereka itu untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam DPT Pemilu 2019. Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPT_{hp}) yang dirilis KPU

15 Desember 2018. "Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin. "Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan 20 kali," sambung dia.

Cara Kampanye Jokowi Patut Ditiru di Pemilu 2014

JAKARTA. KOMPAS.com — Cara berkampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, dianggap telah memberikan warga contoh baru dalam menjaring suara calon pemilih. Cara jitu ini layak diikuti oleh kalangan elite partai politik atau calon presiden dalam Pemilihan Umum 2014.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, cara kampanye dari Jokowi dan Basuki atau Ahok itu telah menjadi kunci kemenangan kandidat yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut. Cara kampanye itu berbeda dari cara-cara dari figur ataupun elite partai politik sebelumnya. "Cara berkampanye Jokowi-Ahok itu efektif. Dia tidak mengumpulkan orang, tapi datang orang. Kampanye jemput bola yang tentu menghemat biaya," ujar Jeirry di Maarif Institute, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Jeirry menjelaskan, kampanye yang biasa dilakukan figur atau elite parpol dengan cara mengumpulkan orang di lapangan terbukti tidak efektif dalam menarik suara pemilih. Hal tersebut disebabkan adanya jarak antara pemilih dan figur yang akan dipilihnya. Selain itu, masyarakat Indonesia telah jenuh dengan cara kampanye di lapangan yang teramat monoton. Pola kampanye di lapangan itu, menurut Jeirry, dapat dibuat pola, yaitu menyewa lapangan, mengumpulkan massa, mendatangkan public figure, menyampaikan visi-misi, kemudian pulang.

Cara tersebut tidak efektif dalam menyampaikan program kerja, visi, dan misi sebab jarak yang dibangun antara pemilih dan yang dipilih searah sehingga tidak memungkinkan timbulnya hubungan timbal balik atau dialektika yang dapat memberikan solusi alternatif terhadap beragam permasalahan pemilih. "Yang dilakukan Jokowi-Ahok tidak begitu. Mereka berdua tidak menggelar kampanye massal. Mereka masuk gang, keluar gang, lalu menyapa masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Itu kampanye yang efektif dan layak dicontoh," ujarnya. Ia mengatakan, kampanye cara Jokowi dan Basuki tersebut tentunya akan sangat menyerap tenaga. Namun, jika figur

serius untuk membawa angin perubahan bagi masyarakat, kampanye tersebut tentunya tidak menjadi kendala yang berarti.

Dalam konteks Pemilu 2014, baik badan legislatif maupun presiden, calon yang serius tersebut setidaknya pada waktu dekat telah mengambil an-cang-ancang untuk menerapkan cara Jokowi-Basuki dengan berkeliling Indonesia. "Kampanye model itu murah, biayanya hanya modal pesawat doang, lalu jalan mendatangi masyarakat di seluruh Indonesia. Yang terpenting, kan, masyarakat mengenal figur siapa yang akan dipilihnya secara langsung, bukan lewat baliho atau foto," kata Jeirry.

Dalam kampanyenya, Jokowi-Basuki tidak menghendaki pemasangan spanduk atau baliho di tempat-tempat keramaian. Pasangan nomor urut ketiga itu juga didukung oleh gerakan relawan dan publikasi melalui media sosial di internet. Berdasarkan proses hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, Jokowi dan Basuki unggul dalam perolehan suara Pilkada DKI Jakarta 2012. Dalam hitung cepat Litbang Kompas, mereka meraih 52,97 persen suara sah di 200 sampel tempat pemungutan suara. Adapun pesaingnya, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli, yang didukung oleh banyak partai politik, hanya meraih 47,03 persen suara sah.

Lampiran berita 19

Jokowi dan "Personality Politics" Penentu Pemilu Presiden 2014

SINGAPURA, KOMPAS.com — Kepribadian kandidat dinilai bakal menjadi penentu dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia. Kondisi itu dikenal sebagai *personality politics*. "Sosok yang paling berkhayama (dan) mampu menggugah perhatian warga yang akan terpilih," kata *Associate Professor* Leonard Sebastian,

Direktur Program Studi Indonesia di *Rajaratnam School of International Studies*, Singapura, akhir pekan lalu. Sebastian mengatakan, pemilu Indonesia tidak ditentukan oleh ideologi ataupun platform partai politik. Contoh *personality politics* yang berlangsung di Indonesia, sebut dia, adalah melejitnya popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sosok Jokowi dengan kegiatan blusukan-nya, kata Sebastian, mampu menggugah warga, terutama dari kalangan miskin yang tinggal di kawasan kumuh. Jokowi digambarkan sebagai sosok yang merakyat dan tak elitis. Bisnis Jokowi pun diyakini publik dibangun dari bawah sehingga tahu rasa hidup susah.

Sebastian mengatakan, kinerja Jokowi dalam satu tahun terakhir memimpin Jakarta juga terlihat lebih sukses dibandingkan kinerja lima tahun pendahulunya, Fauzi Bowo. Tantangan PDI-P Namun, Sebastian menyebutkan pula satu pertanyaan besar yang akan muncul bila Jokowi ternyata tak menjadi calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekalipun tetap maju dalam Pemilu Presiden 2014.

"Pertanyaannya adalah apakah kepribadian Jokowi akan tetap mampu mendulang suara jika (hanya) dicalonkan menjadi wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri," papar profesor dari Australian National University ini. Sampai saat ini belum ada sinyal nyata dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang calon yang akan mereka usung dalam Pemilu Presiden 2014.

Siapa pun calon yang diusung partai ini, kata Sebastian, penantang mereka adalah Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. Prabowo, papar Sebastian, adalah tokoh populer di pedesaan. Karakter Prabowo juga dikenal tegas, imbuh dia, menjadi antitesis dari figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun figur Aburizal, Sebastian menilainya punya kekurangan dari sisi kharisma dan star power. Menurut Sebastian, stigma Prabowo sebagai pelanggar HAM tidak akan punya pengaruh signifikan. "Prabowo sudah membangun citranya sejak 2009 dan masyarakat mengenalnya, faktor yang sangat penting," ujar dia.

Sementara itu, Partai Demokrat diperkirakan hanya akan memperoleh suara sekitar 10 persen. Bisa maju atau tidaknya kandidat hasil konvensi calon presiden yang digelar partai itu, menurut dia, akan tergantung pada tawar-menawar politik Partai Demokrat dengan koalisinya. Dari semua peserta konvensi, Sebastian menyebut mantan KSAD, Pramono Edhie Wibowo, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai kandidat yang paling berpeluang memenangi proses seleksi internal tersebut.

Tanpa Jokowi, 2014 Bukan Pemilu

JAKARTA,KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, tidak ada tokoh dan politisi yang dapat menandingi popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Dia menyatakan, tanpa Jokowi sebagai peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, perhelatan demokrasi itu tidak dapat disebut pemilu. “2014 tanpa Jokowi, bukan pemilu,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk “Memilih Capres Secara Rasional” di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Ia mengatakan, jika Jokowi atau PDI-P sudah mendeklarasikan pencapresan mantan Wali Kota Surakarta itu, maka keriuhan politik Indonesia hanya pada pusaran pencarian calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi. Dia menilai, Jokowi paling tepat dijagokan menjadi capres. “Karena tidak ada yang bisa menandingi Jokowi,” tutur Boni. Dia bahkan mengilustrasikan, panggung politik Indonesia 2014 bak pertunjukan musik. Dalam pertunjukan tersebut, menurutnya, Jokowi memegang peran sentral sebagai vokalis yang paling mendapat perhatian publik. “Jadi kita hanya perlu mencari penyanyi latar. Yang lain-lain, peserta konvensi itu menjadi penari latarnya,” seloroh Boni yang langsung disambut riuh suara peserta diskusi. Ia mengatakan, tingginya keterpilihan Jokowi didorong kejenuhan publik pada kekuasaan lama yang merupakan cermin kelompok elite.

Dia menilai, Jokowi merupakan pemimpin yang muncul dari akar rumput. Sedangkan, capres dan politisi lain, kata dia, merupakan pemimpin yang datang dari kelompok atas. “Jokowi muncul sebagai indikasi matinya elitisme dalam politik. Kematian elitisme karena sinisme publik terhadap kekuasaan lama,” tuturnya. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Mengingat besarnya antusiasme publik pada Jokowi, Boni menyarankan, PDI-P segera mengumumkan pencapresan Jokowi. Menurutnya, tidak pantas lagi PDI-P memunculkan wajah lama dalam pertandingan politik 2014 nanti.

MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (21/8/2014) malam.

Sidang tersebut dimulai pada pukul 14.30 WIB, sementara putusan dibacakan pada pukul 20.45 WIB. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menerangkan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, perolehan suara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta sempat beberapa kali memperbaiki permohonannya.

Dalam perbaikan permohonan setebal 197 halaman yang diserahkan pada Kamis (7/8/2014) siang, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014. Selain itu, Prabowo-Hatta juga menduga bahwa KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20; serta Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga meminta MK menyatakan

bahwa perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara, dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta berusaha menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) yang dianggap inkonstitusional, adanya pemilih ganda, dan gagalnya KPU menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua. Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis tuduhan itu dengan menghadirkan saksi yang domisilinya disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi-JK menghadirkan saksi yang memperkuat argumentasi KPU. Persidangan berlangsung pada 6-21 Agustus 2014. Sebelum memutuskan, majelis hakim konstitusi telah memeriksa puluhan saksi dan belasan ahli yang dihadirkan semua pihak, pemeriksaan bukti, serta menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup.

Lampiran berita 22

Pengamat: Tuduhan Prabowo-Hatta soal Pemilu Curang Tak Meyakinkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai, tuduhan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi soal adanya pemilu yang curang tidak meyakinkan. Hal itu, kata dia, terlihat dari saksi-saksi yang tidak memiliki data yang kuat tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. "Selain jumlah kasusnya relatif kecil, kenyataannya, modus dan bukti-bukti atas tuduhan itu juga tidak terlalu meyakinkan," kata Ray di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Dia mengatakan, dalam kasus di Jawa Timur, saksi yang dihadirkan dalam persidangan belum memuaskan terkait tuduhan adanya penggelembungan suara, pemilih yang tak berhak menggunakan hak pilihnya, atau pengerahan massa yang dilakukan oleh aparaturnegara. "Perdebatan yang diharapkan akan membuka berbagai modus kecurangan pilpres tampaknya tak sepenuhnya akan menuai harapan," ucap dia. Ray pun menyarankan kepada tim Prabowo-Hatta untuk bisa membuktikan lebih lanjut dengan fokus pada adu bukti, bukan adu agitasi. Selain itu, tim Prabowo-Hatta juga sebaiknya menghadirkan saksi-saksi kredibel yang dapat mengubah asumsi menjadi fakta yang meyakinkan. "Bila mereka tidak dapat membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di suatu daerah, potensi mereka untuk menang akan makin tipis," ucap Ray

Lampiran Berita 23

Halalkan "Serangan Fajar", Prabowo Dianggap Tidak Paham Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyayangkan pernyataan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, yang memperbolehkan pendukungnya menerima uang suap untuk mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.

Prabowo dinilai telah menghalalkan politik uang yang diharamkan dalam demokrasi. "Bagaimana mungkin yang jelas-jelas dilarang undang-undang itu diperbolehkan. Ini memberi kesan Prabowo tidak mengerti apa makna demokrasi dan makna pemilu dalam negara yang demokratis," ujar Ray di Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Ray mengatakan, pemilu dalam negara demokratis membiarkan masyarakat memberi suara kepada orang yang dipilihnya atas dasar rasionalitas, bukan karena uang. Tidak hanya tertuju kepada Prabowo, para pelaku politik uang pun dianggap Ray keliru memahami pentingnya pemilu yang demokratis. "Kalau uang dijadikan sebagai patokan pemilu, tidak perlu ada pemilu yang demokratis. Cukup kontrak saja pakai uang, maka Anda terpilih," ujarnya. Dalam orasinya di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (10/6/2014),

Prabowo meminta pendukungnya untuk menerima uang yang ditawarkan dalam "serangan fajar", tetapi tetap mendukung dirinya dan Hatta Rajasa. Menurut dia, uang yang dibagikan tersebut merupakan uang rakyat. "Masa nolak rezeki. Uang itu yang dia rampok dari negara. Kalau terima ya sopan aja, yang besok coblos nomor satu," kata Prabowo.

Lampiran berita 24

Harian Kompas edisi 20 September 2014

JANGAN REBUT HAK RAKYAT

Pilkada Langsung ke DPRD Bukan Solusi Tepat

Semarang, KOMPAS- Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai merebut hak politik rakyat. Upaya mengembalikan pilkada langsung menjadi pilkada tak langsung melalui DPRD merupakan gerak mundur dan tidak akan mendapat legitimasi dari rakyat yang menghendaki pilkada langsung.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dalam pidato politik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, di Semarang, Jawa Tengah. Hadir dalam acara itu ketua umum partai-partai pendukung Joko Widodo- Jusuf Kalla, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad H Wibowo dan Ketua DPP PAN Tjatur Supto Edy, serta pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkali yang dalam pemilu Presiden 2014 mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Megawati menilai, berbagai upaya melalui konsolidasi kekuasaan oleh pihak tertentu untuk mengubah pelaksanaan pemilu langsung harus disikapi secara kritis. "Upaya itu nyata-nyata mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat ke sekelompok elit yang sering kali justru menyalahgunakan kekuasaan," katanya.

Megawati berpendapat, perdebatan akhir-akhir ini terkait RUU Pilkada yang ingin dikembalikan ke pemilihan melalui DPRD merupakan sebuah gerak mundur. "Gerak mundur ini dipastikan tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat karena mencoba mencabut hak politik rakyat," kata Megawati. PDI-P, lanjut Megawati, berketetapan menjaga semangat reformasi. Sangat besar konsekuensinya jika gerak mundur itu di analogikan untuk agenda reformasi lain, yaitu pemilihan Presiden oleh segelintir elite. Megawati menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu langsung di satu sisi, terlihat kemajuan dalam proses demokrasi di Indonesia yang benar-benar menempatkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya terkait regulasi, ketaatan pada aturan main, berbagai upaya untuk mengatasi belanja pemilu yang bersumber dari APBN atau APBD bagi petahana, dan bermacam kecurangan.